



Penyaluran Dana Desa Dipercepat

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa

Denpasar (Bali Post) -

Penyaluran dan pengelolaan Dana Desa kini dipercepat agar kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di desa bisa berjalan secara baik, mengingat saat ini kondisi ekonomi dunia tengah mengalami penurunan akibat wabah virus Corona. "Untuk itu, pemerintah pusat mencoba mengantisipasi pelambatan ekonomi ini dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa yang distimulus oleh Dana Desa," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik usai membuka Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, di Sanur, Denpasar, Selasa (25/2) kemarin.

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pemanfaatan Dana Desa dimulai awal tahun dan diutamakan melalui program padat karya yang memberikan kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin di pedesaan. Selain itu, Dana Desa agar diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif di desa, serta dikelola dan dimanfaatkan dengan manajemen yang baik. Khusus di Bali, Akmal meminta 636 desa bisa bersinergi dengan 1.493 desa adat. "Kita berharap kolaborasi antara desa dinas dan desa adat ini bisa menjadi benteng bagi pembangunan ekonomi di Bali," jelasnya.

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali I Wayan Suarjana mengatakan, peningkatan pagu dan realisasi Dana Desa sejak 2015 sampai 2019 telah mampu menurunkan persentase

jumlah penduduk miskin di pedesaan. Terbukti, persentase kemiskinan pedesaan di Bali pada September 2019 sebesar 4,86 persen berada jauh di bawah persentase kemiskinan pedesaan tingkat nasional sebesar 12,60 persen. Hal ini mengindikasikan Dana Desa memberikan dampak positif untuk menekan angka kemiskinan di pedesaan.

"Di samping itu, pemberian Dana Desa ini sangat berpengaruh positif dan signifikan dalam mendukung perkembangan status desa di Bali," imbuh mantan Sekretaris DPRD Bali ini.

Tahun 2016 lalu, lanjut Suarjana, Bali masih memiliki empat desa sangat tertinggal dan 78 desa tertinggal. Kemudian, 279 desa berkembang, 248 desa maju, dan 27 desa mandiri. Sejak 2018 sudah tidak ada lagi desa dengan

status sangat tertinggal dan tertinggal. Berlanjut pada 2019, komposisi desa sangat tertinggal dan tertinggal nol, desa berkembang menurun menjadi 124, desa maju meningkat menjadi 370, dan desa mandiri meningkat menjadi 142 desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina mengatakan, tahun ini 636 desa di Bali telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp 657.798.211.000. Alokasi ini naik 4 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp 630.189.586.000. Pencairan Dana Desa sebelumnya harus memenuhi sejumlah persyaratan. Tetapi kini sudah disederhanakan agar Dana Desa lebih cepat bisa dicairkan. Dulu, Dana Desa ditransfer dari pusat ke Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD).

Paling lambat tujuh hari setelah masuk ke RKUD harus sudah dicairkan di RKD. Sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan seperti itu. Penyederhanaan berikutnya, tidak ada lagi persyaratan harus menunggu semua desa siap untuk administrasinya.

"Sekarang siapa yang siap, itu sudah bisa dicairkan dan pencairan Dana Desa ke RKD dilakukan setiap minggu, tidak perlu lagi ada pelaporan melengkapinya dokumen peraturan bupati tentang APBD kabupaten. Beda dengan tahun sebelumnya," jelasnya.

Anom menambahkan, Dana Desa tetap dicairkan dalam tiga tahap. Namun besarnya berbeda, dari sebelumnya 20 persen di tahap pertama dan masing-masing 40 persen di tahap kedua dan ketiga. Sekarang dibalik menjadi masing-masing 40 persen di tahap pertama dan kedua, dan 20 persen di tahap ketiga. (kmb32)

Edisi : Rabu, 26 Februari 2020

Hal : 2



Bupati Giri Prasta Kunjungi SMAN 2 Abiansemal

Pembangunan Lab,

Perpustakaan dan Penataan Sekolah Digarap Tahun Ini

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta, Senin (24/2) kemarin berkunjung ke SMAN 2 Abiansemal yang berlokasi di Banjar Aseman, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal. Kun-

jungan ini guna melihat secara langsung bangunan sekolah yang baru selesai dibangun dan kini sudah menerima siswa baru kelas 10. Bupati juga bertatap muka langsung

dengan seluruh siswa, para guru, pegawai, komite sekolah, orangtua siswa, guna memberikan motivasi dan semangat untuk kemajuan SMAN 2 Abiansemal.

Turut mendampingi Bupati Giri Prasta yakni anggota DPRD Provinsi Bali I Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD Badung I Made Sumertha, I Nyoman Dirgayusa dan Ni Luh Putu Sekarini, Kadisdikpora Provinsi Bali Drs. Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Kadisdikpora Badung I Ketut Widia Astika, Camat Abiansemal I.B. Putu Mas Arimbawa beserta Tripika Kecamatan.

Dalam tatap muka tersebut, Bupati Giri Prasta menekankan pembangunan di bidang pendidikan sudah menjadi salah satu prioritas program pembangunan di Kabupaten Badung. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pendataan jumlah TK/PAUD dan SD di Badung, termasuk jumlah siswa dan sarana dan prasarannya. Sehingga akan dapat diketahui berapa dibutuhkan sekolah SMP dan SMA. Pembangunan SMAN 2 Abiansemal merupakan langkah konkret yang telah diwujudkan di tahun 2019 dengan anggaran APBD Badung sebesar Rp 57,8 miliar lebih. Bangunan SMAN 2 sangat megah berlantai tiga dilengkapi dengan basement.

Sementara sarana-prasarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan dan penataan halaman sekolah akan segera dilaksanakan di tahun 2020 ini. "Saya pastikan lab, perpustakaan, dan penataan sekolah digarap tahun ini dengan anggaran Rp 14 miliar," tegasnya.

Sementara terkait usulan sekolah agar diwujudkan jalan tembus Sedang-Sibangkaja, karena saat ini akses masuk sekolah melewati perumahan, hal tersebut sangat diapresiasi dan Bupati Giri Prasta sangat mendukung pembangunan jalan tersebut. "Terkait jalan tembus di Sibangkaja, kami minta agar dikordinasikan dengan masyarakat. Kalau pun nanti ada tanah masyarakat yang harus dibeli, kami juga siap membeli. Namun dengan satu catatan, pembebasan lahan dilakukan oleh tim appraisal," tambah Bupati Giri Prasta.

Kepada siswa, Bupati Giri Prasta memberikan motivasi agar betul-betul membuat sebuah peninggalan/legacy di sekolah ini. Bupati menginginkan sebagai angkatan pertama di SMAN 2 Abiansemal, para siswa agar

belajar dan menunjukkan kemampuan terbaik sehingga nantinya dapat berprestasi dan membawa nama baik sekolah, Badung maupun Bali di tingkat nasional. "Kami bangun sekolah ini karena rasa cinta dan kasih sayang kami kepada anak-anak di Badung, khususnya di Abiansemal. Untuk itu, sebagai generasi penerus, saya mau kalian jauh lebih pintar, karena nanti kalianlah yang akan meneruskan pembangunan di Kabupaten Badung dan Bali yang kita cintai," jelasnya.

Kepala SMAN 2 Abiansemal I Made Kupasada menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Badung beserta anggota DPRD Provinsi Bali dan DPRD Badung, serta dinas terkait di SMAN 2 Abiansemal. Pihaknya juga berterima kasih atas terbanggunya sekolah SMA di Desa Sedang ini. Sekolah ini dilengkapi dengan ruang kelas 27 kelas dan ruang utama serta dilengkapi dua basement. Saat ini baru terisi 13 kelas dengan jumlah siswa 443 siswa. Rencananya di tahun 2020 akan menerima siswa kembali sebanyak 11 kelas. Rencana pembangunan selanjutnya

seperti lab, perpustakaan sekolah, kantin dan penataan halaman untuk upacara. Akses menuju sekolah masuk perumahan, nampaknya tidak etis, mudah-mudahan ke depan diusahakan jalan tembus di Sibangkaja sehingga sangat strategis. Selain itu, sarana pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dimohonkan kepada Kadisdikpora Provinsi Bali.

Ketua Komite SMAN 2 Abiansemal I Wayan Sudiarta juga merasa bangga dan sebuah kehormatan atas kehadiran Bupati beserta jajaran yang akan memberi angin segar untuk kemajuan SMAN 2 Abiansemal. Diakui, memang keinginan masyarakat untuk terbangunnya SMA di Sedang sudah dari dulu, dan saat kepemimpinan Bupati Giri Prasta hal ini dapat terwujud. Ia juga mengungkapkan keinginannya agar jalan Sibangkaja-Sedang segera terwujud. Selain itu, di sebelah selatan sekolah juga masih ada lahan pertanian milik provinsi, ke depan agar dimohonkan dan dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk memperkenalkan budaya pertanian. (ad713)



✓ Digelontor Pusat Rp 10 Miliar 2020 Dikembangkan Komoditas Manggis

Tabanan (Bali Post) -

Kementerian Pertanian di tahun 2020 menggelontorkan anggaran senilai Rp 10 miliar untuk pengembangan sejumlah komoditas hortikultura seperti bawang putih, manggis, cabai, dan tanaman obat di Kabupaten Tabanan. Meski anggarannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 11 miliar, penambahan luas kawasan di tahun 2020 ini lebih diprioritaskan komoditas manggis. Hal itu dipercaya sudah sesuai kebutuhan pasar nasional untuk memenuhi ekspor.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura I Wayan Suandra seizin Kepala Dinas Pertanian I Nyoman Budana mengatakan,

tiap tahun ada kucuran anggaran pusat untuk program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura. Hanya saja di tahun 2020 dari anggaran sebesar Rp 10 miliar itu yang digunakan pengembangan kawasan komoditi bawang putih sudah ada penurunan. Tahun 2018 pengembangan kawasan bawang putih seluas 225 hektar. Namun saat ini diturunkan. Di tahun 2020 ini rencananya dikembangkan di Kecamatan Pupuan dan Penebel seluas 150 hektar saja.

"Jadi pengembangan buah manggis dominan dilakukan tahun depan. Komoditas manggis disesuaikan dengan unggulan ekspor nasional. Untuk di Tabanan

rencananya dikembangkan di Selemadeg, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat dan Pupuan di atas lahan seluas 200 hektar," terangnya.

Jenis manggis yang dikembangkan, kata Suandra adalah Manggis Kaligesing. Manggis itu merupakan komoditi unggulan pemerintah pusat lantaran dagingnya lebih tebal.

Selain bawang putih dan manggis, juga dikembangkan hortikultura jenis tanaman obat. Seperti jahe seluas 20 hektar. Jahe akan dikembangkan di Kecamatan Marga dan Penebel, aneka cabai seluas 55 hektar di Kecamatan Baturiti, Marga, Penebel, Kerambitan, dan Kediri.

"Terbaru kawasan sayuran berdaun. Seperti kol, kubis,

selada, sawi ijo, seluas 25 hektar akan dikembangkan di Kecamatan Baturiti, Penebel dan Marga. Sebelumnya tidak ada. Baru kali ini mulai dikembangkan," pungkasnya.

Anggaran pengembangan kawasan hortikultura tahun 2019 nilainya sebesar Rp 11,7 miliar lebih. Menurut Suandra, dana itu sudah terealisasi 96,50 persen atau Rp 11,3 miliar lebih. Peruntukan anggaran tersebut paling besar untuk pengembangan bawang putih seluas 225 hektar yang akan dilakukan di tiga kecamatan yakni di Kecamatan Pupuan seluas 15 hektar, Kecamatan Baturiti 85 hektar, dan Kecamatan Penebel 125 hektar. "Realisasi akhir tahun ini sudah seluruhnya tertanam," pungkasnya. (kmb28)



Belum Diganti Rugi, 20 Bidang Tanah di Bendungan Tamblang

Singaraja (Bali Post) -

Pembayaran ganti rugi tanah yang terkena jalur proyek Bendungan Tamblang di perbatasan Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Sawan, mengalami hambatan teknis. Dari 212 bidang tanah milik warga dari empat desa yang terkena jalur proyek, ada 190 bidang tanah ganti ruginya sudah dilunasi oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, dan 2 bidang masih proses pencocokan nomor rekening bank sebelum menerima

dana ganti rugi. Sisanya, 20 bidang tanah ganti ruginya belum dibayar, karena pemilik tidak menyerahkan sertifikat tanah yang asli. Atas kondisi ini, dana ganti rugi dengan nilai sekitar Rp 12 miliar itu dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja.

Kepala Satuan Kerja (Kasaker) Bendungan BWS Bali-Penida, I Gusti Putu Wandira, dihubungi Jumat (21/2) kemarin mengatakan, ada beberapa faktor teknis mengapa 20 bidang tanah tidak bisa di-

ganti rugi. Di antaranya karena pihak pemilik tidak mampu menyetorkan sertifikat tanah yang asli. Sementara, aturan dalam pembebasan tanah oleh pemerintah, pemilik harus menyerahkan sertifikat asli. Selain itu, ada juga pemilik tidak bisa menyerahkan sertifikatnya, karena dalam waktu bersamaan sertifikat tanah yang terkena jalur proyek menjadi jaminan kredit di perbankan.

Menurut I Gusti Putu Wandira, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak

PN untuk memproses penitipan dana ganti rugi untuk 20 bidang tanah tersebut. Solusi untuk menitipkan dana ganti rugi ke PN melalui prosedur konsinyasi ini bisa ditempuh kalau dalam tahapan ganti rugi berkas administrasinya tidak lengkap atau karena pemilik tanah keberatan dengan nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah.

Di sisi lain, I Gusti Putu Wandira menyebut, meskipun belum 100 persen bidang tanah yang diganti rugi, namun

pengerjaan konstruksi awal dalam proyek ini tetap berjalan. Ini karena, dari sosialisasi awal sampai penetapan lokasi (penlok), pemilik tanah di empat desa, yaitu Desa Sawan dan Desa Bebetin (Kecamatan Sawan), Desa Bila dan Desa Bonthing (Kecamatan Kubutambahan) mendukung proyek nasional ini. Salah satu bukti dukungan itu, pemilik sudah menyerahkan tanahnya untuk dijadikan akses jalan mobilisasi alat berat dan keperluan teknis lain. (kmb38)



Kejar Target Retribusi Dishub Lakukan Uji Petik 30 Titik Parkir

Tabanan (Bali Post) -

Hilangnya empat objek sasaran retribusi parkir dengan potensi pendapatan mencapai Rp 350 juta per tahun, membuat Dinas Perhubungan Tabanan harus mencari potensi objek parkir baru. Kehilangan retribusi akibat ada perubahan objek pajak parker, saat ini akan dikelola Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Karena itu membuat Dinas Perhubungan Tabanan harus mencari potensi objek baru. Itu harus dilakukan untuk bisa mengejar realisasi target yang dipasang Rp 7,02 miliar di tahun anggaran 2020. Dalam waktu dekat ini pihaknya dengan instansi terkait melakukan uji petik di semua titik parkir.

Kepala Dinas Perhubungan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama mengatakan ada 30 titik objek parkir yang terdata. Dari 30 tersebut, tiap harinya secara bergilir akan dilakukan kegiatan uji petik. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kemungkinan kebocoran dari petugas. Dilihat juga berapa persentase masyarakat yang tidak tertib membayar parkir. "Modelnya seperti survei. Karena itu akan disiapkan timnya. Tim itu nantinya akan

menghitung jumlah wajib parkir yang masuk ke semua titik objek parkir per hari. Agenda itu dilakukan setelah hari raya Galungan ini," jelasnya, Kamis (20/2) kemarin.

Menurutnya, mekanisme kinerja tim yang dibentuk akan senantiasa memantau satu titik objek parkir dalam sehari. Artinya, untuk titik objek parkir yang potensinya ada pada waktu pagi hari, siang dan malam hari. Uji petiknya akan dilakukan sesuai potensi waktu tersebut. Jika potensi objek parkir hanya terjadi malam hari, maka uji petiknya juga dilakukan saat malam hari. Begitu juga jika objek parkir hanya terjadi di pagi hari, maka uji petiknya pagi saja. "Dengan 30 titik objek parkir, artinya kegiatan uji petik ini dilakukan sekitar satu bulan," terangnya.

Ia berharap dengan cara ini akan bisa diketahui potensi yang ada. Misalnya saja ketika uji petik di satu titik objek parkir menghasilkan data potensi mencapai Rp 2 juta per hari. Maka pada titik objek tersebut potensinya atau rata-rata akan bisa diketahui pergerakan naik turun penerimaan retribusi parkir berkisar di level 10-20 persen



KANTONG PARKIR - Kepala Dinas Perhubungan Tabanan dan jajaran terus melakukan pengawasan pada kantong kantong parkir.

dari hasil data uji petik itu. Kecuali dipengaruhi hujan atau kondisi pada titik objek parkir dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu, maka kemungkinan terjadi penurunan persentase cukup tajam dari hasil uji petik sebelumnya.

Begitupun hasil uji petik ini juga tidak menutup kemungkinan mengetahui adanya potensi kebocoran di lapangan. Artinya, jika dari kajian ditemukan ada kebocoran di tingkat petugas lapangan, maka pihaknya akan memperketat penga-

wasan di lapangan. Sebaliknya, jika kebocoran terjadi di pihak wajib parkir, maka diperkuat dengan melakukan sosialisasi ke lapangan. Di mana saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak perbankan khususnya mensosialisasikan penggunaan kartu elektronik untuk pembayaran parkir ke depannya. "Saat ini penggunaan kartu elektronik di tingkat masyarakat kami lihat masih rendah. Kebanyakan bayar parkirnya secara manual," ucapnya. (kmb28)



Gedung Baru RSU Negara Diresmikan

Bupati Artha Minta Jangan Ada Diskriminasi Layanan

BUPATI Jembrana I Putu Artha meresmikan pemanfaatan gedung baru RSU Negara, Jumat (14/2) kemarin. Pembangunan Rumah Sakit Umum Negara dikerjakan dengan anggaran Murni APBD Jembrana sebesar Rp 179.333.889.000.

Acara peresmian berlangsung meriah dengan tematik

Valentine. Ini dipilih mengingat acara *launching* bertepatan dengan Hari Valentine, 14 Februari. Prosesi *launching* ditandai dengan penandatangan prasasti, pelepasan balon serta penggungtingan pita.

Direktur RSU Negara I Gst. Bagus Ketut Oka Parwata dalam laporannya mengatakan, pembangunan RSU

Negara ini dikerjakan selama dua tahun (2018-2019). "Pembangunan ini dikerjakan dengan sistem kontrak dengan anggaran yang bersumber dari APBD murni Kabupaten Jembrana dengan sistem kontrak desain rancang bangun tahun 2018-2019," ujarnya.

Enam gedung baru yang dibangun, kata Parwata, di antaranya gedung IGD, gedung Poliklinik, gedung Rawat Inap (kelas I, II dan III), gedung Rawat Inap VIP, gedung Instalasi Bedah Sentral, gedung Laboratorium. "Gedung baru ini selain menambah fasilitas, juga motivasi bagi kami meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus derajat kesehatan masyarakat Jembrana," ujar dr. IGB Ketut Oka Parwata.

Kata dia, dengan penambahan gedung baru itu, total luasan RSU Negara kini mencapai 3 hektar. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) juga lebih luas dengan bangunan berlantai tiga. IGD dilengkapi ruang triage, ruang kebidanan, ruang dekontaminasi, ruang isolasi, ruang ashma

bayi serta didukung ambulans yang siap siaga.

Ketersediaan kamar rawat inap juga bertambah dengan gedung baru rawat inap dan VIP. Kapasitasnya kini memiliki 15 tempat tidur VVIP serta 40 tempat tidur VIP. Sementara Ruang Irna I, II dan III memiliki daya tampung 149 bed. Begitu halnya dengan sarana parkir RSU Negara jauh lebih luas dari sebelumnya.

Bupati Jembrana I Putu Artha sela-sela peresmian itu mengatakan, dengan dibangunnya beberapa fasilitas di RSU Negara ini, Direktur dan segenap jajarannya agar senantiasa menjaga dan merawatnya dengan baik. "Pembangunan gedung ini menelan anggaran yang cukup besar. Itu semua bersumber dari APBD murni Kabupaten Jembrana. Untuk itu saya minta kepada direktur dan segenap jajaran RSU Negara ini untuk senantiasa menjaga dan merawatnya dengan baik, sehingga akan selalu memberikan suasana nyaman bagi warga masyarakat



RSU NEGARA - Bupati Artha berjabat tangan dengan Wabup Kembang Hartawan saat peresmian RSU Negara, kemarin, disaksikan Ketua DPRD Jembrana, Sekda Jembrana dan Dirut RSU Negara.

kat terutama para pasien," ujarnya.

Ia juga menegaskan, dengan meningkatnya fasilitas pelayanan di RSU Negara ini tentu pola pelayanan kepada masyarakat harus semakin baik. "Kami minta semua pasien mendapat perlakuan yang sama dari para petugas di RSU Negara ini. Tidak ada nanti pasien mendapat perlakuan diskriminatif. Lakukan dan layani semua pasien dan

masyarakat sesuai standar yang ada. Sehingga kehadiran para pasien khususnya warga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan akan merasa senang dan puas," tegasnya.

Terkait dengan kebutuhan tenaga medis, Bupati mengaku kalau Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mendisposisi para dokter umum untuk disekolahkan menjadi dokter spesialis sesuai kebutuhan di RSU Nega-

ra. "Saat ini kalau bidan dan perawat sudah memadai. Namun, kami juga mengakui kalau di RSU Negara ini masih kekurangan dokter spesialis. Atas kondisi itu Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyekolahkan calon dokter spesialis sesuai dengan kebutuh RSU. Jika nanti mereka telah menyelesaikan sekolahnya tentu akan kita tugaskan di RSU Negara kembali," pungkasnya. (ad422)



Pemkab Beli 525 Babi di 11 Desa Terkena Wabah

Gianyar (Bali Post) -

Pemkab Gianyar memastikan akan membeli ratusan babi yang masih sehat, dari 12 desa yang terserang wabah. Bila dikalkulasi dengan nilai pasar daging babi Rp 26 ribu per kilogram, maka ratusan babi itu akan dibeli senilai Rp 1,3 miliar lebih. Uang itu dihimpun dari uang tunjangan beras. Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengungkapkan hal itu, Minggu (16/2) kemarin.

Menurut Mahayastra, jajarannya sudah mendata sekitar 525 babi di 11 desa yang sempat terkena wabah, meliputi Desa Lebih, Abianbase, Keramas, Kemenuh, Pejeng Kangin, Tampaksiring, Sebatu, Keliki, Taro, Melinggih dan Singakerta. Dari jumlah itu, masing-masing peternak ada yang memelihara 100 hingga 2 ekor babi. "Sudah didata 525 ekor babi," tegasnya.

Mahayastra mengatakan, sampai Minggu siang kemarin order babi masih berlangsung. Dipastikan, proses pemotongan seluruh babi itu akan berlangsung pada Senin (17/2) hari ini dan Selasa (18/2) besok. "Jadi, babi ini akan dipotong bersama menyambut hari raya Galungan," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah mengalkulasikan untuk pembelian 525 ekor babi ini akan membutuhkan biaya Rp 1.365.000.000. Untuk menghimpun anggaran dengan jumlah tersebut, maka dikerahkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk berpartisipasi. "Ke-

bijakan saya menggunakan uang tunjangan beras yang nilainya Rp 150 ribu diganti dengan daging babi," ujarnya.

Namun, katanya, ada juga OPD yang sudah memiliki tabungan, sehingga tidak perlu dilakukan penggantian tunjangan beras menjadi daging babi. "Kami ganti itu dengan 3 kilogram sampai 4 kilogram daging babi. Itu (yang pakai tunjangan-red) kebijakan saya. Tapi, ternyata OPD ada yang sudah punya uang tabungan, sehingga ada yang sudah dibayar langsung. Kalau sudah dibayar langsung berarti tidak perlu dipotong lagi tunjangan berasnya," katanya.

Mahayastra menegaskan, petugas kesehatan hewan juga sudah dikerahkan untuk melakukan pengecekan kondisi ratusan ternak babi tersebut. Alhasil, 525 ekor ternak itu dinyatakan sehat dan layak untuk dikonsumsi. "Sudah dicek semua dan layak untuk dikonsumsi. Nanti juga

akan ada stempel dari Dinas Pertanian untuk memastikan seluruh babi layak dikonsumsi," jelasnya.

Mahayastra menambahkan, langkah membeli seluruh ternak babi di 11 desa ini tentu bukan tanpa alasan. Selain untuk menjaga kestabilan harga daging babi saat menyambut hari raya Galungan, upaya ini juga dilakukan untuk memutus siklus wabah kematian babi yang terjadi di 11 desa tersebut. "Saya akan habiskan di 11 desa itu agar tidak ada ada ternak babi dan kandang itu harus dikosongkan selama enam bulan. Kandang harus dikosongkan selama enam bulan untuk pemutusan siklus," tegasnya. (kmb35)

Edisi : Senin, 17 Februari 2020

Hal : 9



Anggaran Kebencanaan Turun Rp 300 Juta Lebih

Amlapura (Bali Post) -

Potensi terjadinya bencana di Kabupaten Karangasem cukup tinggi. Tingginya risiko bencana yang terjadi tidak diimbangi dengan besarnya anggaran kebencanaan yang digelontorkan untuk hal tersebut. Bahkan pada tahun 2020 ini, anggaran khusus kebencanaan menurun hingga Rp 300 juta lebih dibandingkan tahun lalu.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Karangasem Ni Wayan Asmi Sukmawati mengatakan, khusus untuk anggaran kebencanaan yang digelontorkan tahun ini memang mengalami penurunan dari tahun lalu. Pada tahun 2019 lalu, anggaran kebencanaan sekitar Rp 830 juta. Sedangkan untuk tahun ini sekitar Rp 500 juta. "Jadi, anggaran tahun ini turun sekitar Rp 300 juta lebih," ujar Asmi Sukmawati, Minggu (16/2) kemarin.

Asmi Sukmawati menam-

bahkan, anggaran yang digelontorkan tersebut di antaranya diperuntukkan untuk biaya operasional BBM, servis kendaraan, suku cadang kendaraan, biaya pemeliharaan dan sewa alat berat. Dengan kondisi seperti ini, dalam penanganan kebencanaan pihaknya tetap bergerak maksimal. Hanya saja, untuk lebih memaksimalkan penangan setiap bencana yang terjadi, pihaknya lebih mengaktifkan koordinasi dengan masyarakat setempat tempat bencana itu terjadi.

Artinya, bila ada bencana tanah longsor, dan itu masih bisa ditangani oleh masyarakat, maka mereka bisa menanganinya secara swadaya dengan gotong royong. "Karena bergerak dengan masyarakat lebih efektif, sekaligus menyadarkan warga untuk ikut bersama-sama menangani setiap bencana yang terjadi di masyarakat. Kalau memang bencana besar dan membutuhkan alat berat, maka kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk peminja-

man alat berat," katanya.

Ia mengakui, khusus untuk sewa alat berat anggarannya sangat kecil, yakni hanya Rp 35 juta saja. Sementara bila hendak menyewa alat berat harganya cukup mahal mencapai belasan juta. Melihat kondisi itu, mau tidak mau pihaknya harus mengirit atau efisiensi anggaran agar tidak cepat habis. "Kalau melihat anggaran, kalau hendak menyewa alat berat, paling hanya dua kali sudah habis. Karena sekali sewa alat berat harg-

nya mahal. Makanya, kalau ada longsor besar, kami tetap koordinasi dengan OPD terkait, yakni Dinas PUPR. Tapi, kalau kondisi *emergency* dan OPD terkait tidak bisa, baru kami akan mengeluarkan dana itu untuk sewa alat berat," tegasnya.

Asmi Sukmawati menambahkan, pihaknya berharap anggaran kebencanaan maupun sewa alat berat bisa ditingkatkan lagi. Pasalnya, potensi bencana di Karangasem cukup tinggi. Mulai dari tanah longsor, pohon tumbang dan bencana lainnya. "Dengan anggaran yang memadai, kami bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas di lapangan," tegasnya. (kmb41)

Edisi : Senin, 17 Pebruari 2020

Hal : 15



Dua Mesin Rusak

Ancam Realisasi Target Retribusi Parkir

DINAS Perhubungan Tabanan tampaknya harus kerja ekstra keras agar bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bidang parkir tahun ini. Sebab, dengan dibebani target Rp 7,02 miliar, ternyata ada beberapa kendala yang berpotensi mengancam capaian PAD. Salah satunya *Barrier gate* atau sistem parkir otomatis di areal parkir transit Pasar Tabanan mengalami kerusakan. Dan satu lagi mesin *e-parkir on street* yang rusak dibagian LCD. Bagaimanakah solusi yang dilakukan dan langkah-langkah perbaikan guna mengoptimalkan capaian PAD itu?

Kepala Dinas Perhubungan I Gusti Ngurah Darma Utama mengatakan kerusakan *barrier gate* terjadi pada alat sensor untuk menaik turunkan plang. Kerusakan itu tentu berpengaruh pada sistem progresif (lama waktu parkir) jadi tidak berfungsi. Karenanya kerusakan itu berdampak kehilangan potensi pendapatan sekitar 20 persen per bulan.

"Asumsi pendapatan di parkir transit ini Rp 2 juta sampai Rp 2,4 juta per hari saat mesin baik, tergantung pasar. Kebetulan saat ini jelang hari raya, meski progresif mati masih bisa terjaring," terangnya di sela-sela turun mengecek kondisi *barrier gate*, Rabu (12/2) kemarin.

Selain alat sensor *barrier gate* yang rusak, satu mesin *e-parkir on street* di Jalan Ga-

jah Mada juga dikatakannya rusak di bagian LCD. Terkait kerusakan ini, kata Darma Putra, sudah dilakukan pemeliharaan sesuai mekanisme dan prosedur, penggantian alat dan cara pemesanan.

"Untuk dua alat ini sudah proses pemesanan di Jakarta dan Malaysia. Dalam waktu dekat sudah datang. Kami harapkan bisa kembali normal," ucapnya.

Tidak hanya disebabkan dua alat mesin rusak. Kendala lain yang dihadapi merealisasikan capaian target retribusi parkir, yakni hasil temuan Inspektorat Provinsi. Dikatakan, empat objek sasaran retribusi parkir hilang, seperti Apotek Nanuska, depan rumah Budiarta, rumah makan babi gulung Perean, dan depan Bank Mandiri Kecamatan Tabanan.

Hilangnya potensi ini karena berubah menjadi objek pajak parkir yang dikelola Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Padahal di empat objek ini potensi pertahun dapat dari retribusi parkir mencapai Rp 350 juta.

Begitu pun diakui Camat Selemadeg Timur, masih ada rasa enggan masyarakat menuju mesin yang telah disiapkan untuk melakukan pembayaran parkir. Demikian juga sosialisasi atau kesadaran masyarakat menggunakan kartu elektronik masih rendah. "Ini yang kami bahas dalam rapat evaluasi Selasa kemarin. Rencananya kami berkoordinasi dengan BI untuk menggencarkan pembayaran dengan kartu elektronik," terangnya.

Darma Putra menambahkan, intensitas kenaikan target pajak dari sebelumnya Rp 5,5 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 7,02 miliar di tahun 2020 ini, sayangnya tidak diimbangi tambahan objek, justru malah ada pengurangan objek. "Meski demikian, hal itu tetap merupakan kewajiban kami untuk mencapai target. Sudah pasti harus kerja ekstra keras. Tiap bulan kami lakukan evaluasi," pungkasnya.

Terkait capaian target, mengawali tahun 2020 atau di bulan Januari sudah tertinggal dari sebelumnya Rp 500 juta per bulan. Saat ini baru mencapai Rp 400 juta per bulan. "Penyebabnya, ke-

hilangan objek, ada *event* tertentu, seperti upacara ngaben, *pamelastian* dan permintaan masyarakat melakukan arak-arakan meminta pengosongan areal yang dilalui," pungkasnya. (bit)



Kasus LPD Desa Pakraman Gerokgak Dilimpahkan ke Tipikor

Denpasar (Bali Post) -

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Buleleng sudah melimpahkan berkas dakwaan kasus dugaan korupsi LPD Desa Pakraman Gerokgak, Buleleng, dengan tersangka Komang Agus Purtajaya. "Berkas sudah kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar," ujar Kasipidsus Kejari Buleleng Wayan Genip, Rabu (12/2) kemarin.

Atas pelimpahan itu, jaksa tinggal menunggu jadwal si-

dang dari Pengadilan Tipikor Denpasar. Sebelumnya, Ketua LPD Desa Pakraman Gerokgak, Buleleng, Komang Agus Purtajaya, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pidsus Kejati Bali. Dia akhirnya ditahan Kamis (16/1). Dia diduga melakukan tindak pidana kredit fiktif nasabah sejak tahun 2008 sampai 2015. Nilai kerugian dalam perkara ini mencapai Rp 1,264 miliar.

Setelah melakukan pemang-

gilan, tersangka langsung ditahan. Bahkan penyidik Pidsus Kejati Bali langsung menggiring tersangka ke Kejari Buleleng untuk dilakukan pelimpahan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti.

Kajati Bali Idianto membenarkan pihaknya telah menahan tersangka Ketua LPD Gerokgak. "Atas perbuatan tersangka tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,264 miliar," katanya.

Sebelumnya, tim penyidik menemukan bahwa di Desa Adat Gerokgak, Buleleng, dalam kurun waktu 2008 hingga 2015 pengurus LPD melakukan pinjaman uang dengan semena-mena. Yakni para pengurus LPD mengambil uang LPD dengan cara kasbon. Dengan banyaknya kasbon, hingga terakumulasi jumlah uangnya cukup banyak. Melihat situasi itu, kasbon kemudian dialihkan oleh pengurus LPD menjadi

kredit. Jelas kredit ini tidak sesuai prosedur.

Di sinilah perbuatan melawan hukumnya, karena pengurus LPD tidak bisa mengembalikan atau membayar. Atas perhitungan BPKP Perwakilan Bali kerugiannya Rp 1,246 miliar. Dalam tahap penyelidikan, sambung jaksa, ada pengembalian sekitar Rp 860 juta. Tidak menutup kemungkinan di kasus ini ada tersangka lain. (kmb37)

Edisi : Kamis 13 Februari 2020

Hal : 2



Soal Lahan Bandara

Prajuru Desa Adat Kubutambahan Serahkan ke Pemprov dan Pemkab

Singaraja (Bali Post) -

Pembahasan lahan yang akan dibangun bandara baru di Desa/Kecamatan Kubutambahan kembali mencuat. Desa Adat Kubutambahan sebagai pemilik tanah meminta bantuan Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng untuk menyelesaikan persoalan pelik atas status pengelolaan aset tanah adat tersebut.

Keputusan itu terungkap ketika *prajuru* menggelar *paru-*

man di Pura Desa Adat Kubutambahan pada Senin (10/2) sore hingga malam lalu. *Paruman* ini tertutup dan pecalang ditugaskan berjaga-jaga di depan pintu masuk pura desa.

Rapat itu dihadiri Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG., Kepala UPT Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Aset Pemprov Bali Ketut Nayaka, Bendesa Adat Kubutambahan Jero Pasek Warkadea, dan Kadis

Perhubungan Buleleng Gunawan Adnyana Putra.

Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra mengatakan rapat ini menyamakan persepsi *prajuru* desa adat terkait rencana pembangunan bandara internasional. Terkait lahan yang disewakan oleh desa adat sejak 1991 sampai 2091 kepada PT Pinang Propertindo, Sutjidra menyebut hal itu diselesaikan oleh desa adat difasilitasi pemprov dan

pemkab. Ini berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2019, di mana pembinaan terhadap desa adat dilakukan oleh gubernur. "*Prajuru* adat sudah kompak dan tidak ada masalah, dan sehati sekata mendukung penuh rencana pembangunan bandara ini," katanya.

Sementara itu, Bendesa Adat Kubutambahan, Jero Pasek Warkadea, mengatakan terkait lahan bandara ini pihaknya menyerahkan kepada

Gubernur Wayan Koster untuk menyelesaikan. Dia berharap ganti rugi lahan untuk PT Pinang Propertindo menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "Yang jelas kami menunggu arahan dari Gubernur. Kami percaya penuh kepada Gubernur," ucapnya.

Di sisi lain, Warkadea mengatakan, *prajuru* sejauh ini belum pernah bertemu dengan PT Pinang Propertindo untuk membahas rencana pamban-

gunaan bandara ini. Ini karena menjadi ranah pemprov. "Kita tidak hak untuk menjawab sejauh mana komunikasi antara pemprov dengan PT Pinang Propertindo. Justru yang bisa menjawab itu Gubernur," jelasnya.

Sementara itu, informasi dikumpulkan di lapangan, dari 450 hektar lahan milik Desa Adat Kubutambahan yang akan dibangun bandara baru seluas 370 hektar di

antaranya telah disewakan kepada PT Pinang Propertindo. Penyewaan ini sesuai hukum adat yang sah sejak 1991. Masa sewanya juga telah diperpanjang tiga kali dan berakhir pada 2091 mendatang. Sejak disewakan, lahan itu belum digarap oleh pihak penyewa. Padahal, PT Pinang Propertindo berencana akan membangun hotel dan tempat wisata lainnya di lahan tersebut. (kmb38)



Konsultasi Aplikasi Kesehatan

Komisi IV DPRD Badung Kunker ke Diskes Kota Surabaya

MENINDAKLANJUTI rencana pembuatan aplikasi *android* di bidang kesehatan, Komisi IV DPRD Badung melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Senin (10/2) lalu. Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Ketua Komisi IV I Made Sumerta beserta anggota Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi, Nyoman Gede Wiradana, Luh Gede Sri Mediastuti, Ketut Suweni, Luh Sekarini, Made Suwardana dan I Gede Aryantha, serta juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Badung, dr. Nyoman Gunarta.

Ketua Komisi IV DPRD Badung, Made Sumerta, mengatakan pihaknya sengaja memilih kunker ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang telah memiliki aplikasi di bidang kesehatan. "Kami ingin mengetahui bagaimana sistem aplikasi kesehatan tersebut, agar bisa kami terapkan nantinya di Badung. Sejalan dengan program *smart city* yang juga diterapkan di Kabupaten Badung," ujarnya.

Sumerta menambahkan, kunjungan yang diterima Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Surabaya dr. Sri Setiani, juga sebagai ajang silaturahmi bertukar pikiran program kesehatan unggulan di Surabaya. "Apa kelebihan program kese-



KUNKER - Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Surabaya, Senin (10/2).

hatan di Surabaya supaya bisa nantinya kami contoh dan terapkan di Badung," kata Bendesa Adat Pecatu tersebut.

Nyoman Gede Wiradana yang mendampingi Sumerta menambahkan, Badung merupakan daerah pariwisata dunia yang sangat rentan tertular penyakit. Seperti misalnya penyakit yang sedang heboh dan diperbincangkan dunia, yakni Corona. "Jadi aplikasi kesehatan ini sangat penting dibuat oleh Badung. Untuk mempermudah masyarakat kita mengetahui informasi bidang kesehatan di Badung," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Pada kunker tersebut, Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan Kota Surabaya, dr. Sri Setiani menjelaskan, aplikasi kesehatan Kota Surabaya diberi nama *E-Health*. Dikatakan, *E-Health* merupakan aplikasi sistem informasi kesehatan Kota Surabaya yang bisa diakses melalui *android*. Mulai pendaftaran pasien hingga sistem rujukan *online* bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut. "Tidak hanya rumah sakit, puskesmas pun bisa diakses di aplikasi ini. Tanpa harus menunggu lama, masyarakat bisa daftar *online* dulu dan mengecek rumah sakit atau puskesmas mana yang mau mereka datang lewat aplikasi ini. Tujuannya agar tidak menumpuk di salah satu titik," terangnya. (ad285)



Cari Solusi Penanganan Banjir dan Penataan Aset di Badung

Komisi II dan III DPRD Badung Kunker ke Surabaya

SEBAGAI daerah tujuan pariwisata dunia, Kabupaten Badung kerap dilanda banjir ketika musim hujan tiba. Tak hanya itu, Badung sebagai kabupaten terkaya di Bali juga perlu melakukan penataan aset, sehingga penanganan banjir dan penataan aset di Gumi Keris tertangani dengan baik.

Guna mencari solusi atas permasalahan tersebut, wakil rakyat di DPRD Badung khususnya Komisi II dan III DPRD setempat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Surabaya, Senin (10/2) lalu. Turut hadir Ketua Komisi II I Gusti Anom Gumanti beserta anggota yakni I Nyoman Dirga Yusa, I Wayan Luwir Wiana, Ida Bagus Made Sunartha, I.B. Alit Arga Patra, I Gusti Lanang Umbara, IGA Agung Inda Trimafo Yudha, I Nyoman Karyana, I Nyoman Suka, I Made Wijaya, serta Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata, beserta anggota I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Made Suryananda Pramana, I Made Yudana, I Nyoman Graha Wicaksana, Ni Komang Tri Ani, I Gusti Ngurah Shaskara, dan I Made Retha.

Kehadiran jajaran Komisi II DPRD Badung yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta diterima Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah. Dalam kesempatan itu, Made

Sunarta mengatakan Surabaya dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengembangkan wilayahnya dari sisi infrastruktur. Untuk itu, perlu kiranya Badung belajar lebih banyak mengenai penanganan banjir di Surabaya. "Sebelum datang ke sini (Surabaya), kami sudah melihat penataan Surabaya. Lingkungannya begitu bersih, sungai tidak ada sampah, bagus tidak ada banjir. Untuk itu, tentunya kami di DPRD Badung harus banyak belajar dari Surabaya," ujarnya.

Selain itu, kata Made Sunarta, penataan aset di Surabaya juga tertata rapi tidak ada kawasan khususnya aset pemerintah yang terbengkalai. "Banyak hal yang perlu kami pelajari dari keberhasilan Surabaya menata kotanya," ucapnya.

Ketua Komisi II DPRD Badung, Gusti Anom Gumanti, dalam kesempatan itu menanyakan penataan taman dan sungai di Surabaya, sehingga terlihat rapi dan bersih. "Surabaya memiliki taman yang sudah mendunia dan banyak. Ini tentunya tidak terlepas dari kebersihan sungai, karena saya melihat banyak taman di sempadan sungai bahkan setiap sudut ada tamannya. Kalau dari segi penganggaran berapa persen dari APBD, karena taman tidak cukup hanya disiram tapi *maintenance*-nya juga," terangnya.



CENDERAMATA - Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata menyerahkan cenderamata kepada Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah dalam kunker DPRD Kabupaten Badung ke Surabaya, Senin (10/2).

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, pihaknya merasa sangat terhormat mendapat kunjungan dari jajaran DPRD Badung. "Kami merasa terhormat mendapat kunjungan dari bapak dan ibu rekan kami di DPRD Badung. Kami di Surabaya memiliki APBD mencapai Rp 10 triliun lebih," katanya.

Dikatakan, dana APBD yang dikelola difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. "Untuk program infrastruktur khususnya penanganan banjir, kami lakukan dengan menata sungai. Selain ada satgas kebersihan, kami mendorong program sosial

promotif preventif agar warga tidak membuang sampah ke sungai dengan melakukan kerja bakti. Sampah yang dihasilkan dikelola menjadi listrik," paparnya.

Kendati demikian, kata Khusnul Khotimah, pihaknya mengakui tidak mudah mengubah *mindset* masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terlebih ke sungai. "Awalnya tidak mudah mengarahkan masyarakat untuk menjaga kebersihan. Tapi ketika mereka kebanjiran, mereka merasakan lebih sulit, karena itulah mereka mau berubah," katanya seraya menyebutkan Surabaya memiliki 50 lebih taman. (ad284)



Polisi Dalami Dugaan Pungli di Pasar Payangan

Gianyar (Bali Post) -

Polres Gianyar masih mendalami kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Pasar Umum Payangan. Namun, I Kasna yang sebelumnya diamankan polisi dalam kasus ini akhirnya tidak ditahan. Sementara mantan Perbekel Melinggih menyatakan bahwa I Kasna merupakan petugas LPM Desa Melinggih yang ditugaskan melakukan pungutan berdasarkan SK pengangkatan LPM desa tersebut.

Dikonfirmasi Selasa (11/2) kemarin, Kapolres Gianyar AKBP Dewa Made Adnyana mengatakan penahanan terhadap I Kasna memang ditanggguhkan. Meskipun tidak ditahan lagi, namun polisi masih tetap melakukan pendalaman penyelidikan. "Kesampingkan dulu bicara bahasa OTT (Operasi Tangkap Tan-

gan - red). Seolah-olah orang dijustifikasi melakukan itu," katanya.

Untuk proses hukum kasus ini, kata Adnyana, polisi diberikan kesempatan 1 x 24 jam melakukan pembuktian. Polisi bertindak sesuai prosedur yang berlaku. "Kami profesional saja. Ada pendalaman yang lain yang perlu kami lakukan dalam kasus ini," jelasnya.

Sementara itu, mantan Perbekel Meling-

gih I Nyoman Surata menyatakan, Kasna bukan preman. Ditegaskan, pria yang sempat diamankan polisi itu tidak melakukan aksi pungli. "Dia ada penugasan khusus dari Bagian Badan Usaha Milik Desa. Selaku petugas pungut, ada SK-nya, cuma nomornya saya lupa. Di dokumen ada," ujar perbekel terpilih yang rencananya akan dilantik tanggal 14 Februari mendatang.

Surata menegaskan, pungutan itu sudah dimuat dalam peraturan desa. Ia menjabarkan, setelah terbit UU Nomor 6 Tahun 2014, ada penertiban mengenai sistem pengelolaan desa. "Terkait pendapatan asli desa, artinya otonomi desa. Mengacu UU itu, ada kewenangan desa mengatur dan mengurus berdasarkan hak asal-usul skala desa," jelasnya.

Sesuai Permendagri, katanya, dibentuklah BUMDes. Pedagang di senggol inilah yang masuk dalam bagian dari BUMDes sejak 2018. Ditambahkan, nama Kasna muncul berdasarkan hasil rapat bersama BPD dan

Klian. Untuk pengelolaan diserahkan ke LPM di Bagian Keamanan. Kebetulan LPM itu atas nama Wayan Mudita. Selanjutnya, Mudita diberikan kewenangan untuk merekrut pembantu dalam tugas di lapangan. "Termasuk salah satunya Kasna yang dimuat dalam SK itu. Intinya, kalau dari desa sudah serahkan ke LPM. Sesuai klausul yang dimuat," terangnya.

Surata menambahkan, per pedagang senggol dikenakan pungutan Rp 10 ribu per hari. Pungutan itu sudah berdasarkan hasil rapat bersama para pedagang. "Sesuai Perdes yang disetorkan ke desa, ada 65 persen dari pungutan. Potong biaya dan sebagainya," jelasnya.

Disinggung soal kasus bergulir, Surata menyerahkan sepenuhnya ke polisi. Namun pihaknya sudah menyiapkan data, apabila petugas kepolisian membutuhkan. "Saya sendiri tidak berani terlalu jauh. Kami serahkan ke kepolisian, karena ranah kepolisian. Berikan kepada penyidik," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kasna diamankan polisi, Sabtu (1/2) lalu. Pria berusia 40 tahun ini ditangkap saat sedang memungut pedagang di Pasar Senggol Payangan. Kasna yang tinggal di Banjar Griya, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan itu bisa mengumpulkan uang hingga jutaan rupiah. (kmb35)



AKBP Dewa Made Adnyana



Rp 35 Miliar untuk Tuntaskan Pembangunan Dermaga Cruise Tanah Ampo

Amlapura (Bali Post) -

Pembangunan proyek dermaga cruise di Tanah Ampo, Kecamatan Manggis hingga kini belum dituntaskan akibat kekurangan dana. Untuk menuntaskan pembangunan dermaga tersebut, Kantor Syahbandar Otoritas Penyeberangan (KSOP) Pelabuhan Padangbai perlu anggaran sekitar Rp 35 miliar.

Dikonfirmasi Jumat (28/2) kemarin, Kepala KSOP Pelabuhan Padangbai Ni Luh Putu Eka Suyasmin mengatakan, estimasi anggaran tersebut untuk menuntaskan dermaga cruise secara keseluruhan. Di antaranya pembangunan dermaga ponton, pengerjaan *breakwater* dengan volume sekitar 900 meter kubik, pengawasan dari supervisi dan utilitas, pengerjaan *breakwater tetraport* 5,7 ton sekitar 200 unit

dan *tetraport* 8 ton sekitar 300 unit. Volumennya kurang lebih 900 meter kubik. "Kami masih perlu dana sekitar Rp 35 miliar untuk menuntaskan dermaga cruise," ujarnya.

Terkait kekurangan dana itu, kata Eka Suyasmin, pihaknya sudah mengusulkan kekurangan ke Kementerian Perhubungan, tetapi tak di-ACC. Kendati demikian, pihaknya sangat berharap kekurangan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2021 mendatang. "Tahun ini tidak ada alokasi anggaran untuk penyelesaian dermaga. Pada tahun anggaran 2020 ini, pemerintah pusat fokus untuk pembangunan Dermaga Sanur. Semoga tahun berikutnya dianggarkan sehingga proyek segera bisa dituntaskan dan tidak mangkrak," tegasnya.

Menurut Eka Suyasmin, dermaga cruise sebenarnya sangat urgen untuk menopang perekonomian masyarakat. Makanya, warga setempat sangat mengharapkan dermaga bisa secepatnya beroperasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengerjaan Dermaga Cruise Tanah Ampo dimulai tahun 2017 lalu. Anggaran yang diberikan sekitar Rp 49 miliar lebih. Pengerjaan tahap I meliputi pemasangan tiang *jetty ramdor*, dan *breakwater*. Pengerjaan dimulai 21 Juni 2017, dan mengalami keterlambatan. Pengerjaan dilakukan dari tahun 2017 hingga 2018. Sementara untuk pengerjaan dermaga cruise tahap II dilanjutkan akhir Juni 2019 dengan anggaran sekitar Rp 28,9 miliar untuk pengerjaan *breakwater*. (kmb41)

Edisi : Substansi 29 Februari 2020

Hal : 8



Eksekutif Didesak Perbaiki Drainase di Jalan

Raya Andong

Gianyar (Bali Post) -

Hujan lebat yang menggyur wilayah Kabupaten Gianyar sejak beberapa bulan lalu sering kali memicu banjir pada sejumlah ruas jalan. Salah satu penyebabnya adalah kondisi drainase yang kecil dan rusak, seperti yang terjadi di sepanjang Jalan Raya Andong, Kecamatan Ubud. Hal ini mendapat sorotan kritis dari anggota DPRD Gianyar I Ketut Karda, Rabu (26/2) kemarin.

Karda mengatakan, banjir di sepanjang Jalan Raya Andong menjadi pemandangan rutin setiap musim hujan. Kondisi ini terjadi akibat volume air hujan yang melebihi kapasitas drainase di sepanjang jalur tersebut. "Hampir setiap hujan, di sepanjang Jalan Raya Andong air meluap," katanya.

Tidak hanya itu, kondisi trotoar yang rusak juga kerap menghambat aliran air pada drainase. Belum lagi persoalan sampah mengendap pada drainase, sehingga menyumbat aliran air saat hujan. "Terutama aliran air dari Gentong, Tegallalang, itu biasanya meluap di Jalan Raya Andong," katanya.

Seperti saat hujan lebat Selasa (25/2) lalu, volume air yang meluap di Jalan Raya Andong sampai setinggi lutut orang dewasa. Kondisi ini banyak dikeluhkan warga, khususnya pengguna jalan yang melintas. Bahkan, sejumlah pengendara motor harus menepi, karena takut dengan tingginya air yang meluap ke jalan raya.

Hal ini juga disayangkan sebab di seputaran lokasi tersebut menjadi akses lalu lintas wisatawan.

Menyikapi kondisi ini, Karda mengaku sudah berulang kali berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi Bali. Pihaknya mengajukan permohonan agar pemerintah segera merevitalisasi drainase di sepanjang jalur tersebut. "Kami mengusulkan agar drainase diperlebar dan diperdalam, sehingga saat hujan bisa menyalurkan lebih banyak air," katanya.

Saat koordinasi terakhir dengan Dinas PU Pemprov

Bali, Karda mendapat informasi bahwa perbaikan trotoar di sepanjang Jalan Raya Andong sudah dianggarkan Rp 12 miliar. "Baru tadi diinfokan. Sudah dianggarkan Rp 12 miliar untuk perbaikan trotoar sepanjang 2,5 kilometer. Saat ini masih dalam tahap lelang," katanya.

Karda berharap proses administrasi segera dilakukan, sehingga perbaikan drainase bisa secepatnya dikerjakan. "Ini harus segera dikerjakan, karena banjir setiap hujan di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama," tegasnya. (kmb35)



Eks Ketua LPD Gerokgak Disidang

★ Tilep Dana Nasabah Rp 1,3 Miliar

DENPASAR, NusaBali

Mantan Ketua LPD Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Komang Agus Putrajaya, 35, yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Rp 1,3 miliar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (25/2).

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) AA Gede Lee Wisnu Diputera menyatakan terdakwa diduga menilep uang nasabah bersama pengurus dan karyawan LPD untuk kepentingan pribadi. "Terdakwa bersama pengurus dan karyawan menggunakan uang nasabah untuk kepentingan pribadi. Caranya, mereka melakukan kas bon di kasir. Kemudian kas bon dicatat dalam buku khusus yang dipegang secara bergantian oleh saksi Nyoman Milik dan saksi Dayu Ketut Masmuni," jelas JPU dalam dakwaan.

Lalu pada 2015, jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Hari Raya Idul Fitri dan penerimaan siswa baru, terjadi penarikan tabungan, deposito secara besar-besaran. Namun nasabah tidak bisa menarik tabungannya atau depositonya, karena saat itu kas LPD kosong. Hingga akhirnya Lembaga



• NUSABALI/REZA

TERDAKWA Komang Agus saat konsultasi dengan penasehat hukumnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (25/2).

Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) Buleleng melakukan pengawasan dan pembinaan kepada LPD Gerokgak ditemukan selisih antara aktiva dan pasiva sebesar Rp 1.416.236.334.

Perbuatan tersebut telah memperkaya diri pribadi terdakwa, para pengurus dan para karyawan. Rinciannya, terdakwa Rp 548 juta, saksi Made Sudarma Rp 116 juta, saksi Dayu Ketut Masmuni Rp

76.550.000, saksi Nyoman Milik Rp 230.529.000, dan (Alm) Gede Gelgel Rp 154.145.000.

"Perbuatan terdakwa Komang Agus Putrajaya bersama dengan pengurus dan karyawan telah mengakibatkan kerugian negara cq LPD Desa Pekraman Gerokgak sebesar Rp 1.264.686.000. Ini berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali," papar jaksa Wisnu Diputera. **rez**



127 Desa Ajukan Amprah Dana APBDes

SINGARAJA, NusaBali.

127 desa dari 129 desa di Kabupaten Buleleng telah mengajukan amprahan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Amprahan dana tersebut potensial cair Senin pekan depan. Saat ini dokumen pengamprahan masih dalam proses verifikasi.

Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Selasa (25/2), dari 129 desa di Buleleng, tinggal dua desa yang belum mengajukan amprahan. Dua desa itu yakni Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt dan Desa Puncak Sari, Kecamatan Busungbiu. Kini seluruh dokumen amprahan dari 127 desa yang masuk ke Dinas PMD, masih dalam verifikasi, sebelum diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). "Masih kami verifikasi semuanya. Biar tidak bolak balik, memang ada kesalahan sedikit soal konsidran saja," terang Kepala Dinas PMD Buleleng Made Subur,

melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) I Gusti Ngurah Putu Mastika, dikonfirmasi kemarin.

Menurut Mastika, bila seluruh dokumen amprahan sudah sesuai ketentuan, maka dokumen amprahan tersebut diajukan ke BPKPD. Nanti, BPKPD akan mencairkan lewat dana transfer langsung ke rekening masing-masing desa. Diperkirakan, pencairan nanti mulai Senin pekan depan. "Sambil menunggu desa-desa yang belum, dokumen amprahan yang masuk kami verifikasi. Nanti biar sekalian kami ajukan ke BPKPD," katanya.

Dijelaskan, ADD salah satu sumber dana APBDes, disamping Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Untuk ADD, proses pengamprahannya dilakukan setiap bulan dengan jumlah telah ditentukan sesuai perhitungan dalam setahun. Kemudian DD, pencairan dilakukan dalam tiga tahap, dimana tahap pertama sebesar 20

persen paling cepat di bulan Januari, dan tahap berikutnya masing-masing 40 persen dari total DD yang diterima oleh masing-masing desa. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dicarikan dalam 3 bulan sekali. "Kami di PMD hanya memfasilitasi dalam artian memverifikasi amprahan. Kalau semuanya lengkap, untuk ADD kami ajukan ke Bendahara Keuangan Pemkab, sedangkan DD, aprahannya kami ajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)," jelas Gusti Ngurah Mastika.

Mastika mengakui, sumber gaji dari Perbekel dan Perangkat Desa (Kaur, Sekdes dan Kadus) berasal dari ADD. Besaran gaji Perbekel dan Perangkat Desa, masing-masing desa bisa berbeda, tergantung dari jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa. Gaji perangkat desa saat ini, minimal sebesar Rp 2.050.000 per bulan. Sedangkan gaji Perbekel diatas perangkat desa. **k19**



Terkait Viralnya Tarif Parkir Membengkak ✓

PD Parkir Sidak Parkir RSUP Sanglah

Perparkiran di RSUP Sanglah pengelolaannya dilakukan oleh pihak rumah sakit bekerjasama dengan perusahaan HZL.

DENPASAR, NusaBali

Pasca viralnya biaya parkir membengkak yang diposting oleh pemilik akun Facebook Nova Prasetya, Sabtu (22/2), PD Parkir Kota Denpasar langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap rekanan dan petugas parkir ke RSUP

Sanglah, Senin (24/2). Sidak ini sekaligus untuk memastikan proses terjadinya kenaikan tarif parkir yang dialami pengunjung rumah sakit tersebut.

Kasi Pelaporan dan Pengaduan PD Parkir Kota Denpasar, Desak Made Ekaprastyawati saat dikonfirmasi, kemarin, mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan tindak lanjut ke lapangan terkait dengan membengkaknya biaya parkir yang dialami salah satu pengunjung RSUP Sanglah. Dengan melakukan cross check langsung ke RSUP Sanglah dan bertemu langsung pihak pengelola dalam hal ini dengan Ahmad Rafif Ridwan selaku supervisor dari perusahaan HZL.

Dari tindak lanjut lapangan tersebut, Desak mengatakan, PD

Parkir memperoleh keterangan bahwa kejadian tersebut karena kesalahan dari petugas parkir yang bertugas saat itu yang bernama Yosevina Dava Unga. Dimana petugas tersebut saat menerima karcis parkir dari pelapor sebelum menginjak ke sistem dengan perkiraan sendiri mengatakan kepada konsumen kalau untuk parkir dikenakan total Rp 80.000. Padahal ketika diinput dalam sistem tarif yang tertera hanya Rp. 60.000.

Kata Desak, saat menerima protes dari konsumen petugas parkir tersebut langsung memohon maaf dan memberikan bukti berupa foto layar komputer yang berisikan jumlah yang harus dibayar sebesar Rp 60.000. "Setelah cross check bukti berupa foto

layar komputer yang berisikan tarif parkir yang harus dibayar diberikan kepada pengunjung rumah sakit, karena kebetulan saat itu alat print bukti pembayaran parkir di pintu keluar sedang rusak," kata Desak.

Terkait tindakan dari petugas parkir tersebut, petugas yang bersangkutan telah diberikan Surat Peringatan (SP). Untuk kedepannya, kata Desak, kinerja dari petugas parkir akan terus dievaluasi dan pihaknya akan meningkatkan pengawasan kepada rekanan yang bekerja.

"Pengawasan juga akan ditingkatkan. Selain itu untuk kedepannya diimbau bagi masyarakat pengguna jasa parkir, untuk lebih memperhatikan biaya parkir yang tertera pada karcis parkir dan membayar sesuai dengan tarif

yang tertera. Apabila ada petugas yang meminta tarif lebih dari yang tertera di karcis, bisa langsung melaporkan ke pihak HZL atau langsung ke PD Parkir Kota Denpasar akan langsung ditindak tegas," jelasnya.

Desak menegaskan lagi bahwa untuk perparkiran di RSUP Sanglah pengelolaan dilakukan oleh pihak rumah sakit setempat bekerjasama dengan pihak HZL. "Itu dikelola oleh RSUP Sanglah bekerjasama dengan perusahaan HZL, tetapi karena kita bertanggungjawab atas pengawasan penyelenggaraan perparkiran di RSUP Sanglah dan mereka juga bekerjasama dengan kami maka mereka harus kami awasi terus," tegas Desak yang juga mantan wartawan ini. [mis, ind](mailto:mis@ind)



Pemkab Akan Tuntaskan Fasilitas di SMAN 2 Abiansemal Tahun Ini

MANGUPURA, NusaBali

Pembangunan SMAN 2 Abiansemal di Banjar Aseman, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, sudah selesai dan mulai ditempati. Namun, sejumlah fasilitas pendukung di sekolah tersebut belum lengkap. Pemkab Badung menjanjikan bakal melengkapi fasilitas di sekolah tersebut pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat berkunjung ke SMAN 2 Abiansemal, Senin (24/2). Bupati didampingi anggota DPRD Provinsi Bali I Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD Badung I Made Sumerta, I Nyoman Dirgayusa, dan Ni Luh Putu Sekarini, Kadisdikpora Provinsi Bali Drs Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Kadisdikpora Badung I Ketut Widia Astika, Camat Abiansemal IB Putu Mas Arimbawa, serta Tripika Kecamatan Abiansemal.

Bupati Giri Prasta menekankan, pembangunan di bidang pendidikan sudah menjadi salah satu program prioritas. "Dari awal kami sudah mendata jumlah TK/PAUD dan SD di Badung, termasuk jumlah siswa dan sarana dan prasarannya. Sehingga diketahui berapa dibutuhkan sekolah di Badung," ujarnya.

"Pembangunan SMAN 2 Abiansemal merupakan langkah konkret yang telah diwujudkan di 2019 dengan anggaran APBD Badung sebesar Rp 57,8 miliar, karena sebelumnya di Badung kekurangan SMA (negeri, Red)," imbuh Bupati Giri Prasta.

Kendati saat ini bangunan SMAN 2 Abiansemal berdiri megah dan berlantai tiga, namun sarana prasa-



BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta mengunjungi SMAN 2 Abiansemal, Senin (24/2).

rana pendukung belum lengkap seperti laboratorium, perpustakaan, dan lainnya. Mengenai kekurangan fasilitas pendukung ini, Bupati Giri Prasta menegaskan akan diselesaikan pada tahun 2020 ini. "Saya pastikan laboratorium, perpustakaan, dan penataan sekolah digarap tahun ini dengan anggaran Rp 14 miliar," tegas Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini.

Sementara, terkait usulan sekolah agar diwujudkan jalan tembus Sedang-Sibangkaja, karena saat ini akses masuk sekolah melewati perumahan, mendapat apresiasi dan Bupati Giri Prasta. Dia sangat mendukung pembangunan jalan tersebut. "Terkait jalan tembus di Sibangkaja, kami minta agar dikoordinasikan dengan masyarakat. Kalaupun nanti ada tanah masyarakat yang harus dibeli kami juga siap membeli, namun dengan satu catatan pembebasan

lahan dilakukan oleh tim appraisal."

Kepala Sekolah SMAN 2 Abiansemal I Made Kupasada menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Badung beserta anggota DPRD Provinsi Bali dan DPRD Badung serta dinas terkait ke SMAN 2 Abiansemal. Pihaknya juga berterima kasih atas terbangunnya sekolah SMA negeri di Desa Sedang ini. "Saat ini baru terisi 13 kelas dengan jumlah siswa 443 orang. Rencananya di 2020 akan menerima siswa sebanyak 11 kelas. Pembangunan lanjutan berupa laboratorium, perpustakaan sekolah, kantin, dan penataan halaman," tuturnya.

Ketua Komite SMAN 2 Abiansemal I Wayan Sudiarta juga merasa bangga dan sebuah kehormatan atas kehadiran Bupati beserta jajaran yang akan memberi angin segar untuk kemajuan SMAN 2 Abiansemal. **asa**



Gelapkan Pajak, Kakek 61 Tahun Disidang

DENPASAR, NusaBali

Seorang kakek, Sugianto, 61, hanya bisa pasrah menjalani sidang perdana di PN Denpasar, Senin (24/2) dalam kasus penggelapan pajak senilai Rp 153 juta. Akibat perbuatannya, kakek ini terancam pidana penjara selama 6 tahun.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Kadek Wahyudi Ardika disebutkan, Sugianto merupakan Direktur Utama PT Wahyu Alwijaya bergerak di bidang jasa pemasangan instalasi listrik, mekanik, dan furniture. Sejak Januari 2016 - Desember 2016, terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan dan tidak melaporkan keterangan dengan benar pemotongan pajak yang telah dipungut. "Padahal terdakwa memungut pajak penghasilan negara (PPN)

sebesar 10 persen dari konsumennya," jelas JPU.

Selain tidak melaporkan PPN yang dipungutnya,

Terdakwa juga membuat laporan PPN tidak benar. Pada April 2016 dan November 2016 terdakwa membuat laporan nihil. Faktanya, pada waktu tersebut, terdakwa menerima pembayaran dari rekanan terdakwa. Dalam waktu tersebut terdakwa memungut PPN sebesar Rp 51,7 juta. "Total PPN yang dipungut terdakwa tapi tidak disetorkan terdakwa ke kas negara sebesar Rp 153,2 juta," beber JPU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 31 huruf c, d, dan i, UU Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdakwa terancam pidana penjara maksimal enam tahun. **rez**



Sengketa Lahan Kantor Desa Pengelatan Ganti Rugi Pemkab Ditolak Penggugat

SINGARAJA, NusaBali

Sengketa lahan Kantor Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng, sempat dimediasi oleh Pemkab Buleleng. Namun, keluarga Nengah Konyan selaku penggugat menolak solusi ganti rugi yang ditawarkan Pemkab. Hal itu disampaikan oleh Asisten Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng, Putu Karuna yang dikonfirmasi, Senin (24/2) usai pelantikan Dirut PD Pasar.

Dikatakan, upaya mediasi dengan menghadirkan pihak terkait dalam waktu berbeda, dilakukan ketika sengketa itu masuk ranah hukum. Dalam

mediasi itu, Pemkab sempat menawarkan ganti rugi kepada penggugat. Namun, solusi ganti rugi yang ditawarkan tidak diterima oleh penggugat. Penggugat, kata Karuna, menyerahkan pada proses hukum. "Sengketa itu sudah pernah kami mediasi, maunya kami ganti rugi lahan itu, setelah itu kami hibahkan lahan itu pada desa. Tetapi saat itu pihak penggugat menyatakan menyerahkan pada proses hukum," kata Karuna.

Menurut Karuna, Pemkab Buleleng dalam posisi sengketa lahan Kantor Desa Pengelatan hanya sebatas mediator. Karena sengketa itu persoalan internal di desa antara pemilik lahan dengan pihak desa. "Ya gimana lagi, kami ini hanya fasilitator saja, kalau itu dieksekusi, sekarang tinggal pihak desa mencari solusi yang terbaik.

Tentu kami juga tidak bisa lepas tangan," ujarnya.

Sengketa lahan Kantor Desa Pengelatan berawal dari munculnya gugatan dari keluarga Nengah Koyan ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, Februari 2017. Nengah Koyan mengklaim lahan kantor desa yang berlokasi di Banjar Dinas Kajan, adalah lahan hak miliknya, sesuai bukti kepemilikan sertifikat No 113 yang terbit tahun 1982. Dalam sertifikat itu, luas tanah milik Nengah Koyan keseluruhan tercatat 19 are, namun sekitar 3 are dimanfaatkan sebagai areal Kantor Desa Pengelatan.

Atas penguasaan lahan itu, keluarga Nengah Koyan menggugat para pihak mulai dari Kepala Desa Pengelatan, Camat Buleleng, Bupati Buleleng, Gubernur Bali hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Nilai gugatan diajukan sebesar Rp 1.670.000.000.

Dalam sengketa itu, keluarga Nengah Koyan selaku penggugat menang di tingkat PN Singaraja hingga proses hukum berlanjut ke tingkat MA. Kemudian pihak desa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan melampirkan bukti-bukti baru. Ternyata PK yang diajukan pihak desa ditolak oleh MA. Salinan putusan MA atas PK tersebut sudah terbit sekitar November 2019 lalu. Itu berarti, lahan Kantor Desa Pengelatan sah secara hukum milik dari keluarga Nengah Koyan. **k19**



Pamedek mesti hati-hati melintasi anak tangga di Pura Sad Kahyangan Lempuyang karena banyak yang jebol dan licin.

• IST

Anak Tangga Pura Lempuyang Rusak

AMLAPURA, NusaBali

Anak tangga di Pura Sad Kahyangan Lempuyang, Desa Adat Purwayu, Desa Tri Buana, Kecamatan Abang, Karangasem sejak dibangun tahun 1990 belum pernah diperbaiki. Terutama tangga dari Pura Telaga Mas hingga Pura Pasar Agung di Bukit Bisbis. Perbaikan kerusakan anak tangga ditaksir mencapai Rp 7 miliar.

Ketua Panitia Pembangunan Pura Sad Kahyangan Lempuyang I Wayan Putu Aryawan mengatakan, biaya paling mahal adalah untuk angkut material karena mesti jalan kaki naik tangga. Misal harga per satu sak semen Rp 55.000, ongkos angkutnya Rp 25.000. Begitu juga ongkos angkut pasir, satu truk yang harganya Rp 1,2 juta tambah ongkos angkut Rp 1,2 juta. Syukurnya dari Pura Telaga Mas hingga Pura Pasar Agung dengan mudah dapatkan air sehingga tidak perlu lagi mengangkut air ke atas. "Kami masih berjuang ke Provinsi Bali, mengajukan proposal kepada Gubernur Bali agar dapat perhatian khusus biaya perbaikan anak tangga," ungkap Wayan Putu Aryawan.

Dikatakan, anak tangga dibangun di zaman Gubernur Bali Ida Bagus Oka tahun 1990. Semula berupa jalan tanah yang licin. Selanjutnya dibangun ratusan anak tangga lengkap dengan pegangan.

Sejak beberapa tahun terakhir, anak tangga mulai keropos, jebol, dan sulit dilalui di beberapa titik. Para pamedek diimbau berhati-hati karena di sejumlah titik terutama di jalur tanjakan dari Pura Telaga Mas menuju Pura Pasar Agung hingga Pura Pucak Luhur banyak yang jebol. Apalagi di sepanjang jalur tanpa lampu penerangan jalan.

Terakhir Pemprov Bali menanggarkan untuk pembangunan di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Rp 7 miliar tahun 2019 jelang Karya Panca Walikrama. Dana itu digunakan untuk membangun bale gong dan bangunan pelengkap lainnya di jaba Pura Penataran Sad Kahyangan Lempuyang. Ketua I Panitia Pembangunan I Nyoman Jati juga berharap Pemprov Bali membantu anggaran perbaikan anak tangga sehingga umat yang melakukan persembahyangan tidak menemui kendala. "Apalagi musim hujan, jalan menuju Pura Pasar Agung dan Pura Pucak Luhur juga licin," katanya.

Nyoman Jati mengatakan, jelang puncak Pilkada Bupati/Walikota, banyak kandidat melakukan persembahyangan di malam hari. "Mesti berhati-hati karena banyak anak tangga rusak dan licin. Belum ada lampu penerangan jalan sepanjang jalur di Bukit Bisbis," katanya didampingi Sekretaris I Wayan Santa. **k16**



Kantor Desa Pengelatan Bakal Dieksekusi

★ Sengketa Lahan, Pihak Desa Kalah Secara Hukum

Segala upaya hukum sudah dilakukan, kini pembahasan mencari solusi terbaik akan dilakukan selepas Hari Raya Kuningan.

SINGARAJA, NusaBali

Warga Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng, kini terancam tidak memiliki kantor desa. Karena upaya Peninjauan Kembali (PK), dalam sengketa lahan kantor desa ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Sengketa lahan Kantor Desa Pengelatan berawal dari munculnya gugatan dari keluarga Nengah Koyan ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja pada Februari 2017. Nengah Koyan mengklaim lahan kantor desa yang berlokasi di Banjar Dinas Kajanan, adalah lahan hak miliknya, sesuai bukti kepemilikan sertifikat No 113 yang terbit tahun 1982. Dalam sertifikat itu, luas tanah milik Nengah

Koyan keseluruhan tercatat 19 are, namun sekitar 3 are dimanfaatkan sebagai areal Kantor Desa Pengelatan.

Atas penguasaan lahan itu, keluarga Nengah Koyan menggugat para pihak, mulai dari Kepala Desa Pengelatan, Camat Buleleng, Bupati Buleleng, Gubernur Bali hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Nilai gugatan diajukan sebesar Rp 1.670.000.000. Dalam sengketa itu, keluarga Nengah Koyan selaku penggugat menang di tingkat PN Singaraja hingga proses hukum berlanjut ke tingkat MA. Kemudian pihak desa mengajukan PK dengan melampirkan bukti-bukti baru. Informasinya, ternyata PK yang diajukan pihak desa ditolak oleh MA. Salinan putusan MA atas PK tersebut sudah terbit bulan November 2019 lalu.

Perbekel Pengelatan, Nyoman Budarsa dikonfirmasi Minggu (23/2) membenarkan bila upaya hukum yang ditempuh melalui PK tidak membuahkan hasil. Namun, pihaknya bersama para tokoh masyarakat tetap berusaha mencari jalan keluar yang terbaik demi kepentingan masyarakat luas. "Mungkin desa kami nasibnya belum

beruntung, mudah-mudahan nanti ada jalan keluar, karena kami sudah berkoordinasi dengan para tokoh termasuk dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten," katanya.

Perbekel dua periode ini menegaskan, pihak desa tetap merasa tidak mendapat keadilan dalam sengketa tersebut. Karena pensertifikatan lahan kantor desa dilakukan setelah kantor desa berdiri cukup lama. Karena itu, persoalan tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten. "Kami sebagai warga tetap menghormati putusan hakim, tetapi kami tetap merasa tidak mendapat keadilan, karena lahan itu sebelum disertifikatkan di tahun 1982, sedangkan di lahan itu sudah berdiri kantor desa sejak tahun 1966," terang Budarsa.

Sementara, Camat Buleleng, Gede Dody Sukma Aktiva Askara dikonfirmasi terpisah mengaku sudah membahas persoalan sengketa lahan Kantor Desa Pengelatan. Rencananya, pembahasan akan dilanjutkan di Pemkab Buleleng. "Setelah Hari Raya Kuningan ini, akan ada pembahasan lanjutan di Pemkab Buleleng," katanya singkat. **k19**



Heboh Biaya Parkir di RSUP Sanglah

★ Pengelola Parkir Tegur Pegawainya

DENPASAR, NusaBali

Jagat maya di Bali tiba-tiba heboh dengan video dugaan penaikan tarif parkir di RSUP Sanglah oleh petugas parkir rumah sakit tersebut. Ini setelah postingan akun Nova Prasteya menjadi viral direpost akun informasi @denpasar.viral, Minggu (23/2).

Adapun postingan tersebut berbunyi "Bapak saya telah ditipu oleh petugas parkir yang berada di RSUP Sanglah. Singkat cerita bapak saya sudah mengira-ngira berapa bakalan bayar karena +6 hari yang palingan 60 ribu, dan ternyata disuruh bayar 80 ribu oleh petugas, merasa ditipu bapak saya pun langsung menyuruh petugas untuk memfoto bukti dari layar dan hasilnya 60 ribu, buktinya ada di foto bawah serta petugas yang menjaga pas hari itu," tulis akun Nova Prasetya.

Kasubbag Humas RSUP Sanglah, Dewa Ketut Kresna mengaku telah mengonfirmasi kepada pihak HZL selaku pengelola parkir di RSUP Sanglah terkait hal tersebut. Pengelola pun membenarkan kejadian tersebut dan oknum pegawai tersebut telah dipanggil dan diberikan Surat Peringatan (SP). "Kami sudah hubungi pengelola parkir di RSUP Sanglah kami memang kerjasama dengan PT HZL,"

ujarnya dikonfirmasi per telepon, Minggu (23/2) malam.

Menurut cerita versi oknum pegawai PT HZL, kata Dewa Kresna, awal permasalahannya adalah ketika pengunjung tersebut menyerahkan struk parkir. Saat diserahkan, struk parkir tersebut dalam keadaan sedikit rusak, sehingga tidak terbaca oleh sistem. Permasalahan ini kemudian diselesaikan dengan menghitung manual dengan perhitungan sesuai yang disesuaikan dengan sistem.

Versi oknum pegawai PT HZL, dirinya ternyata salah melihat angka. Sehingga biaya yang seharusnya Rp 60 ribu disebut menjadi Rp 80 ribu. Di situlah mulai terjadi kekeliruan yang akhirnya pengunjung minta difotokan hasil penghitungan manual tersebut. Menyadari teguran pengunjung, oknum pegawai tersebut langsung meralat biaya yang harus dibayar oleh pemarkir sepeda motor itu. "Menurut informasi, yang memfoto bukti biaya yang harus dibayar itu pegawai parkirnya sendiri. Terjadi kekeliruan menyebut jumlah. Dari pihak pengelola parkir sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Kami juga nanti akan melihat proses selanjutnya dan tindakan apa yang semestinya dilakukan agar tidak terulang," tandas Dewa Kresna. ind



Pembangunan Taman Delta 'Terhenti'

MANGUPURA, NusaBali

Proyek Taman Delta di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, yang dikerjakan pada Desember 2019 terhenti sementara. Padahal, taman untuk mempercantik aliran sungai ini sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Badung.

Berdasarkan pantauan di lapangan tak ada satu pun pekerja yang beraktivitas. Namun Pemerintah Kabupaten Badung membantah bila pembangunan Taman Delta terhenti. Justru, pembangunan tahap dua tengah dirancang tahun ini.

"Iya, akan dilanjutkan tahun ini (pembangunan Taman Delta, *Red*)," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung IB Surya Suamba, saat dikonfirmasi, Minggu (23/2).

Sayangnya, Surya Suamba

mengaku tak membawa data terkait pembangunan lanjutan Taman Delta dimaksud. Sebab, seluruh data tersimpan di kantor Dinas PUPR Badung. "Seperti apa jadinya cari data ke kantor ya," ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pembangunan Taman Delta di Desa Dalung, ada dua tahap. Pada tahap pertama ini pembangunan khusus untuk dinding penahan tanah (DPT) di bagian hilir yang nanti akan dijadikan lokasi pembangunan patung. Pembangunan tahap pertama dianggarkan sekitar Rp 2 miliar.

Kemudian, untuk pembangunan tahap dua akan dilanjutkan pada tahun ini. Pembangunan tahap dua khusus membangun patung. Seperti perencanaan awal, patung yang akan dibangun adalah Patung Dewi Gangga. Sekaligus akan diban-



• NUSABALI/ARI SISWANTO

PROYEK Taman Delta di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara 'terhenti', tidak ada aktivitas di lokasi pembangunan, Minggu (23/2).

gun halaman dan gazebo, serta pengerjaan DPT di bagian hulu. Diperkirakan anggaran menghabiskan Rp 5 miliar.

Pembangunan Taman Delta murni merupakan aspirasi dari masyarakat Desa Dalung.

Taman ini mengusung konsep seperti taman kota, seperti usulan masyarakat. Dengan demikian, Taman Delta bisa menjadi tempat wisata alternatif bagi masyarakat setempat. **asa**



Perusahaan Tak Bayar Sesuai UMK 2020

Disperinaker Badung Ancam Jatuhkan Sanksi

Pekerja yang merasa tidak digaji sesuai UMK diimbau segera melapor ke Disperinaker supaya bisa ditindaklanjuti.

MANGUPURA, NusaBali

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung terus memantau penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung tahun 2020 sebesar Rp2.930.092 per bulan. Hal ini dilakukan agar kalangan pengusaha di Gumi Keris menaati ketentuan yang berlaku. Dari catatan Disperinaker, belum ada satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan.

"Catatan kami belum ada perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan penerapan UMK. Makanya kami beranggapan semua perusahaan tersebut telah sanggup menggaji sesuai UMK," kata Kepala Disperinaker Badung IB Oka Dirga, Jumat

(21/2) kemarin.

Apabila dalam prakteknya ada perusahaan tidak memberikan upah karyawannya sesuai besaran UMK yang telah disepakati Dewan Pengupahan dan telah ditetapkan oleh Gubernur Bali, maka Disperinaker mengancam akan mengenakan sanksi tegas. Baik sanksi pidana maupun denda sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Oka Dirga menjelaskan, sesuai dengan ketentuan yang mengatur UMK, Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah upah minimum sebagaimana ditetapkan pemer-

intah dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). "Kalau perusahaan tidak melaksanakan UMK, maka sanksinya tegas," kata Oka Dirga.

Mantan Kabag Umum Setda Badung inipun mengimbau kepada pekerja yang merasa tidak digaji sesuai UMK agar segera melapor ke Disperinaker supaya bisa ditindaklanjuti. "Kalau tidak digaji UMK, bisa kok pekerja langsung melaporkan ke kami. Kami akan tindaklanjuti. Tentu ada prosedurnya, kami berikan pembinaan dulu, kalau bandel terpaksa kami kenakan sanksi," paparnya.

Disinggung penerapan UMS tahun 2020 yang disepakati sebesar Rp 3.076.597,27, Oka Dirga juga memastikan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. "Sampai saat ini tidak ada laporan keberatan, jadi semua bisa. Sejak awal kami sudah sosialisasikan kepada stakeholder pariwisata, khusus hotel bintang 3, 4 dan 5 yang wajib menerapkan UMS ini," tukasnya. **asa**



Audit BPK: Pemkab Harus Bayar Utang Rp 94,5 Juta

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng, akhirnya harus pasrah melunasi utang kepada UD Serba Jaya, sebesar Rp 94.479.750, dan membayar bunga sebesar 6 persen per tahun selama 6 tahun. Karena hasil audit BPK RI, sebagai perjuangan terakhir, mewajibkan Pemkab Buleleng melunasi seluruh utang tersebut.

Sekadar dicatat, kasus utang piutang ini muncul berawal dari adanya tagihan pembelian berbagai keperluan kantor yang disetorkan oleh UD Serba Jaya, senilai ratusan juta lebih. Tagihan itu muncul dari pembelian secara bon oleh Pemkab Buleleng sejak tahun 2008-2012.

Dari tagihan itu, sebesar Rp 94.479.750, tidak diakui

oleh Pemkab Buleleng, karena pembelian secara bon itu tidak tercatat dalam pembukuan. Kemudian, pemilik UD Serbajaya, Ketut Suryata Tanaya berusaha menaggih secara persuasif. Lantaran mentok, pemilik usaha kemudian mengajukan gugatan dengan nomor registrasi 360/Pdt.G/2014/PN SGR.

Dalam gugatannya, pemilik meminta agar pemerintah membayar pokok utang berikut denda sebesar 6 persen per tahun sejak gugatan didaftarkan. Nah, dalam proses hukum tersebut, Pemkab dinyatakan kalah. Proses hukum itu berlanjut hingga kasasi di tingkat MA, dimana Pemkab tetap dinyatakan bersalah. Pemkab sendiri menempuh upaya peninjauan kembali (PK) atas

kasus tersebut. Namun upaya itu gugur karena PK yang diajukan ditolak.

Meski kalah dalam proses hukum, Pemkab belum berani membayar hutang tersebut. Pemkab masih menunggu hasil audit BPK RI. Informasinya, hasil audit BPK RI telah turun dan mewajibkan Pemkab Buleleng melunasi utang tersebut, dengan membuat rekening pembayaran utang dalam APBD dengan acuan keputusan pengadilan yang memproses sengketa utang piutang dengan pihak ketiga.

Kabarnya, menyusul keputusan tersebut, Pemkab Buleleng kini menempuh upaya negosiasi dengan pemilik UD Serbajaya. "Ya, kami masih upayakan nego bagaimana

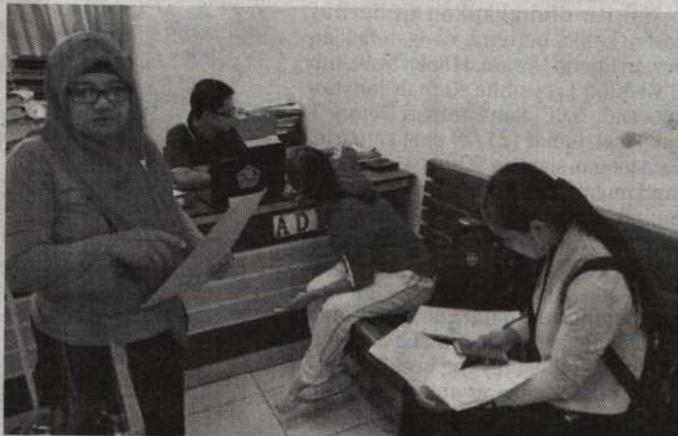
bunganya bisa di bawah itu. Rencananya Senin kita undang untuk membahas hal itu," kata Asisten Bidang Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng, Putu Karuna, saat dikonfirmasi Jumat (21/2).

Rencananya, pembayaran utang akan dilakukan tahun 2020 ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Buleleng tahun 2020. Namun untuk besaran anggaran yang disiapkan masih menunggu hasil negosiasi. "Kita kan menghitung dulu sesuai hasil pertemuan itu kita anggarkan di perubahan. Mudah-mudahan Pemkab punya anggaran tapi kita sebagai Pemerintah berupaya, karena itu putusan harus kita bayar," tegas Karuna. **k19**



Hore, Dana APBDes Sudah Bisa Diamprah

Sempat dikeluhi lantaran perbekel dan aparat desa menyambut Galungan belum dapat gaji, kini alokasi dana desa sudah bisa dicairkan.



• NUSABALI/SUDIRTA

SINGARAJA, NusaBali

Perbekel dan Aparat Desa, kini bisa bernafas lega. Sumber gaji mereka dari Alokasi Dana Desa (ADD) berupa penghasilan tetap (Siltap) sudah bisa diamprah. Kepastian itu setelah Peraturan Bupati (Perbup) tentang 'Tata Cara Pengalokasian Dana Transfer Desa' telah terbit.

Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Jumat (21/2) siang mencatat, sudah ada 21 desa yang mengamprah ADD, rinciannya, 2 desa dari Kecamatan Gerokgak, 1 desa dari Kecamatan Seririt, 2 Desa di Kecamatan Busungbiu, 1 Desa dari Kecamatan Banjar, 1 Desa dari Kecamatan Sukasada, 4 Desa dari Kecamatan Buleleng, 5 Desa dari Kecamatan Sawan, 3 Desa dari Kecamatan Kubutambahan dan 2 Desa dari Kecamatan Tejakula.

Amprahan masing-masing desa itu, oleh Dinas PMD diverifikasi untuk selanjutnya diteruskan ke Bendahara Keuangan Pemkab Buleleng, untuk ditransfer ke rekening masing-masing desa. "Sekarang kami masih verifikasi, kalau sudah lengkap semua, langsung kami ajukan ke Bendahara Keuangan, agar dananya ditransfer ke rekening masing-masing desa yang mengajukan amprahan. Paling tidak Senin pekan depan sudah masuk ke rekening masing-masing desa,"

APARAT Desa terlihat mulai mengajukan aprahan Alokasi Dana Desa (ADD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Jumat (21/2).

terang Kepala Dinas PMD, I Made Subur melalui Kabid Pemerintahan Desa, I Gusti Ngurah Putu Mastika, saat dikonfirmasi kemarin.

Gusti Ngurah Mastika mengatakan, Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Transfer Desa telah terbit, Senin (17/2) lalu. Namun karena terbentur libur Hari Raya Galungan, membuat proses pengamprahan ADD baru bisa dilakukan. "Syarat pencairan dan transfer itu, salah satu memang ada Perbup. Kemarin karena ada hari libur Galungan, jadi prosesnya baru sekarang bisa dilakukan," katanya.

Dijelaskan, ADD salah satu sumber dana APBDes, di samping Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Untuk ADD, proses pengamprahannya dilakukan setiap bulan dengan jumlah telah ditentukan sesuai perhitungan dalam setahun. Kemudian DD, pencairan dilakukan dalam tiga tahap, dimana tahap pertama sebesar 20 persen paling cepat di bulan Januari, dan tahap berikutnya masing-masing 40 persen dari total DD yang diterima oleh masing-masing desa.

Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dicarikan dalam 3 bulan sekali. "Kami di PMD hanya memfasilitasi dalam artian memverifikasi amprahan. Kalau semuanya lengkap, untuk ADD kami ajukan ke Bendahara Keuangan Pemkab, sedangkan DD, aprahannya kami ajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)," jelas Gusti Ngurah Mastika.

Mastika mengakui, sumber gaji dari Perbekel dan Perangkat Desa (Kaur, Sekdes dan Kadus) berasal dari ADD. Besaran gaji perbekel dan Perangkat Desa, masing-masing desa bisa berbeda, tergantung dari jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa. Gaji perangkat desa saat ini, minimal sebesar Rp 2.050.000 per bulan. Sedangkan gaji Perbekel di atas perangkat desa.

Sebelumnya, Perbekel dan Perangkat Desa tidak bisa mencairkan gaji mereka karena ADD belum ditransfer. Ternyata lambatnya transfer ADD tersebut karena Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Transfer Desa belum terbit, akibat proses yang lambat di Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng. **k19**



PDAM Tirta Mangutama Ajukan Penyertaan Modal Rp 660 Miliar

MANGUPURA, NusaBali

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Mangutama, mengajukan penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Badung senilai Rp 660 miliar. Modal yang besar dibutuhkan oleh perusahaan plat merah tersebut untuk perbaikan jaringan distribusi air ke pelanggan, sehingga pelayanan lebih maksimal.

Pengajuan penyertaan modal ini pun sudah masuk ke DPRD Badung. Namun, pembahasannya ditunda, sebab belum ada kajian investasi serta naskah akademik dari akademisi.

Dirut PDAM Tirta Mangutama, I Ketut Golak, mengakui telah mengajukan penyertaan modal sekitar Rp 660 miliar. Meski begitu, kata dia, ini baru sebatas usulan dan belum final. "Baru sebatas usulan saja, keputusannya ada di pemerintah," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (21/2) kemarin.

Pria asal Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, menjelaskan penyertaan modal yang diajukan sepenuhnya untuk perbaikan jaringan distribusi air ke pelanggan. Pasalnya, jaringan yang sudah ada sudah banyak berumur tua, sehingga perlu diganti. "Perbaikan jaringan dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan, khususnya yang ada di Kuta Selatan," tegas Golak sembari menyebut total pelanggan tercatat sebanyak 73 ribu pelanggan.

Menurutnya, PDAM Tirta Mangutama sudah melakukan kajian terhadap apa yang diajukan tersebut. "Walaupun begitu, perlu juga kajian lain

baik itu kajian akademisi maupun bisnis plan-nya, sehingga dana yang kita ajukan itu visible untuk digunakan," tandasnya.

Sementara, Anggota Pansus Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Mangutama, I Nyoman Satria, secara terpisah menyatakan pembahasan penyertaan modal dilakukan penundaan, karena belum ada kajian investasi serta naskah akademik dari akademisi. "Semua harus sinkron dulu, apa yang dilakukan PDAM jika diberikan penyertaan modal? Biaya penyertaan modal yang diajukan cukup besar," ujarnya.

Melihat kondisi keuangan Badung saat ini, Satria mengungkapkan akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Mangutama untuk sama-sama melakukan pembahasan. "Nanti kita panggil ulang lagi Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Badung, supaya lebih matang pembahasannya," tukas politisi asal Mengwi ini.

Hal senada juga dikatakan anggota pansus lainnya, Made Yudana. Diakui penyertaan modal yang diajukan PDAM Tirta Mangutama cukup besar. "Untuk apa saja dana sebesar itu, kami di Dewan perlu mengetahuinya," ucapnya. Dia berharap pada pertemuan yang sedang dijadwalkan ulang, jajaran Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Mangutama dapat menjelaskan dengan terperinci pengajuan penyertaan modal kepada pemerintah. "Intinya supaya lebih jelas," tukasnya. **asa**



✓ Pemkab Badung Lombakan Proses Pembuatan Ogoh-ogoh ✓

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Badung mengadakan lomba video proses pembuatan ogoh-ogoh. Lomba berhadiah puluhan juta rupiah ini guna memotivasi sekaa teruna dan yowana dalam proses pembuatan ogoh-ogoh. Salah satu yang dinilai dalam lomba ini adalah kebersamaan sekaa teruna dan yowana di dalam pembuatan ogoh-ogoh.

Kepala Bagian Humas Setda Badung I Made Suardita, mengungkapkan lomba ini diadakan guna mendukung program Dinas Kebudayaan Badung terkait pembuatan ogoh-ogoh. "Dalam lomba ini menampilkan proses pembuatan ogoh-ogoh, termasuk kebersamaan mereka dalam pembuatan ogoh-ogoh," katanya, Kamis (20/2).

Suardita menerangkan, penilaian dalam lomba ini ada dua hal. Yakni penilaian juri dan jumlah like di Instagram. "Jadi, kami berikan nilai 75 persen dari netizen, seperti likers dan jumlah viewer. Sedangkan 25 persen nanti oleh juri," kata Suardita, mantan Lurah

Luluk, Kecamatan Mengwi.

Suardita mengatakan, kombinasi dari penilaian lomba guna menekan potensi kecurangan. Pihaknya khawatir, jika hanya mengandalkan likers dan viewer, ada yang berusaha memperoleh sebanyak-banyaknya dengan cara membeli. "Makanya, penilaian dari juri ini juga penting," tegasnya.

Adapun teknis dalam lomba video proses pembuatan ogoh-ogoh ini adalah, seluruh video ogoh-ogoh dari sekaa teruna dan yowana akan melalui babak penyisihan. Setelah melalui proses penyisihan akan dipilih 30 video terbaik dan diunggah di akun Instagram milik Bagian Humas Setda Badung. Batas pengunggahannya 11 Maret 2020.

"Setelah diunggah, diberikan waktu sekitar tiga hari guna melihat respons netizen baik yang likers maupun viewer. Dari situ kita nanti akan lihat jumlahnya," ucap Suardita.

Untuk peralatan yang digunakan bebas, baik kamera video, drone, handphone, dan

sebagainya. Walau demikian, durasi video dibatasi tiga menit. "Kami persilakan kepada peserta untuk berkreasi. Biarpun sederhana, tapi bila kontennya bagus, bisa jadi pemenang," kata Suardita.

Disinggung jumlah hadiah yang disiapkan, Suardita mengungkapkan totalnya Rp 45 juta. Rinciannya, juara I Rp 20 juta, juara II Rp 15 juta, dan juara III Rp 10 juta.

Seperti diketahui, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, mengumpulkan ketua sekaa teruna (ST) se-Kabupaten Badung, Senin (17/2), di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung. Hal ini dalam rangka penyerahan dana motivasi pembuatan ogoh-ogoh tahun 2020.

Jumlah dana yang diserahkan untuk masing-masing penerima sebesar Rp 40 juta. Namun, setelah dipotong pajak 15 persen, yang masuk ke rekening penerima hanya Rp 34 juta. Sementara ada total 563 penerima, terdiri dari 535 ST dan 28 yowana. asa



Lihat Potensi Kebocoran Parkir, Dishub Terapkan Uji Petik

TABANAN, NusaBali

Untuk mengejar pencapaian target retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan akan terapkan uji petik. Uji petik ini semacam survei dengan menyiapkan tim. Rencana itu akan diterapkan pada 30 potensi objek parkir di Tabanan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan I Gusti Ngurah Darma Utama, mengatakan target retribusi parkir tahun 2020 dipatok Rp 7.020.000.000.

Uji petik ini semacam survei yang dilakukan oleh tim. Tim tersebut nantinya akan menghitung jumlah wajib parkir yang masuk ke semua titik objek parkir per hari. "Kita akan terapkan usai Hari Raya Galungan ini," ujarnya, Kamis (20/2).

Menurut Darma Utama, uji petik ini bertujuan untuk mengetahui adanya kebocoran di tingkat petugas di lapangan. Serta mengetahui seberapa banyak persentase masyarakat Tabanan yang tidak tertib dalam membayar retribusi parkir. "Jadi dari hasil itu kita akan

mengetahui permasalahan, kemudian akan dievaluasi," ucapnya.

Darma Utama menjelaskan cara kerjanya, yakni tim yang dibentuk itu akan turun ke masing-masing objek retribusi parkir. Karena di Tabanan ada sebanyak 30 potensi objek parkir, maka uji petik ini akan digelar selama 30 hari. "Kalau misalnya titik objek parkir yang potensinya pagi hari, maka uji petik akan dilakukan pagi hari, kalau malam hari ya malam hari," beber Darma Utama.

Sehingga harapannya dengan adanya uji petik ini potensi di objek parkir tersebut sudah bisa dihitung. "Dengan itu kita mengetahui potensi dari masing-masing objek, apakah turun atau naik mendahului," tandasnya.

Bahkan dengan adanya uji petik ini bisa mengetahui potensi kebocoran di masing-masing objek parkir. "Kalau nanti ditemukan kebocoran di tingkat petugas, maka kita akan memperketat pengawasan. Kalau kebocoran di tingkat wajib pajak, maka kita perkuat sosialisasi," tandasnya. **des**



APBDes Belum Cair, Gaji Tak Terbayar

★ Perbekel dan Perangkat Desa *Ngrengkeng*

SINGARAJA, NusaBali

Nasib kurang beruntung dialami Perbekel dan seluruh Perangkat Desa (Sekdes, Kaur dan Kadus) se-Buleleng. Masalahnya di tengah tuntutan kebutuhan biaya menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, justru mereka belum menerima gaji. Usut punya usut, ternyata sumber dana APBDes seluruh desa sebanyak 198 Desa di Buleleng, belum satu pun ada yang masuk.

Sekadar dicatat, sumber pendapatan Perbekel dan Perangkat Desa lainnya, berasal dari dana transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Nah ADD ini menjadi salah satu sumber dana APBDes, selain Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi serta Pendapatan Asli Desa (PAD). Untuk tahun 2020, rata-rata APBDes masing-masing desa di atas Rp 1 miliar.

Belakangan terungkap, hingga pertengahan Februari 2020, seluruh sumber dana APBDes untuk seluruh desa di Buleleng,

belum ada yang ditransfer. Ini terungkap karena tidak sedikit dari kalangan Perbekel dan Perangkat Desa lainnya *ngrengken* alias menggerutu akibat belum bisa menerima gaji selama dua bulan sejak Januari dan Februari. Padahal mereka, saat ini tengah membutuhkan dana tersebut untuk keperluan biaya perayaan Hari Raya Galungan yang jatuh pada Buda Kliwon Dungulan, Rabu (19/2) besok. "Terpaksa pinjam dulu di LPD, nanti gajian baru lunasi. Kalau tidak ada pinjaman, dari mana dapat dana beli perlengkapan Galungan," ujar salah satu perangkat desa, Senin (17/2).

Hal senada juga disampaikan salah satu Perbekel di Kecamatan Sawan. Dia mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena dana untuk membayar gaji Perangkat Desa lainnya tidak ada. "Sampai sekarang dana transfer tidak ada yang masuk, padahal kami sudah buat APBDes. Bagaimana kami bisa mencairkan dana gaji," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng, Made Subur dikonfirmasi pertelepon Senin siang, mengakui ada keterlambatan pencairan dana transfer ke seluruh desa. Keterlambatan itu akibat proses terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Transfer yang agak lama di Bagian Hukum, Setda Kabupaten Buleleng. "Padahal kami sudah mengajukan pada November 2019 lalu, dan belum juga turun. Kalau sekarang turun, sekarang juga bisa diamprahkan," katanya.

Dijelaskan, Perbup itu menjadi acuan dalam pencairan dana transfer ke masing-masing desa. Sehingga tidak ada dasar hukum untuk mencairkan dana transfer ke masing-masing desa. "Tinggal menunggu terbit Perbupnya saja. Karena seluruh desa, sudah kakmi genjot penyusunan APBDes-nya. Dan semua desa sudah selesai membuat APBDes, pada Januari 2020 lalu," tegas Subur. **k19**



Dua Mesin Parkir Rusak, Dishub Terancam Tak Bisa Capai Target



• NUSABALI/DESAK

KEPALA Dinas Perhubungan Tabanan Gusti Ngurah Darma Utama (dua dari kiri) saat cek mesin parkir yang rusak di Pasar Transit Tabanan, Rabu (12/2).

TABANAN, NusaBali

Dua mesin parkir elektronik di Tabanan rusak. Dampaknya, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan kehilangan potensi pendapatan. Khusus di pasar transit pendapatan sudah hilang sekitar 20 persen.

Dua mesin parkir yang rusak tersebut adalah mesin parkir 02 yang ada di Jalan Gajah Mada.

Rusaknya perangkat parkir itu berupa layarnya tidak muncul. Lalu kedua alat sensor mesin parkir di pasar transit juga rusak. Rusaknya mesin parkir di Pasar Transit berupa progresifnya tidak jalan. Meskipun parkir 3 jam, tetap membayar 1 jam.

Kepala Dinas Perhubungan Tabanan Gusti Ngurah Darma Utama, mengakui adanya keru-

sakan mesin parkir tersebut. Saat ini telah dilakukan pemesanan alat.

Untuk yang parkir on street (mesin 02), suku cadang telah dipesan di Jakarta. Dan untuk parkir off street (pasar transit) telah dipesan ke Malaysia. "Kami sedang menunggu, sudah dipesan," ujarnya didampingi staf saat mengecek mesin parkir yang rusak di pasar transit, Rabu (12/2).

Menurutnya dampak dari kerusakan mesin itu memang akan berpengaruh pada pencapaian pendapatan. Khususnya di parkir off street karena sensornya rusak, target Rp 2 juta per hari kemungkinan tak terpenuhi. Sebab pendapatan hanya Rp 1,7 juta sampai Rp 1,8 juta.

Dan di bulan Januari saja pascakerusakan mesin ini hanya didapat Rp 400 juta dari target Rp 500 juta per bulan. Sehingga pencapaian target berkurang 20 persen per bulan. "Ini karena menjelang hari raya ramai, kalau hari normal bisa saja Rp 1,6 juta per hari," tutur Darma Utama.

Darma Utama juga menerangkan kendala sekarang untuk mesin parkir, masyarakat masih enggan menggunakan parkir elektronik. Kesadaran untuk membuat e-money juga kurang. Maka sesuai rapat yang sudah dilakukan, kembali akan berkoordinasi dengan penyedia kartu untuk mensosialisasikan secara gencar.

Meskipun demikian Dinas Perhubungan Tabanan akan kerja keras untuk mencapai target itu. Sebab tahun 2020 ini retribusi parkir ditarget Rp 7.020.000.000. Target ini meningkat dari tahun 2019 yang hanya Rp 5,5 miliar. "Di tengah kondisi ini ya kita akui harus kerja keras," tegasnya. des

Edisi : Kamis 13 Februari 2020

Hal : 7



Konsultasi Aplikasi Kesehatan, Komisi IV Kunjungan Kerja ke Dinkes Kota Surabaya



KOMISI IV DPRD Badung melakukan kunja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Senin (10/2).

MANGUPURA, NusaBali

Menindaklanjuti rencana pembuatan aplikasi android di bidang kesehatan, Komisi IV DPRD Badung melakukan kunjungan kerja (kunja) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Senin (10/2). Kunjungan dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Ketua Komisi IV I Made Sumerta beserta anggota Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi, Nyoman Gede Wiradana, Luh Gede Sri Mediasuti, Ketut Suweni, Luh Sekarini, Made Suwardana, dan I Gede Aryantha, juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Badung dr Nyoman Gunarta. Di Dinkes Kota Surabaya, rombongan diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan Kota Surabaya dr Sri Setiani.

Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta mengatakan, pihaknya sengaja memilih kunja ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang telah memiliki aplikasi di bidang kesehatan. "Kami ingin mengetahui bagaimana sistem aplikasi kesehatan tersebut. Agar bisa kami terapkan di Badung. Sejalan dengan program smart city yang juga diterapkan di Kabupaten Badung," ujarnya, Senin (10/2).

"Kunjungan ini juga sebagai ajang silaturahmi bertukar pikiran program kesehatan unggulan di Surabaya. Apa kelebihan program kesehatan di Surabaya supaya bisa

nantinya kami contoh dan terapkan di Badung," kata Bendesa Adat Pecatu tersebut.

Nyoman Gede Wiradana yang mendampingi Sumerta, menambahkan Badung merupakan daerah pariwisata dunia yang sangat rentan tertular penyakit. Seperti misalnya yang sedang heboh dan diperbincangkan dunia yakni virus Corona. "Jadi aplikasi kesehatan ini sangat penting dibuat oleh Badung. Untuk mempermudah masyarakat kita mengetahui informasi bidang kesehatan," katanya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Surabaya dr Sri Setiani, menjelaskan aplikasi kesehatan Kota Surabaya diberi nama e-health. E-health merupakan aplikasi sistem informasi kesehatan Kota Surabaya yang bisa diakses melalui android. Mulai pendaftaran pasien hingga sistem rujukan online bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut. "Tidak hanya rumah sakit, Puskesmas pun bisa diakses di aplikasi ini. Tanpa harus menunggu lama, masyarakat bisa daftar online dulu dan mengecek rumah sakit atau puskesmas mana yang akan mereka datangi lewat aplikasi ini. Tujuannya agar tidak menumpuk di salah satu titik," tuturnya. @



Tindaklanjuti TOSS, STT-PLN Temui Bupati Suwirta

SEMARAPURA, NusaBali

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menerima audiensi rombongan dari Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT-PLN) Jakarta di ruang rapat Bupati Klungkung, Selasa (11/2). Rombongan memperkenalkan Rektor STT PLN yang baru, sekaligus menindaklanjuti kerjasama terkait teknologi TOSS (tempat olah sampah setempat) antara Pemkab Klungkung, Indonesia Power dan STT PLN.

Bupati menerima rombongan bersama Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Anak Agung Kirana. Rombongan dipimpin Ketua STT-PLN yang baru, Prof Dr Ir Iwa Garniwa Mulyana KMT.

Bupati Suwirta mengatakan, kerjasama teknologi TOSS sudah berjalan sejak tahun 2016. Penerapan TOSS telah mengantarkan Klungkung meraih Top 40

Inovasi Pelayanan Publik. "Berkat teknologi ini pula Klungkung telah banyak dikunjungi pejabat dari daerah hingga pusat," ujarnya.

Bupati mengaku sempat diundang beberapa kali sebagai narasumber dalam seminar nasional tentang penerapan teknologi olah sampah. Bupati Suwirta sangat berharap teknologi TOSS akan terus berkembang dan menjadi lebih sederhana dan fokus. "Mohon kerjasama yang baik dan

berkelanjutan, siapa pun ketuanya a program harus berjalan," ujar Bupati Suwirta.

Rektor STT PLN Prof Iwa Garniwa Mulyana mengatakan, dirinya diangkat menjadi Ketua STT-PLN Periode 2019-2023 beberapa bulan lalu. Menurutnya, kerjasama STT PLN dengan Pemkab Klungkung merupakan potensi yang besar bagi STT. Ke depan kerjasama dalam penanganan sampah di Klung-

kung akan semakin dikuatkan. Kerjasama yang dilakukan nantinya selain melakukan pendampingan pemanfaatan teknologi TOSS, juga kajian dan mengembangkan teknologi ini. Sehingga bisa benar benar bisa mengatasi persoalan sampah di Klungkung. Dia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerjasama dan mengembangkan teknologi TOSS. **wan**



Ketug Bumi Diganti Legong Sad Kertih

★ Setiap Kabupaten/Kota Didanai
Rp 225 Juta Garap Pawai Berkualitas

'Kami mencoba untuk tahun ini tidak lagi menampilkan kesenian yang terlalu berat dan besar, namun mencoba sekarang memakai Legong yang gerakannya lebih melankolis, melambangkan kesejukan'

DENPASAR, NusaBali

Pembukaan pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) yang biasanya rutin diiringi dengan gamelan Ketug Bumi, rencananya akan diganti dengan garapan baru yakni Legong Sad Kertih hasil rekonstruksi maestro tari Ni Ketut Arini. Legong ini akan menjadi pembuka rangkaian pembuka Pawai PKB ke-42 atau yang tahun ini dinamakan Peed Agung pada 13 Juni 2020 mendatang.

Koordinator Tim Kurator PKB 2020, Prof Dr I Gede Arya Sugiarta SSKar MHum mengatakan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan nuansa baru kesejukan dan kelembutan jiwa sesuai dengan tema PKB yakni 'Atma Kertih, Penyucian Jiwa Paripurna'. "Kami mencoba untuk tahun ini tidak lagi menampilkan kesenian yang terlalu berat dan besar, namun mencoba sekarang memakai Legong yang gerakannya lebih melankolis, melambangkan kesejukan, dan gerak-gerak legong yang lincah disesuaikan dengan tema PKB tahun ini," ujarnya didampingi Kepala Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Disbud Bali Ni Wayan Sulastriani di sela memimpin rapat persiapan pawai PKB di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Selasa (11/2).

Dikatakan, Legong Sad Kertih ini merupakan hasil rekonstruksi maestro tari Ni Ketut Arini berdasarkan gaya-gaya palemongan seniman legendaris (alm) I Wayan Rindi. Sejumlah gerakan-gerakan Tari Legong yang mungkin tidak biasa dijumpai dalam Tari Legong saat ini karena memang dalam Legong Sad Kertih merupakan hasil rekonstruksi sejumlah Tari Legong klasik.

"Yang direkonstruksi pose geraknya Pak Rindi, kekayaan ragam gerakannya, itulah yang sekarang diangkat oleh Bu Arini untuk menggarap Legong Sad Kertih ini. Nanti ketemu

gerakan-gerakan yang unik, yang tidak biasa dilihat oleh penari klasik kita. Ini bisa menjadi sesuatu yang baru," kata Prof Arya pada acara yang dihadiri perwakilan dinas kebudayaan dari sembilan kabupaten/kota di Bali itu.

Selain Legong Sad Kertih, ada pula yang baru dari pelaksanaan pawai PKB tahun ini. Setiap kabupaten/kota didanai sebesar Rp 225 juta untuk menggarap pawai. Namun untuk mendapatkan dana ini, terlebih dahulu para penggarap berlomba di masing-masing kabupaten/kota. Mereka harus mengikuti penilaian proposal atas penciptaan karya seni untuk tiga kategori garapan yang dilombakan yakni Kategori Garapan Lambang Daerah (Identitas Daerah), Kategori Koreografi Kolaborasi Bertemakan Atma Kertih, dan Kategori Koreografi Tematik (hasil eksplorasi budaya khas kabupaten/kota). Semuanya dilombakan di tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya, bagi yang menang dalam tiga kategori tersebut, berarti yang memiliki konsep garapan terbaik. Akan ada tim dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang akan menilai sejumlah proposal garapan di setiap kabupaten/kota, untuk ditentukan yang mana yang terbaik dan berhak memperoleh uang untuk garapan Pawai Pesta Kesenian Bali. Untuk Kategori Garapan Lambang Daerah akan mendapatkan hadiah Rp50 juta, Koreografi Kolaborasi Bertemakan Atma Kertih (Rp100 juta) dan Kategori Koreografi Tematik masing-masing diberikan uang Rp75 juta.

Prof Arya berharap dengan diberikannya dana dari Pemprov Bali senilai lebih dari Rp2 miliar itu, maka sajian yang ditampilkan dalam pawai PKB bisa lebih mantap. "Kriteria pawai harus benar-benar tepat oleh para penggarap karena di sana banyak mengandung unsur-unsur kreativitas dan penciptaan," ujarnya.

Ditegaskan Prof Arya bahwa pemberian dana ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas garapan yang ditampilkan. Sebab dari hasil evaluasi, peserta pawai PKB selama ini cenderung asal ikut saja. "Alasan mereka mengapa memberikan tampilan yang kurang bagus karena tidak ada atau minim biaya. Nah sekarang karena sudah didanai, kita tentu berharap pawainya lebih mantap dan berkualitas," tandas Rektor ISI Denpasar, ini. ind



Kantor Pengadilan Negeri Badung Mulai Dibangun

MANGUPURA, NusaBali

Kantor Pengadilan Negeri Badung mulai proses pembangunan. Proyek pengerjaan selama 150 hari atau selama lima bulan, pada Selasa (11/2) kemarin ditinjau oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa.

Adi Arnawa saat meninjau pembangunan kantor Pengadilan Negeri Badung yang terletak di timur Terminal Mengwi, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, didampingi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) RI Prim Haryadi, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Zaid Umar Bobsaid, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar H Sobandi.

Menurut Adi Arnawa, pembangunan kantor Pengadilan Negeri Badung ini merupakan salah satu wujud keseriusan Pemkab Badung, dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik di bidang hukum. "Tentu kita berharap dengan adanya gedung Pengadilan Negeri ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

"Dengan adanya gedung Pengadilan Negeri Badung ini diharapkan nantinya persoa-



● HUMAS PEMKAB BADUNG

SEKDA Badung I Wayan Adi Arnawa (dua dari kanan) meninjau pembangunan kantor Pengadilan Negeri Badung yang terletak di timur Terminal Mengwi, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Selasa (11/2).

lan-persoalan yang selama ini banyak masuk ke Pengadilan Negeri Denpasar, nantinya bisa dibawa ke Pengadilan Negeri Badung," harapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemkab Badung sudah mendirikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung yang menempati gedung mewah hanya

beberapa meter dari Terminal Mengwi, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi. Gedung Kejari Badung ini diresmikan Jaksa Agung M Prasetyo, 15 Februari 2018. Gedung bersitektur Bali ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektare, dengan anggaran mencapai Rp 29 miliar bersumber dari

APBD Badung.

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Sobandi, beberapa waktu lalu mengatakan pembangunan Pengadilan Negeri Badung akan menggunakan dua tahun anggaran dari APBD Pemkab Badung. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 70 miliar. "Jadi nanti seluruh pembangunan akan menggunakan anggaran multi years 2020 dan 2021 dari Pemkab Badung," ujarnya, Sabtu (25/1).

Anggaran pembangunan kantor Pengadilan Negeri mencapai Rp 70 miliar tersebut tidak hanya akan digunakan untuk pembangunan gedung pengadilan. Namun juga akan digunakan untuk pembangunan fasilitas lainnya seperti rumah dinas para hakim. "Nantinya di areal itu juga akan dibangun rumah dinas hakim," lanjut asal Bandung, Jawa Barat, ini.

Sementara itu, Kadis PUPR Badung IB Surya Suamba membenarkan jika pembangunan PN Badung akan dimulai tahun ini. Untuk anggaran tahun 2020 ini Pemkab Badung menyiapkan dana Rp 16,4 miliar. **asa**



Pengembangan Desa Wisata Digelontor Rp 51,1 Miliar

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Badung bakal mengembangkan sejumlah desa yang ada di kawasan Badung Utara menjadi desa wisata. Pemkab Badung telah menyiapkan anggaran Rp 51,1 miliar dari APBD Badung untuk penataan.

Ada lima desa yang bakal dikembangkan, meliputi Desa Pangsan dan Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Desa Bongkasa Pertiwi dan Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, dan Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung I Made Badra, mengatakan pengembangan lima desa wisata saat ini tengah berproses. "Sudah tahap proses persiapan lelang kegiatan fisik. Jadi lima desa wisata itu dulu fokus kita. Dalam pengembangan ini kami bangun sejumlah infrastruktur penunjang dulu," ujar Badra, Selasa (11/2).

Birokrat asal Kuta ini mene-

gaskan, dalam pengembangan lima desa wisata, anggaran yang dipersiapkan mencapai Rp 51,1 miliar, untuk pembangunan fisiknya. "Kami telah menyiapkan tim untuk pendampingan desa wisata tersebut," tegasnya.

Tidak hanya membangun infrastruktur penunjang desa wisata, pendampingan menyangkut manajemen dan sumber daya manusia (SDM) juga akan dilakukan. Dengan demikian, desa wisata tersebut menjadi magnet wisata baru di Badung Utara.

Disinggung mengenai konsep desa wisata yang akan dibuat, Badra mengungkapkan sebisa mungkin wisatawan bisa langsung menginap di desa. Bagaimana pun tujuan mengembangkan desa wisata ini adalah menggerakkan perekonomian masyarakat. "Jadi, nanti masyarakat bisa merasakan manfaat dari pengembangan desa wisata yang dilakukan," tuturnya.

Badra menargetkan, akhir tahun ini, desa wisata sudah bisa berfungsi dengan baik. Pemkab Badung pun akan menggendong pihak asosiasi-asosiasi pariwisata untuk turut membantu mempromosikan desa wisata yang ada.

Seperti diketahui, berdasarkan Perbup Nomor 47 Tahun 2010, ada 11 desa wisata di Badung di antaranya, Desa Kerta, Desa Petang, Desa Pangsan, Desa Belok Sidan, Desa Carangsari (Kecamatan Petang), Desa Sangeh, Desa Bongkasa Pertiwi (Kecamatan Abiansemal), Desa Baha, Desa Munggu, Desa Mengwi, dan Desa Kapal (Kecamatan Mengwi). Penetapan ini dilakukan oleh Bupati Badung AA Gde Agung pada 15 September 2010. Kendati begitu, sesuai arahan Bupati, Dispar Badung akan fokus dulu menata lima desa wisata. Selebihnya menyusul secara bertahap. **asa**



Polisi Dalami Kasus Dugaan Pungli Senggol Payangan

GIANYAR, NusaBali

I Kasna, 40, petugas pungutan Pasar Senggol Payangan, Gianyar yang sempat ditahan di Mapolres Gianyar, informasinya telah kembali menghirup udara bebas. Namun bukan berarti kasusnya tamat. Kapolres Gianyar, AKBP I Dewa Made Adnyana, mengaku masih mendalami kasus dugaan pungutan liar (Pungli) itu. Kapolres juga menegaskan bahwa Kasna bukan dilepas, tapi ditanggguhkan.

"Bukan dilepas. Namun ditanggguhkan. Pengertian penanggguhan itu bukan berarti dilepas. Melainkan masih dilakukan pendalaman," jelas AKBP Dewa Adnyana, Selasa (11/2). Dia juga mengingatkan agar tidak menuduh sembarangan sebelum terbukti bersalah.

"Kesampingkan dulu bicara bahasa OTT (Operasi Tangkap Tangan). Seolah-olah orang dijustifikasi melakukan itu," ujar AKBP Dewa Adnyana. Menurutnya, Kasna diamankan lantaran ada surat dari perbekel dan bendesa. "Dari prosesnya ada kekeliruan, perlu kami dalami. Kalau ada kepentingan sendiri atau kelompok tertentu, ini yang kami dalami," katanya. Untuk proses hukum, polisi diberikan kesempatan 1x24 jam untuk membuktikan. Lanjut AKBP Adnyana, polisi bertindak sesuai prosedur yang berlaku. "Kami profesional saja. Ada pendalaman yang lain, yang perlu kami lakukan," jelasnya.

Ditanya soal aksi Kasna yang memungut pedagang pasar senggol tanpa karcis, masih didalami. "Itu kan bekerja bukan untuk diri sendiri. Ada proses. Ada pungutan," terangnya. Ditegaskan pula, hal yang sifatnya penyelidikan tak bisa serta merta disampaikan ke

publik. "Kalau sudah jelas baru. Kalau disampaikan begini, kayak narkoba, disampaikan jaringannya, ya *melaib* (kabur, red) orangnya," jelasnya.

AKBP Dewa Adnyana juga menegaskan agar masyarakat dewasa dalam mengartikan kata penanggguhan. "Kata lepas, bukannya orang tidak ditangani, padahal kasusnya berlanjut," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasna, 40, diamankan polisi pada, Sabtu (1/2) lalu. Dia ditangkap saat sedang memungut pedagang pasar senggol Payangan. Kasna yang tinggal di Banjar Griya, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan itu bisa mengumpulkan uang yang diduga hasil pungutan liar (pungli) hingga Rp 7 juta.

Di bagian lain, Perbekel Melinggih terpilih, I Nyoman Surata, yang dulu sempat menjadi perbekel Melinggih, menyatakan jika Kasna bukan preman. "Dia ada penugasan khusus dari Bagian Badan Usaha Milik Desa. Selaku petugas pungut. Cuma nomornya saya lupa. Di dokumen ada," ujar Surata. Mengenai pungutan, kata Surata, sudah dimuat dalam peraturan desa. Dia menjabarkan, setelah terbit UU No 6 tahun 2014 ada penertiban mengenai pengelolaan sistem pengelolaan desa. "Terkait pendapatan asli desa. Artinya otonomi desa. Mengacu UU itu, ada kewenangan desa mengatur dan mengurus berdasarkan hak asal usul skala desa," jelasnya.

Maka sesuai permendagri dibentukkan Bumdes. "Ya inilah sebagai bagian dari bagian usaha desa. Senggol ini masuk Bumdes mulai 2018. Sebelumnya itu murni pendapatan asli desa," jelasnya. nvi



Anggaran Bencana BPBD Tabanan Tak Ada Kenaikan



• NUSABALI/DESAK

I Gusti Ngurah Sucita

TABANAN, NusaBali

Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan digelontor anggaran bencana sebesar Rp 1,9 miliar. Anggaran tersebut nantinya dipergunakan untuk membantu warga yang tertimpa bencana.

Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucita, menjelaskan anggaran tersebut bersumber dari APBD Tabanan. Jumlah anggaran bencana di 2020 sama dengan anggaran tahun 2019. "Jumlah sama *segitu* (Rp 1,9 miliar)," ujarnya, Senin (10/2).

Kata Sucita, anggaran tersebut cukup untuk memenuhi

kebutuhan selama satu tahun. Apabila kurang maka akan diajukan di anggaran perubahan. "Biasanya cukup, nanti kalau ada kurang kami ajukan di anggaran perubahan," jelasnya.

Namun dari total anggaran Rp 1,9 miliar yang didapat ini nantinya akan dikurangi untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kena bencana di 2019. Sebab untuk bulan September sampai Desember 2019 belum tercover. "Kita akan kurangi Rp 400 juta, sisanya baru untuk membantu bencana di 2020. Kalau kurang, kami akan ajukan di perubahan," kata Sucita.

Sucita menambahkan selama 2019 bencana di Tabanan paling banyak karena longsor, pohon tumbang, dan kebakaran. Dan untuk di 2020 pihaknya sudah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada di tengah musim yang tak menentu. "Kalau di tahun 2019 itu paling banyak longsor," imbuh Sucita.

Menurutnya di Tabanan daerah yang rawan longsor ada di Kecamatan Baturiti, Pupuan, Selemadeg, dan Penebel. Di kawasan tersebut, BPBD telah memberikan atensi kepada camat agar menyampaikan kepada masyarakat supaya tetap waspada. **des**



Jalan Raya Andong Langganan Banjir

★ Dinas PU Bali Siapkan Perbaikan Drainase Rp 12 Miliar

GIANYAR, NusaBali

Hujan deras yang mengguyur wilayah Gianyar, Selasa (25/2), membuat Jalan Raya Andong, Desa Petulu Kecamatan Ubud - Desa/Kecamatan Tegallalang, banjir lagi. Tinggi air mencapai lutut orang dewasa. Sejumlah kendaraan roda dua mati karena mesinnya terendam air hujan.

Selama ini, banjir di Andong sudah jadi langganan. Tiap kali hujan, pasti banjir. Sempitnya gorong-gorong diduga menjadi salah satu faktor. Kondisi itu mendapat sorotan salah seorang anggota DPRD Gianyar I Ketut Karda. Menurutnya banjir sepanjang Jalan Raya Andong menjadi pemandangan rutin yang terjadi setiap musim hujan. Kondisi ini terjadi akibat volume air hujan yang melebihi kapasitas drainase di sepanjang jalur tersebut. "Hampir setiap hujan,

di sepanjang Jalan Raya Andong, air meluap," kata anggota Fraksi Demokrat ini, Rabu (26/2).

Tidak hanya itu, kondisi trotoar yang rusak juga kerap menghambat aliran air pada drainase. Belum lagi persoalan sampah mengendap pada drainase, sehingga menyumbat aliran air saat hujan. "Terutama aliran air dari Gentong Tegallalang, itu biasanya meluap di Jalan Raya Andong," ungkap wakil rakyat asal Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud ini.

Seperti hujan lebat yang terjadi Selasa (26/2). Volume air yang meluap di Jalan Raya Andong sampai setinggi lutut orang dewasa. Kondisi ini pun banyak dikeluhkan warga, khususnya pengguna jalan yang melintas. Hal ini juga disayangkan warga. Sebab di seputaran lokasi tersebut menjadi akses utama warga dan para wisatawan,

Ubud - Tegallalang.

Menyikapi kondisi ini, Ketut Karda mengaku sudah berulang kali berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi Bali. Dia mohon agar pemerintah segera merevitalisasi drainase di sepanjang jalur tersebut. "Mengusulkan agar drainase diperlebar dan diperdalam, sehingga saat hujan bisa menyalurkan lebih banyak air," ujar anggota DPRD yang juga pelaku pariwisata ini.

Dari hasil koordinasi terakhir dengan Dinas PU Pemprov Bali, dia mengaku mendapat informasi untuk perbaikan trotoar di sepanjang Jalan Raya Andong itu sudah dianggarkan Rp 12 miliar. "Baru tadi diinfokan, bahwa sudah dianggarkan Rp 12 miliar, untuk perbaikan trotoar sepanjang 2,5 km, saat ini masih dalam tahap tender proyek," katanya.



Banjir tinggi selutut orang dewasa di Jalan Raya Andong, Desa Petulu, Ubud-Tegallalang, saat hujan deras, Selasa (25/2). • IST

Dia sangat berharap proses tender proyek ini bisa segera dilakukan, sehingga perbaikan drainase bisa dengan cepat dikerjakan. "Ini

harus segera dikerjakan, karena banjir setiap hujan di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama," ujarnya.

Edisi : Senin 27 Februari 2020

Hal : 6



Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bendungan Tamblang Tersisa Rp 12 Miliar untuk 20 Bidang

SINGARAJA, NusaBali

Pembayaran dana ganti rugi lahan proyek Bendungan Tamblang yang berlokasi di perbatasan Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Sawan, Buleleng masih menyisakan 20 bidang dengan nilai sekitar Rp 12 miliar. Rencananya Balai Wilayah Sungai Bali Penida (BWS BP) akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng, sebelum dana itu dititip (konsinyasi) di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja.

Dalam pembebasan lahan proyek Bendungan Tamblang yang berada di empat desa bertetangga, yakni, Desa Bonthing, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, dan Desa Sawan, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, tercatat ada sebanyak 212 bidang yang diganti rugi.

Dalam proyek Bendungan Tamblang, luas lahan yang

dibebaskan seluas 73,6 hektare, dari 212 bidang lahan. Rinciannya, Desa Bila sebanyak 53 bidang, Desa Bonthing, 38 bidang, Desa Bebetin, 3 bidang dan Desa Sawan sebanyak 116 bidang. Dalam pengadaan lahan tersebut, BWS BP menyiapkan dana pembebasan sebesar Rp 260 miliar.

Proses pembayaran ganti rugi ini sudah berjalan sejak 7 Februari 2020 lalu. Dari 212 bidang itu, sebanyak 192 bidang sudah dibayarkan melalui rekening masing-masing pemilik lahan. Sedangkan sisanya sebanyak 20 bidang dengan nilai dana ganti rugi sekitar Rp 12 miliar, belum bisa dibayarkan karena beberapa persoalan. Di antaranya ada yang belum melengkapi dokumen berupa sertifikat hak milik yang asli. Kemudian ada karena tidak hadir dalam musyawarah, sehingga dokumennya belum dapat diverifikasi.



• DOK NUSABALI

Lokasi proyek Bendungan Tamblang di perbatasan Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Sawan, Buleleng.

Kabarnya oleh BPN Buleleng selaku panitia dalam pengadaan lahan proyek Bendungan Tamblang mengajukan agar dana ganti rugi terhadap 20 bidang tanah itu dititip di PN. Namun sejauh ini, pihak BWS BP belum bersurat ke PN Singaraja untuk penitipan dana tersebut.

Kepala Satuan Kerja (Ka-

sakter) Bendungan BWS BP, I Gusti Putu Wandira, melalui PPK pengadaan lahan Bendungan Tamblang, Nyoman Astawa, yang dikonfirmasi Rabu (26/2) mengaku masih berkoordinasi lebih lanjut dengan BPN Buleleng guna memastikan berkas yang belum lengkap termasuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam pem-

bebasan tersebut. "Kami belum bersurat ke Pengadilan, karena kami masih harus berkoordinasi dengan BPN. Untuk memastikan ketentuan konsinyasi tersebut. Biar tidak menyalahi ketentuan nantinya," kata Astawa.

Menurutnya, bila nanti hasil koordinasi dengan BPN harus dikonsinyasi, maka pihaknya harus bersurat terlebih dahulu dengan pihak Pengadilan. Namun, bila nanti ada yang layak dibayarkan, maka prosesnya pembayarannya akan langsung diproses, tanpa harus dikonsinyasi di Pengadilan. "Kalau yang lainnya sudah semuanya terbayarkan, tinggal ini saja (20 bidang, Red) yang masih ada persoalan. Harapan kami tidak sampai dikonsinyasi," ujar Astawa.

Sementara pihak BPN Buleleng, belum bisa dikonfirmasi terkait dengan persoalan 20 bidang lahan yang belum bisa dibayarkan tersebut. **k19**

Edisi : Kamis 27 Februari 2020
Hal : 4



Anggaran PKB Tabanan Naik Jadi Rp 2,9 Miliar

★ Akan Tampilkan 1.500 Seniman dan 8 Materi Tambahan

TABANAN, NusaBali

Anggaran Pesta Kesenian Bali (PKB) tahun 2020 di Kabupaten Tabanan setelah tiga tahun berturut-turut selalu turun, di 2020 naik menjadi Rp 2,9 miliar. Dengan kenaikan anggaran yang lumayan besar ini, Tabanan akan menampilkan seluruh materi, dan akan melibatkan 1.500 seniman.

Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Tabanan I Wayan Muder, seizin Kepala Dinas Kebudayaan I Gusti Ngurah Supanji, menjelaskan tahun 2020 anggaran PKB naik dibanding 2019. "Anggarannya sekitar Rp 2,9 miliar," ujarnya, Rabu (26/2).

Sebelumnya di 2019 anggaran PKB di angka Rp 1,6 miliar, sedangkan di 2018 sebesar Rp 1,9 miliar. Dengan anggaran tersebut, tahun-tahun sebelumnya Tabanan selalu terbatas mengirimkan materi di ajang PKB. Pemkab Tabanan hanya mengirimkan materi prioritas.

Kata Muder, anggaran Rp 2,9 miliar itu bersumber dari APBD Tabanan dan BKK Provinsi Bali. Rinciannya BKK provinsi sebesar Rp 750 juta dan APBD Tabanan sebesar Rp 2 miliar lebih, sehingga totalnya Rp 2,9 miliar. "Kita bersyukur sudah naik, kita akan tampilkan seluruh materi

serta tampilkan 8 materi tambahan, melibatkan 1.500 seniman," tuturnya.

Untuk saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan untuk pembinaan peserta yang akan mewakili Tabanan. Bahkan di upacara pembukaan nanti Tabanan akan menampilkan pementasan inovasi, yakni, ketungan dengan tektekan sebagai ciri khas Kabupaten Tabanan yang merupakan daerah agraris. "Ketungan itu dipakai untuk menumbuk padi, sedangkan tektekan itu sebagai salah satu tradisi untuk mengusir hama di sawah," kata Muder.

Muder menambahkan PKB ke-42 nanti mengambil tema Atma Kerti yakni Penyucian Jiwa Pramana. Tema ini dirancang dalam payung tema Nangun Jiwa Pramana Padma Bhuana Bali, yang dimaknai membangkitkan spirit budaya menuju Bali Era Baru.

Dan sebelum tampil di PKB provinsi, Muder mengatakan duta Tabanan akan tampil di PKB kabupaten yang akan digelar sekitar Mei dan Juni untuk diuji coba. "Kita akan uji coba semua materi dan nanti diarahkan tiap-tiap masing-masing kecamatan menampilkan ciri khas seniman masing-masing" tandasnya. **des**

Edisi : Kamis 27 Februari 2020

Hal : 7



Pungutan PHR Dihentikan 6 Bulan, Badung Terancam Kehilangan Rp 1,6 Triliun

★ Kalangan Pelaku Pariwisata di Bali Sambut Sumringah Kebijakan Pusat

TINGKAT HUNIAN HOTEL DI BALI SAAT INI

| NO | KAWASAN | HUNIAN |
|----|----------|--------------|
| 1 | Nusa Dua | 30-35 Persen |
| 2 | Kuta | 35-40 Persen |
| 3 | Seminyak | 35-40 Persen |
| 4 | Sanur | 60-65 Persen |
| 5 | Ubud | 50-55 Persen |

MANGUPURA, NusaBali
Pembkab Badung terancam kehilangan pendapatan dari pajak hotel dan restoran (PHR) sebesar Rp 1,6 triliun di tahun 2020 ini. Pasalnya, pemerintah pusat keluarkan kebijakan hentikan pemungutan PHR selama 6 bulan di 10 destinasi termasuk

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Pungutan PHR Dihentikan 6 Bulan, Badung Terancam...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Bali, sebagai upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian akibat dampak virus Corona.

Pembkab Badung waswas bila kebijakan peniadaan pungutan PHR selama 6 bulan ini benar-benar diberlakukan. Soalnya, sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) Badung selama ini bersumber dari PHR. "Ya, kalau benar diberlakukan, maka pendapatan Badung bakal anjlok," ungkap Kepala Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung, I Made Sutama, Rabu (26/2).

Menurut Made Sutama, Pembkab Badung terancam kehilangan pendapatan hingga Rp 1,6 triliun tahun ini bila kebijakan stop pemungutan PHR tersebut dilaksanakan. "Kalau berkaca pada realisasi PHR sebelumnya saat pariwisata normal, pendapatan Badung hingga triwulan II biasanya Rp 1,6 triliun. Kalau peniadaan pajak berlaku 6 bulan, artinya kan triwulan I hingga triwulan II, berarti segitu (1,6 triliun) potensi pendapatan yang akan hilang," keluh Sutama.

Sutama mengungkapkan, realisasi PHR di Badung tahun 2019 mencapai sekitar Rp 3,2 triliun. Nah, jika kebijakan stop PHR selama 6 bulan diberlakukan tahun ini, maka Badung maksimal akan dapat pemasukan dari PHR Rp 1,6 triliun.

Disebutkan, bukan hanya Badung yang merasakan imbas dari stop PHR selama 6 bulan ini. Enam kabupaten lainnya di Bali yang selama ini mendapatkan penyisihan PHR dari Badung, kecuali Gianyar, juga kena imbasnya. "Tapi, bagaimana pun kalau sudah ada pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat, kita harus sampaikan sampai ke WP (Wajib Pajak)," kata

Sutama.

"Sejauh ini, kita masih menunggu kepastian tersebut. Sampai sekarang kami belum menerima pemberitahuan apa pun dari pemerintah pusat terkait rencana peniadaan pungutan PHR selama 6 bulan itu," lanjut birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Karena belum ada pemberitahuan apa pun dari pusat terkait rencana meniadakan pungutan PHR selama 6 bulan, menurut Sutama, pihaknya saat ini masih menjalankan pungutan pajak hotel dan restoran seperti biasa. "Jadi, sekarang kami masih berjalan seperti biasa, sebelum ada ketentuan yang mengatur," tandasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan dan Pasedaha Agung Kabupaten Badung, realisasi pendapatan PHR hingga 24 Februari 2020, mencapai skitar Rp 666 miliar. Angka tersebut naik sekitar Rp 57 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2019 lalu, yang besarnya mencapai Rp 612 miliar.

Dari Rp 666 miliar pajak yang dipungut periode Januari hingga 24 Februari 2020 ini, kata Sutama, sebanyak Rp 445 miliar di antaranya bersumber dari pajak hotel. Sedangkan sisanya, sekitar Rp 133 miliar dari pajak restoran.

Sementara, Kadis Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, menyatakan ada empat poin kebijakan penting yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam membantu pariwisata dan perekonomian akibat virus Corona. Pertama, pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 298,5 miliar untuk insentif airline dan travel agent dalam rangka mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia.

Kedua, untuk wisatawan

dalam negeri, diberikan insentif Rp 443,39 miliar insentif dalam bentuk diskon sebesar 30 persen harga untuk 25 persen seat per pesawat yang menuju 10 destinasi wisata. Ketiga, 10 destinasi pariwisata yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Indonesia, tidak dipungut PHR (sebesar 10 persen) selama 6 bulan.

Sepuluh (10) destinasi pariwisata dimaksud adalah Danau Toba, Jogjakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. Sebagai gantinya, pemerintah pusat akan memberikan hibah sebesar Rp 3,3 triliun kepada 10 destinasi pariwisata tersebut.

Keempat, dalam APBN juga tersedia anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sebesar Rp147 miliar yang akan dikonversi menjadi hibah ke daerah-daerah untuk memacu pariwisatanya.

Sementara itu, kalangan pelaku pariwisata Bali menyambut positif kebijakan pemerintah pusat untuk mengakselerasi kepariwisataan Bali akibat dampak virus Corona. Kebijakan tersebut dinilai bisa bantu meringankan pelaku pariwisata di tengah dampak virus Corona.

"Kami menyambut baik dan apresiasi kebijakan pusat yang memberi insentif seperti keringanan pajak (PHR) tersebut," ujar Wakil Ketua DPP Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA), I Made Ramia Adnyana, saat dikonfirmasi NusaBali, Rabu (26/2).

Namun, kata Made Ramia, untuk lebih memastikan implementasinya di lapangan, perlu disusul dengan Juklak dan Juknis. Misalnya, bagaimana petunjuk soal keringanan pengenaan PHR, apakah langsung tidak dikenakan kepada wisatawan?

"Jika petunjuknya jelas, maka pelaksanaannya akan mudah," papar Ramia.

Paparan senada disampaikan Ketua Bali Hotel Association (BHA), Ricky Putra. Dia berharap kebijakan pusat ini segera bisa disampaikan kepada para stakeholder pariwisata, sehingga bisa dilaksanakan secepatnya. Menurut Ricky Putra, dampak virus Corona memang sudah terasa, ditandai dengan tingkat hunian hotel.

Di kawasan Nusa Dua (Kecamatan Kuta Selatan, Badung), tingkat hunian hotel berada pada kisaran 30-35 persen. Sedangkan di kawasan Kuta (Kecamatan Kuta, Badung), tingkat hunian hotel berada pada kisaran 35-40 persen. Sementara di kawasan Seminyak (Kecamatan Kuta, Badung), tingkat hunian hotel berada pada kisaran 35-40 persen. Sebaliknya, tingkat hunian hotel di kawasan Sanur (Denpasar Selatan) berada pada kisaran 60-65 persen.

"Untuk kawasan Ubud (Gianyar), tingkat hunian hotel berada di kisaran 50-55 persen," ujar Ricky. Untuk membantu mengakselerasi, Ricky berharap pihak industri pariwisata juga berkreasi menciptakan paket-paket menarik yang dapat merangsang peningkatan kunjungan wisatawan.

Di sisi lain, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Nyoman Nuarta, juga menyambut positif kebijakan pusat yang bertujuan mengakselerasi kondisi kepariwisataan. Setidaknya, kebijakan ini dapat membantu industri pariwisata untuk berpikir dan tidak tergesa-gesa mengambil tindakan, seperti melakukan PHK. "Mudah-mudahan dampak virus Corona ini tidak seperti tragedi Bom Bali I 2002," harap Nuarta. asa,k17



Cegah Molor Penyelesaian Proyek Pasar Banyuasri Dinas PUTR Skenariokan Tambah Shift Kerja

SINGARAJA, NusaBali

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng telah menyiapkan skenario mengantisipasi molor penyelesaian proyek Pasar Banyuasri di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Skenario ini menyusul musim hujan yang bisa memperlambat proses kerja.

Skenarionya, pekerja dibagi dua shift yakni siang dan malam. "Kami sudah minta siapkan dua shift, lampu-lampu sorot sudah disiapkan," kata Plt Kadis PUTR I Putu Adipta Ekaputra, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/2).

Adipta menjelaskan, dua shift itu diberlakukan mengantisipasi penurunan progres pengerjaan fisik akibat curah hujan yang

tinggi. Sehingga tidak ada keterlambatan dalam penyelesaian Pasar Banyuasri. "Targetnya kan Desember tahun 2020 ini, jangan sampai target itu molor, sehingga kami sudah menekankan dua shift," jelasnya.

Menurut Adipta, sejauh ini pihaknya melihat rekanan PT Tunas Jaya Sanur telah bekerja profesional dalam mengerjakan proyek Pasar Banyuasri. Mulai dari jumlah pekerja termasuk peralatan yang digunakan, sehingga progres pengerjaan melampaui schedule. "Progres perhari ini, sudah mencapai 19 persen, kemajuannya tiga persen, karena dari *schedule* yang ada semestinya 16 persen. Rekanannya cukup profesional,

karena tiap minggu ada evaluasi pekerjaan," ujar penghobi otomotif ini.

Pantauan di lokasi, progres 19 persen itu meliputi fisik bangunan, dimana pemasangan tiang pancang sebanyak 960 titik sudah kelar dengan kedalaman masing-masing 9 meter. Dan saat ini, sudah mulai pemasangan tiang kolom.

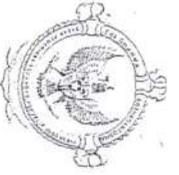
Pembangunan Pasar Banyuasri, mulai dikerjakan 27 Desember 2019, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Pasar Banyuasri dirancang menjadi pusat city tour di Kota Buleleng, yang mampu beraktivitas 24 jam.

Pembangunan Pasar Banyu-

asri menjadi mega proyek kedua, karena biaya yang dihabiskan cukup tinggi untuk ukuran Buleleng sebesar Rp 159,6 miliar. Pasar Banyuasri memiliki luas masing-masing lantai pertama seluas 6.349,5 meter persegi, dengan jumlah los basah sebanyak 200 unit dan los kering 352 unit. Lantai kedua seluas 6.174 meter persegi dengan jumlah los sebanyak 244 unit dan kios sejumlah 184 unit. Sedangkan lantai tiga seluas 6.174 meter persegi dengan jumlah kios kuliner sejumlah delapan unit dan parkir yang mampu memuat 136 unit mobil. Sehingga total luas lantai bangunan utama adalah 18.697,5 meter persegi. **k19**

Edisi : Rabu, 25 Februari 2020

Hal : 4



Gelapkan Pajak, Kakek 61 Tahun Jadi Pesakitan

DENPASAR, Radar Bali - Di usianya yang mulai uzur, Sugianto harus duduk menjadi pesakitan di PN Denpasar. Kakek 61 tahun yang menjabat Direktur Utama PT Wahyu Alwijaya itu didakwa menggelapkan pajak hingga menyebabkan kerugian negara Rp 153 juta.

"Sejak Januari 2016 sampai Desember 2016, terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan dan tidak melaporkan keterangan dengan benar pemotongan pajak yang telah dipungut," ungkap jaksa penuntut umum (JPU) I Kadek Wahyudi Ardika di muka majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Adanya Dewi, kemarin (24/2).

Dijelaskan lebih jauh, perusahaan terdakwa dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) bergerak di bidang jasa pemasangan instalasi listrik, mekanik, dan furniture. Kantor terdakwa yang berkantor di Jalan Gunung Lebah, Tegal Harum, Denpasar, menerima pembayaran sekaligus memungut pajak penghasilan negara (PPN) sebesar 10 persen dari konsumennya.

Dari beberapa kali transaksi dengan sejumlah rekanan, terdakwa memungut PPN bervariasi bergantung besaran nilai proyek. Suatu waktu, terdakwa memungut PPN Rp 106 juta dari dua proyek yang dikerjakan. Namun, dari Rp 106 juta itu yang

disetorkan ke kas negara hanya Rp 4,1 juta. Begitu juga dengan transaksi lainnya, tidak sepenuhnya pajak disetorkan ke kas negara.

Selain tidak melaporkan masa PPN, terdakwa juga membuat laporan PPN fiktif atau tidak benar. Itu terjadi pada April 2016 dan November 2016. Terdakwa membuat laporan pajak nihil. Faktanya, pada waktu tersebut, terdakwa menerima pembayaran dari lawan transaksi atau rekanan terdakwa. Dalam waktu tersebut terdakwa memungut PPN sebesar Rp 51,7 juta. "Total PPN yang dipungut terdakwa tapi tidak disetorkan terdakwa ke kas negara sebesar Rp 153,2 juta," beber JPU Kejari

Denpasar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 31 huruf c, d, dan i, UU Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdakwa terancam pidana penjara maksimal enam tahun. Atas dakwaan JPU, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian. (san/yor)

DIADILI: Sugianto saat menjalani sidang kasus penggelapan pajak di PN Denpasar kemarin.



SK Pemberhentian Ashari Tak Kunjung Terbit

Muncul Isu Miring di Celukanbawang

SINGARAJA, Radar Bali - Perbekel Celukanbawang nonaktif Muhammad Ashari memang telah menjalani hukuman di Lapas Singaraja, lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun

hingga kini SK pemberhentian tetap Ashari sebagai perbekel, tak kunjung terbit.

Hingga Minggu (23/2), SK pemberhentian informasinya belum juga diterbitkan. Padahal draft SK sudah disusun sejak 15 Januari lalu. Tak diketahui secara pasti dimana SK tersebut mandeg. Bahkan hingga kini SK tersebut belum ditandatangani

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, karena belum sampai di meja bupati.

Lambannya penerbitan SK tersebut, tak pelak menimbulkan sejumlah spekulasi di warga Desa Celukanbawang. Spekulasi yang muncul yakni, pemerintah tidak akan melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) di Desa Celukanbawang.

Sebab itu, pemerintah tak kunjung menerbitkan SK.

"Malah ada informasi kalau Pak Ashari bisa menjabat lagi jadi perbekel, setelah keluar (dari penjara)," ujar salah seorang warga yang minta namanya tak dikorbankan.

Selain itu, roda pemerintahan di Desa Celukanbawang juga mandeg. Penyebabnya, Sekdes Celukan Bawang, Rahmansyah,

yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Perbekel, kesulitan mengambil kebijakan. Maklum saja, tugas dan wewenang pelaksana tugas, tak sebesar pejabat (Pj) perbekel.

Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng I Gusti Putu Mastika yang dikonfirmasi kemarin (23/2), mengakui

bahwa SK pemberhentian belum terbit. Mastika pun mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena hanya bisa menunggu SK terbit. "Kami sudah ajukan, dan sekarang masih menunggu terbitnya SK. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera terbit. Mungkin masih terhambat hari raya," kata Mastika. Disinggung soal isu yang beredar di Desa

Celukanbawang, Mastika tak membantahnya. Menurut Mastika, pemerintah akan tetap melakukan proses PAW di Desa Celukanbawang, setelah SK terbit. "Kami sudah dengar isu seperti itu. Nanti setelah SK terbit, kami akan segera sampaikan pada tokoh dan masyarakat di sana. Penjabat perbekel juga sudah siap bertugas," tegasnya. (eps/gup)



Pangkalan Ikan Kusamba Porak Poranda

■ Karena Dihantam Ombak ■ Proyek Rp 18 M Itu Sempat Mangkrak

SEMARAPURA, Radar Bali - Kondisi pangkalan pendaratan ikan (PPI) Kusamba di Pantai Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan sangat memprihatinkan. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 18 miliar lebih itu porak poranda dihantam ombak.

Berdasarkan pantauan di lapangan, selain porak poranda, kondisi bangunan pun terancam rata tanah tergerus abrasi. Parahnya lagi, satu unit bangunan berukuran besar di sisi timur rata tanah dan hanya menyisahkan kerangka beton.

Saat ini, di kawasan itu hanya menyisahkan dua unit bangunan yang kondisinya pun memprihatinkan. Sebab, pondasi bangunan tidak utuh. Begitu juga dengan atap yang sudah lapuk.

Jro Mangku Dharma, warga asal Desa Kusamba yang saban hari berjualan di Pantai Karangdadi mengatakan, bangunan PPI Kusamba di sisi timur hancur dihantam ombak sejak dua bulan lalu. Akibatnya, se-

bagian bangunan ringsek.

Menurut Jro Mangku terjangan ombak juga porak porandakan tanggul pemecah ombak. Bahkan sebagian jalan menuju pantai juga amblas. "Ombaknya besar sekali. Apalagi saat hari penampahan Galungan dan hari Galungan, air lautnya sampai melewati kolong warung saya. Kalau saya tidak membuat warung saya dengan model panggung, sudah disapu air laut," ujar Jro saat ditemui di lokasi Jumat (21/2).

Menurut dia, dengan kondisi ombak tersebut ancaman abrasi kian parah. Bahkan dia memprediksi bangunan PPI Kusamba yang lainnya akan lenyap dihantam ombak. "Itu sebabnya setelah hari raya Nyepi 25 Maret mendatang saya mau pindahkan warung saya lebih ke utara sekitar dua meteran. Kalau tidak dipindahkan bisa hanyut dihantam ombak," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung, I Wayan Durma menjelaskan berdasar-

kan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan PPI menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Berkaitan dengan hal itu, pihaknya sudah bersurat ke Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Bali untuk menyerahkan aset PPI Kusamba tersebut. "Penyerahannya dari Kabupaten Klungkung sudah dilaksanakan, tapi pihak provinsi masih koordinasi ke pusat. Artinya belum diterima provinsi," terangnya.

Terkait kondisi PPI Kusamba saat ini, Durma mengaku sudah melakukan pengecekan ke lapangan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Bali. "Setelah dicek oleh Dinas, masih dikoordinasikan ke pusat," katanya.

Sebelumnya, Made Gunaja yang sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Bali mengungkapkan PPI Kusamba tidak termasuk sebagai PPI yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Menurut dia, di Bali hanya terdapat dua PPI yang terdaftar di Kementerian RI, yaitu PPI Kedonganan di kabupaten Badung dan PPI

Sangsit di Buleleng. "Dalam penetapan sebagai PPI ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Seperti harus memiliki dermaga, tempat pendaratan ikan dan pernah ada kapal yang berlabuh," ujarnya.

Gunaja mengaku sudah menyurati Kementerian untuk melakukan evaluasi secara teknis. Sebab, anggaran yang

dikeluarkan untuk pembangunan PPI Kusamba cukup besar. Sebab, untuk membangun PPI seperti sekarang ini anggarannya hampir Rp 75 miliar. "Kalau hanya Rp 2 miliar per tahun butuh waktu 30 tahun untuk menuntaskan pembangunan. Tidak mungkin untuk dilakukan," katanya.

Di tempat terpisah, bupati

Klungkung I Nyoman Suwirta menjelaskan personel, pembiayaan sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) telah diserahkan ke pemerintah provinsi Bali. Namun, hingga kini Pemprov Bali belum memberi kabar apakah mau mengambil alih atau tidak. Menurut Suwirta, jika Pemprov Bali tak mau mengambil alih pembangunan, pi-

haknya berencana menghapus bangunan PPI dari aset Pemkab Klungkung. Pasalnya, Pemkab tidak mampu lagi memperbaiki bangunan PPI Kusamba yang hingga saat ini belum rampung. "Pembangunan PPI Kusamba itu telah menelan anggaran sekitar Rp 18,1 miliar. Saya tidak mau PPI itu mangkrak terus," ujarnya. (ayu/dot)



Desa Pejeng Ogah Beli Mobdin

Xpander

Fokus Bangun Infrastruktur untuk Kelola Sampah

GIANYAR, *Radar Bali* - Tahun 2019 lalu sebanyak 63 desa di kabupaten Gianyar kompak memborong mobil dinas (mobdin) jenis Mitsubishi Xpander. Namun, hanya desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring yang tak ikut membeli. Bahkan di tahun 2020 ini desa Pejeng kembali tak menganggarkan dana untuk pembelian mobdin jenis Xpander tersebut. Menariknya, anggaran mobil seharga Rp 245 juta lebih itu digunakan membangun fasilitas pengelolaan sampah.

Apakah desa Pejeng tidak melakukan pengadaan mobdin karena tahun lalu Xpander sempat dibidik Polda? Hal itu dibantah Perbekel Pejeng Tjokorda Gde Agung Pelayun. "Sampai saat ini memang belum pesan mobil itu (Xpander) karena kami tahun ini masih mengejar penanganan sampah," ujar Tjokorda Gde Agung Pelayun, Jumat (21/2).

Cok Pelayun mengatakan pihaknya memang komitmen untuk bisa mengelola sampah secara mandiri. Sehingga Desa Pejeng tidak perlu lagi membawa sampah ke TPA Temesi.

"Kami tidak bisa terus kirim sampah ke TPA Temesi, kasihan warga disana terus diberi sampah. Sampah memang harus dikelola masing-masing desa," jelasnya.

Untuk mengawali pengelolaan sampah, pihaknya sudah memiliki mesin selinder. Mesin berfungsi untuk menghancurkan sampah organik menjadi serpihan kecil, sehingga lebih mudah diolah menjadi kompos. "Kami

sudah sosialisasi ke banjar-banjar dan masyarakat sudah mulai memilah. Tetapi ini bertahap," terangnya.

Saat ini anggaran di Desa Pejeng memang banyak terserap untuk pengelolaan sampah secara mandiri. Selain pengadaan sarana, besarnya anggaran juga digunakan untuk menggerakkan SDM yang meliputi dua sopir, dan lima tukang angkut sampah. "Dengan asumsi masyarakat belum sepenuhnya

mau bayar. Maka asumsi kami dibutuhkan dana Rp 250 juta pertahun hanya untuk sampah saja," terangnya.

Dia merinci dana itu untuk membayar gaji dua sopir dengan total Rp 5 juta. Pun untuk membayar 5 tenaga tukang angkut. Dana itu juga digunakan untuk ongkos minyak dan servis.

Di tahun 2020 ini, lanjut dia, pihaknya menganggarkan pembelian sejumlah alat seperti mesin penyaring sampah. Ditambahkan, program penanganan sampah menjadi kebutuhan dalam skala prioritas dibandingkan program lain seperti perbaikan got atau yang lainnya. "Dibanding program fisik memperbaiki got atau pemasangan paving itu tidak ada resistensi, kalau pun got diperbaiki masyarakat bisa saja tetap membuang sampah ke got," ungkapnya.

Diakui pihaknya sendiri semangat menjalankan program penanganan sampah sesuai surat dari gubernur Bali dan imbauan bupati Gianyar. Agung Pelayun menampik tak membeli Xpander pada tahun ini karena tahun lalu Xpander sempat dibidik Polda. Meski penyelidikan Xpander tak berlanjut, Agung Pelayun lebih memilih penganggaran pengelolaan sampah. (dra/dot)

Edisi : Sabtu, 22 Februari 2020

Hal : 5



Bayar Utang, Pemkab Negosiasi

Sengketa Utang Dengan UD. Serbajaya

SINGARAJA, Radar Bali - Pemerintah berencana melakukan negosiasi terhadap proses pembayaran utang piutang dengan UD. Serbajaya. Menyusul kekalahan Pemkab Buleleng dalam sengketa perdata dengan UD. Serbajaya sejak pengadilan tingkat pertama hingga tingkat peninjauan kembali.

Rencana negosiasi itu di-hembuskan Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna. Karuna menyebut pemerintah berencana mengajukan negosiasi untuk keringanan utang.

"Putusan dari pengadilan itu kan pemerintah harus membayar pokok plus bunga enam persen setiap tahun. Kami akan upayakan nego, bagaimana biar bunganya bisa di bawah itu," kata Karuna.

Dari hitung-hitungan, pemerintah wajib membayar bunga sebesar 36 persen. Sementara pokok utang sebesar Rp 94.479.750. Sehingga pemerintah harus membayar



Kami kan masih menghitung dulu. Tunggu pertemuan minggu depan. Yang jelas pemerintah berkomitmen membayar, karena itu putusan dari pengadilan."

PUTU KARUNA

Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng

bunga sebesar Rp 34.012.710 pada UD. Serbajaya. Jika ditotal, pemerintah harus menyiapkan anggaran Rp 128.492.460.

Karuna mengatakan, pembayaran utang itu akan dilakukan melalui APBD Perubahan 2020. Hanya saja untuk besaran anggaran, harus menanti hasil negosiasi. Rencana negosiasi itu akan



EKA PRASETYA/RADAR BALI

dilakukan pekan depan.

"Kami kan masih menghitung dulu. Tunggu pertemuan minggu depan. Yang jelas pemerintah berkomitmen membayar, karena itu putusan dari pengadilan," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam sengketa utang piutang itu, Pemkab Buleleng dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki bon pada UD. Serbajaya sebesar Rp 94.479.750. Bon tersebut tercatat dalam kurun waktu

2008 hingga 2012 lalu.

Sebenarnya pemilik UD. Serbajaya, Ketut Suryata Tanaya, sudah pernah mengajukan penagihan secara persuasive. Hanya saja, pemerintah menolak membayar bon tersebut. Suryata Tanaya kemudian mengajukan gugatan perdata dengan nomor gugatan 360/Pdt.G/2014/PN Sgr.

Dalam gugatan itu, Pemkab diminta membayar bon mereka pada UD. Serbajaya. Selain itu pengadilan juga memerintahkan Pemkab membayar denda sebesar 6 persen per tahun, terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan. Hasil audit BPK pun mewajibkan pemerintah membayar utang tersebut. (eps/gup)



RADAR BALI TRIBUN BALI BALI POST NUSA BALI

✓ **PDAM BADUNG** ✓

Minta Tambahan Modal Rp 660 M

MANGUPURA, *Radar Bali* - PDAM Tirta Mangutama Badung meminta tambahan penyertaan modal sebesar Rp660 miliar. Hal itu terungkap saat rapat Pansus Penyertaan Modal Perusahaan Daerah DPRD Badung dengan PDAM Tirta Mangutama belum lama ini.

Anggota Pansus, I Nyoman Satria mengatakan, penyertaan modal ke PDAM belum disetujui karena belum ada kajian investasi dan naskah akademik. "Nanti kita panggil ulang," terangnya. Secara terpisah Dirut PDAM Badung, Ketut Golak mengatakan, dana tersebut untuk perbaikan jaringan distribusi. "Karena jaringan kita sudah banyak yang berumur tua dan sudah perlu diganti," pungkasnya. (dwi/yor)

Edisi : Sabtu, 22 Februari 2020

Hal : 2



Sinyal Tersangka Baru Bulan April

Kasus Korupsi APBDes Dauh Puri Klod

DENPASAR, Radar Bali - Mantan bendahara Desa Dauh Puri Klod, Ni Putu Ariyaningsih, 33, yang kini menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Denpasar bakal memiliki kawan baru dari desanya. Pasalnya, jaksa penyidik Kejari Denpasar memastikan tersangka dalam kasus korupsi dana silpa APBDes Dauh Puri Klod lebih dari satu orang.

Bahkan, penetapan tersangka baru itu tinggal menunggu waktu. Hal itu diungkapkan Kasi Intel Kejari Denpasar, IGN Ary Kesuma. "Yang jelas ada lebih dari satu tersangka. Akhir Maret atau awal April sudah pasti ada tersangka baru," terang Ary kepada Jawa Pos Radar Bali kemarin (21/2).

Lebih lanjut dijelaskan Ary, saat ini pihaknya masih menunggu dan memperdalam keterangan saksi-saksi di persidangan. Keterangan para saksi ini akan mengungkap fakta baru. Setelah mendapat fakta baru dari keterangan para saksi, barulah dilakukan ekspose perkara.

Ari menegaskan, bayangan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka sudah ada. Hal itu berdasar struktur hukum siapa yang harus bertanggungjawab terhadap



Yang jelas ada lebih dari satu tersangka. Akhir Maret atau awal April sudah pasti ada tersangka baru."

IGN ARY KESUMA.

Kasi Intel Kejari Denpasar

kerugian negara. Namun, hal itu tidak cukup. Perlu diperkuat fakta di persidangan. "Perananannya (calon tersangka) belum muncul sama sekali dalam BAP kami. Semua saling lempar tanggungjawab. Tapi, keterangan di persidangan pasti beda, dan itu menjadi fakta baru," imbuh jaksa asal Gianyar, itu.

Sayangnya, saat ditanya siapa calon tersangka baru itu, Ary enggan mengungkapkan. Jaksa penghobi motor klasik itu menyatakan, semua akan dibuka setelah ekspose internal di kejaksaan. "Tunggu saja, kalau sudah kami tetapkan tersangka baru pasti kami kabari," tukasnya.

Sementara itu, informasi yang diterima koran ini, sejumlah nama berpeluang diseret menjadi tersangka menemani terdakwa Ariyaningsih. Mereka yang berpotensi menjadi pesakitan yaitu sekretaris desa dan kaur keuangan. Ada nama satu lagi yang

sejatinya berpeluang menjadi tersangka, yakni mantan perbekel yang kini duduk sebagai anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi PDIP I Gusti Made Wira Namiartha.

Nama pria yang akrab disapa Jik Nami itu disebut berulang-ulang dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi dana Silpa APBDes 2015 - 2016 belum lama ini. Namiartha yang saat itu menjabat perbekel dianggap turut bertanggungjawab karena berperan sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Penarikan atau pencairan uang didasari tanda tangan Namiartha. Sementara terdakwa sebagai bendahara dianggap bertanggungjawab karena mencairkan dana melebihi kegiatan yang ditentukan.

Pencairan dana desa dilakukan terdakwa, tapi ada juga yang secara langsung dilakukan saksi Namiartha. Selain nama Namiartha, muncul juga nama baru yang turut bertanggungjawab, yaitu Luh Made China Kembar Dewi (sekretaris desa) dan I Putu Wirawan (kaur keuangan desa). Sekretaris desa dianggap bertanggungjawab lantaran tidak memverifikasi slip pencairan. (san/yor)



Lunasi Utang UD Serba Jaya

hal 9 RB Sabtu 22/2

Pemkab Anggarkan Lewat APBD Perubahan

Singaraja (Bali Post) -

Pemkab Buleleng dipastikan akan melunasi utang di UD Serba Jaya Singaraja. Rencananya, pemkab mengalokasikan anggaran untuk melunasi utang itu pada APBD Perubahan Tahun 2020 mendatang.

Keputusan melunasi utang ini menyusul sengketa utang bergulir di pengadilan telah berakhir dengan keputusan pemerintah daerah harus melunasi utang Rp 94 juta dan bunga kepada pemilik UD Serba Jaya, Singaraja.

Asisten Tata Pemerintahan dan Hukum Setda Buleleng Putu Karuna, Jumat (21/2) kemarin mengatakan, sejak keputusan pengadilan diterima, pemerintah daerah kesulitan mencari anggaran untuk melunasi hutang itu. Ini karena di APBD tidak ada rekening untuk melunasi utang pemerintah. Tidak ingin melanggar regulasi, hal itu kemudian dikoordinasikan ke Pemerintah Provinsi Bali dan ke Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Hasilnya, pemkab dipersilakan membuat rekening membayar utang di APBD dengan acuan keputusan pengadilan yang memproses sengketa utang piutang dengan pihak ketiga.

"Kita menghormati keputusan hukum walaupun kalah dan keputusan harus dijalani. Tidak ada kode rekening membayar hutang di APBD, dan kami tanya ke provinsi dan pusat di-suruh buat rekening utang kemudian

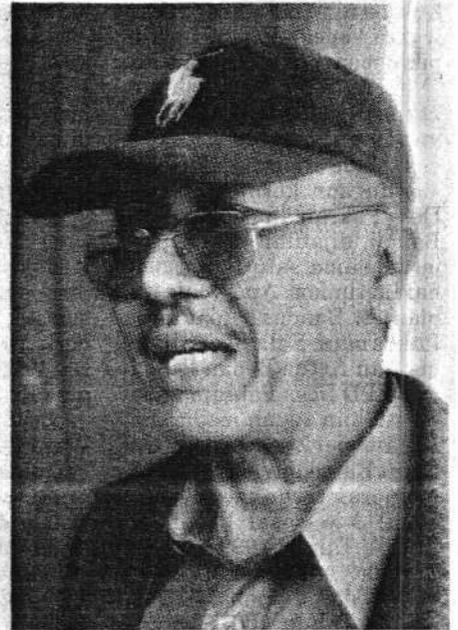
dimasukkan dalam APBD," katanya.

Menurut birokrat asal Desa Banyuatis Kecamatan Banjar ini, sebelum membuat rekening untuk membayar utang di APBD, pihaknya mengundang pemilik UD Serba Jaya pada Senin (24/2) pekan depan. Dari pertemuan ini, pemerintah bernegosiasi terkait persentase bunga yang juga harus dibayar oleh pemerintah. Pasalnya, pada keputusan itu, selain utang pokok Rp 94 juta, bunga per tahun sebesar 6 persen terhitung sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan juga wajib dilunasi oleh pemerintah daerah.

Sengketa utang-piutang itu berawal dari pembelian dengan cara bon oleh Bagian Perlengkapan dan Perawatan Aset Setda Buleleng, dalam kurun waktu 2008 hingga 2012. Dalam lima tahun itu, pemkab berutang Rp 94.479.750. Pemilik UD Serba Jaya, Ketut Suryata Tanaya, kemudian berusaha melakukan upaya penagihan secara persuasif. Karena mentok, *owner* Serba Jaya kemudian mengajukan gugatan dengan No. Registrasi 360/Pdt.G/2014/PN Sgr.

Dalam proses gugatan itu, Suryata Tanaya meminta agar pemerintah

membayar pokok utang dan denda sebesar 6 persen per tahun sejak gugatan didaftarkan. Suryata sebenarnya sempat kalah pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Belakangan, Suryata justru memenangkan sengketa perkara itu pada tingkat PK. (kmb38)



Bali Post/kmb38

Putu Karuna



Ketua Pengawas LPD Selat Terima Dihukum Setahun

SETELAH diberikan kesempatan seminggu ini menyikapi putusan hakim atas perkara korupsi di LPD Desa Pakraman Selat, Susut, Bangli, terdakwa I Made Rijasa, B.A. yang saat itu menjabat pengawas akhirnya menerima putusan hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Hal tersebut dijelaskan kuasa hukumnya, Ngakan Kompyang Dirga, Jumat (21/2) kemarin. Memang, pascadivonis bersalah dan dihukum setahun oleh majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi, Kamis (13/2) lalu, terdakwa bersama kuasa hukumnya memanfaatkan waktu sepekan untuk pikir-pikir menyikapi putusan itu. "Namun sekarang sudah menerimanya," tandas Kompyang Dirga.

I Made Rijasa, dalam kasus dugaan korupsi di LPD Desa Pakraman Selat, Susut, Bangli, dijatuhi pidana penjara selama satu tahun oleh hakim tipikor. Atas vonis itu, mantan Bandesa Adat Desa Pakraman Selat sekaligus mantan Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Selat itu kini sudah menerima. Dalam perkara ini, JPU I Ketut Kartika Widnyana dkk. menjerat terdakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana telah diubah dan ditambah UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atas dasar itu, jaksa dari Kejari Bangli itu menuntut supaya terdakwa dihukum selama 15 bulan, atau satu tahun tiga bulan. Selain itu juga membayar denda Rp 50 juta, subsidi tiga bulan kurungan.

Pada dakwaan dijelaskan, Rijasa merupakan orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta

melakukan perbuatan bersama-sama dengan Ni Luh Natariyantini (sudah dilakukan sidang) secara melawan hukum. Yakni membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan pendanaan LPD, kepada Pengelola Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PPK Kecamatan Susut, Bangli. Tujuannya penambahan modal LPD, dengan lampiran 21 nama calon peminjam sebesar Rp 300 juta.

Pinjaman itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 24 bulan, dengan sistem angsuran pokok dan bunga setiap bulannya. Namun, kata JPU di depan persidangan, terdakwa Rijasa bersama Ni Luh Natariyantini tidak pernah menyalurkan dana UEP yang dimaksud itu. Sehingga program untuk meningkatkan pelayanan kredit pada masyarakat miskin tidak terlaksana. Sebaliknya, kata jaksa, terdakwa justru memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Yakni memperkaya I Ketut Joko sebesar Rp 197.100.000, Nengah Dirsa Rp 30 juta beserta bunga deposito sebesar Rp 240 ribu, I Wayan Daging Rp 5 juta, Agus Pratama Rp 20 juta, Suwiti Rp 5 juta beserta bunga Rp 150 ribu. Jika dikalkulasi, bahwa negara dirugikan Rp 225 juta, sesuai audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

Dalam kesimpulannya, sebagaimana dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor Denpasar, dari pinjaman dana UEP-PKK senilai Rp 300 juta, dipotong administrasi Rp 600 ribu, maka I Made Rijasa selaku Ketua Badan Pengawas LPD, juga tahu dana Rp 299.400.000 itu, harusnya benar-benar disalurkan pada mereka, yang nama-namanya (21 orang) disebutkan dalam permohonan pendanaan LPD itu. (asa)



Audit Perusahaan Daerah Gabeng

Sekkab Tegaskan Dilakukan Secepatnya

NEGARA, Radar Jembrana—Rencana audit Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana masih gabeng. Padahal, pada Maret mendatang, masa jabatan direktur sudah berakhir. Di samping itu, audit menentukan nasib perusahaan plat merah tersebut ke depan.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan nasib Perusda. Termasuk, mantan karyawan yang belum mendapat gaji beberapa bulan, sebelum diberhentikan.

"Hingga saat ini, memang belum ada jadwal audit yang akan dilakukan Pemerintah



Secepatnya (Perusda Jembrana, Red) nanti diaudit."

I MADE SUDIADA
Sekkab Jembrana



Kabupaten (Pekab) Jembrana, terhadap kinerja Perusda Jembrana," kata Direktur Perusda Jembrana I Gusti Kade Kusuma Wijaya saat dikonfirmasi, kemarin.

Wijaya mengaku, sudah dihubungi Bagian Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Pekab Jembrana, untuk mempersiapkan laporan-laporan. Khususnya, terkait dengan Perusda. Termasuk keuan-

gan. "Mungkin, setelah Hari Raya Galungan ini, sudah diminta laporan," imbuhnya.

Sementara itu, Sekkab Jembrana I Made Sudiada mengatakan, audit terhadap Perusda Jembrana sudah tentu akan dilaksanakan. Namun, masih menunggu waktu yang tepat, untuk melakukan audit. Apalagi saat ini, terbentur dengan hari raya dan kegiatan pemerintahan lain.

"Secepatnya (Perusda Jembrana, Red) nanti diaudit,"

tegasnya.

Seperti diketahui, Perusda Jembrana bangkrut sejak usaha retribusi pasar dan parkir diambil alih pemerintah langsung melalui dinas terkait. Perusda mengandalkan usaha sedot WC dan percetakan.

Namun, hanya usaha sedot WC yang masih bertahan. Itu pun, dengan pendapatan kecil.

Karena bangkrut, karyawan Perusda dinonaktifkan. Perusahaan berdaiah tidak ada uang untuk membayar gaji. Sehingga, gaji selama beberapa bulan sebelum berhenti tidak dibayar. Padahal, sebelumnya beberapa karyawan sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Mereka diberhentikan, tanpa gaji dan hak lainnya.

Bagian Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Jembrana akan melakukan

audit menyeluruh terhadap Perusda Jembrana, sebelum melakukan perekrutan lagi direktur Perusda. Hasil audit terhadap kinerja direktur Perusda selama lima tahun menjabat, akan diaudit.

Hasil audit, nanti akan dilaporkan kepada Bupati Jembrana, agar membuat keputusan mengenai direktur Perusda. Apakah, perlu dilakukan perekrutan direktur lagi, atau memperpanjang masa jabatan direktur lama.

Rencananya, audit akan dilakukan tahun ini. Melibatkan pihak ketiga, sebagai auditor independen.

Hasil audit tersebut, juga menentukan nasib Perusda Jembrana ke depan. Apakah, akan dibubarkan atau tetap ada, meski dalam kondisi bangkrut. (bas/djo)



Bupati Artha Launching Gedung Baru RSU Negara

NEGARA, Radar Jembrana- Bupati Jembrana I Putu Artha meresmikan pemanfaatan gedung baru Rumah Sakit Umum (RSU) Negara. Pembangunannya, dikerjakan dengan anggaran APBD murni Jembrana Rp 179,3 miliar dengan sistem kontrak desain rancang bangun. Dilaksanakan sejak 2018 hingga 2019, kini pembangunannya telah rampung.

Launching berlangsung meriah, bertema; *Valentine*. Ini karena bertepatan dengan Hari Valentine (*Valentine's Day*), Jumat (14/2). Prosesi *launching* ditandai penandatanganan prasasti, pelepasan balon, serta penggungtingan pita oleh Bupati Artha, didampingi Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan, dengan dibangunnya beberapa fasilitas di RSU Negara ini, direktur, dan segenap jajarannya agar senantiasa menjaga dan merawatnya dengan baik. "Pembangunan gedung ini, menelan anggaran yang cukup besar. Itu semua bersumber dari APBD murni Kabupaten Jembrana. Untuk itu, saya minta kepada direktur dan segenap jajaran RSU Negara ini, untuk senantiasa menjaga dan merawatnya dengan baik. Sehingga, akan selalu memberikan suasana nyaman bagi

warga masyarakat. Terutama, para pasien," pinta Bupati.

Bupati menegaskan, dengan meningkatnya fasilitas pelayanan di RSU Negara ini, tentu pola pelayanan kepada masyarakat harus semakin baik. "Kami minta semua pasien mendapat perlakuan yang sama dari para petugas di RSU Negara ini. Tidak ada nanti pasien mendapat perlakuan diskriminatif.

Lakukan dan layani semua pasien dan masyarakat sesuai standar yang ada. Sehingga, kehadiran para pasien, khususnya warga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan akan merasa senang dan puas," katanya.

Terkait kebutuhan tenaga medis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana sekolahkan dokter umum menjadi dokter spesialis,

sesuai kebutuhan di RSU Negara. Sedangkan bidan dan perawat, sudah memadai. "Jika nanti mereka telah menyelesaikan sekolahnya, tentu akan kami tugaskan di RSU Negara kembali," jelasnya.

Direktur RSU Negara I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata dalam laporannya mengatakan, pembangunan RSU Negara ini dikerjakan selama 2

tahun, pada 2018 dan 2019. "Pembangunan ini dikerjakan dengan sistem kontrak dengan anggaran yang bersumber dari APBD murni Kabupaten Jembrana, dengan sistem kontrak desain rancang bangun tahun 2018-2019," rincinya.

Enam gedung baru yang dibangun, gedung IGD, pembangunan gedung poliklinik, gedung rawat inap untuk kelas 1, 2 dan 3, gedung rawat inap VIP, gedung instalasi bedah sentral, gedung laboratorium.

Gedung baru RSU Negara memiliki fasilitas lebih lengkap. Dengan penambahan gedung baru itu, total luas RSU Negara kini mencapai 3 hektare. Fasilitasnya, juga lebih lengkap karena memiliki fasilitas pelayanan kesehatan terkini. Di antaranya, di gedung IBS, sistem alur pasien sudah sesuai standar nasional, sistem pintu otomatis, ruangan OK menggunakan sistem hepa filter guna mengurangi infeksi.

Di ruang instalasi gawat darurat (IGD), kini juga lebih

luas dengan bangunan berlantai tiga. Ruang IGD dilengkapi ruang triage, ruang kebidanan, ruang dekontaminasi, ruang isolasi, ruang *ashma bay*, serta didukung ambulans yang siap siaga.

Keluhan sebelumnya, akan ketersediaan kamar rawat inap, juga coba diatasi dengan gedung baru rawat inap dan VIP. Kapasitasnya, kini memiliki 15 tempat tidur VVIP, serta 40 tempat tidur VIP. Sementara, Ruang Irna I, II, dan III memiliki daya tampung 149 *bed*. Bahkan fasilitas parkir RSU Negara, jauh lebih luas dari sebelumnya dengan pemusatan parkir terbagi dua. Yakni, di halaman depan, tepatnya di halaman gedung instalasi rawat jalan, dan parkir belakang dekat dengan ruang rawat inap pasien. (adv/bas/djo)



Serba Baru di RSUD Negara

✓
NEGARA, Radar Jembrana- Peresmian gedung baru Rumah Sakit Umum (RSU) Negara, merupakan tonggak bersejarah bagi Jembrana. Karena, dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil, dengan dana murni APBD Jembrana, mampu membuat bangunan rumah sakit megah dan fasilitas lengkap. Selesaiannya bangunan, merupakan salah satu capaian terpenting Bupati Jembrana I Putu Artha dan Wakil

tuk masyarakat Jembrana lebih baik. Baik dari segi bangunan fisik, fasilitas, sarana, prasarana, dan pelayanannya. "Kami minta semua pasien mendapat perlakuan yang sama dari para petugas di RSUD Negara ini. Tidak ada nanti pasien mendapat perlakuan diskriminatif. Lakukan dan layani semua pasien dan masyarakat sesuai standar yang ada. Sehingga, kehadiran para pasien, khususnya warga masyarakat yang ingin

Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mendisposisi para dokter umum untuk di sekolahkan menjadi dokter spesialis sesuai kebutuhan di RSUD Negara. Setelah lulus, nanti ditugaskan di RSUD Negara kembali. Selain gedung baru, sejumlah fasilitas baru. Memiliki enam gedung baru (poliklinik, IGD, Instalasi Bedah Sentral, ruang rawat inap, dan Ruang Rawat Inap Kelas I, II, III, serta laboratorium).

"Gedung baru ini, selain menambah fasilitas, juga motivasi bagi kami meningkatkan pelayanan kesehatan, sekaligus derajat kesehatan masyarakat Jembrana," kata Dirut RSUD Negara dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata.

Berdiri di lahan 3 hektare, fasilitasnya di gedung IBS, sistem alur pasien sesuai standar nasional, sistem pintu otomatis, ruangan OK menggunakan sistem hepa filter guna mengurangi infeksi. Di ruang IGD, kini juga lebih luas dengan bangunan berlantai tiga. Ruang IGD dilengkapi Ruang Triage, Kebidanan, Dekontaminasi, Isolasi, Ashma Bay, serta didukung ambulance yang siap siaga. Keluhan sebelumnya akan ketersediaan kamar rawat inap, diatasi dengan gedung baru rawat inap dan VIP. Kapasitasnya, memiliki 15 tempat tidur VVIP, serta 40 tempat tidur VIP. Sementara Ruang Irna I, II, dan III memiliki daya tampung 149 bed. (adv/bas/djo)



SIAP TINGKATKAN LAYANAN KE MASYARAKAT: Paramedis RSUD Negara kini ditunjang alata-alat kesehatan canggih.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan. Sebab, setahun terakhir, dalam 10 tahun mengabdikan dan melayani masyarakat Jembrana, mampu membangun rumah sakit umum un-

mendapatkan pelayanan kesehatan akan merasa senang dan puas," pinta Bupati Artha.

Terkait dengan kebutuhan tenaga medis, Bupati mengaku, kalau



Hakim Vonis Ketua Pengawas LPD Selat Setahun Penjara

SALING jawab antara jaksa dan tim kuasa hukum terdakwa I Made Rijasa, B.A. telah usai. Dalam kasus dugaan korupsi di LPD Desa Pakraman Selat, Susut, Bangli, Kamis (13/2) kemarin, majelis hakim Pengadilan Tipikor pimpinan Esthar Oktavi akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada I Made Rijasa. Apakah terdakwa menerima vonis tersebut?

Atas vonis itu, mantan Bandesa Adat Desa Pakraman Selat, sekaligus mantan Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Selat itu belum menyatakan sikap menerima maupun melakukan upaya hukum banding. "Kami pikir-pikir yang mulia," tandas kuasa hukum terdakwa, Ngakan Kompyang Dirga.

Sebelumnya, JPU I Ketut Kartika Widnyana dkk. menjerat terdakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atas dasar itu, jaksa Kejari Bangli itu menuntut supaya terdakwa dihukum 15 bulan, atau satu tahun tiga bulan. Selain itu juga membayar denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Soal pasal, hakim sependapat dengan jaksa, yakni menyatakan terdakwa bersalah. Namun soal lamanya pemidanaan, hakim menghukum terdakwa selama satu tahun, atau lebih rendah tiga bulan dari tuntutan jaksa.

Sebelumnya dalam dakwaan disebut, Rijasa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Ni Luh Natariyantini (sudah dilakukan sidang) tindakan



VONIS - I Made Rijasa, mantan Bandesa Adat Desa Pakraman Selat, sekaligus mantan Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Selat, Susut, Bangli, berkoordinasi dengan kuasa hukumnya Kompyang Dirga usai divonis 1 tahun penjara.

melawan hukum. Yakni membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan pendanaan LPD, kepada Pengelola Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PPK Kecamatan Susut, Bangli. Tujuannya penambahan modal LPD, dengan lampiran 21 nama calon peminjam sebesar Rp 300 juta.

Pinjaman itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 24 bulan, dengan sistem angsuran pokok dan bunga setiap bulannya. Namun, kata JPU di depan persidangan, terdakwa Rijasa ber-

sama Ni Luh Natariyantini tidak pernah menyalurkan dana UEP yang dimaksud. Sehingga program untuk meningkatkan pelayanan kredit kepada masyarakat miskin itu tidak terlaksana. Sebaliknya, kata jaksa, terdakwa justru memperkaya

diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Yakni memperkaya I Ketut Joko sebesar Rp 197.100.000, Nengah Diarsa Rp 30 juta beserta bunga deposito sebesar Rp 240 ribu, I Wayan Daging Rp 5 juta, Agus Pratama Rp 20 juta, Suwiti Rp 5 juta beserta

bunga Rp 150 ribu. Jika dikalkulasi, bahwa negara dirugikan Rp 225 juta, sesuai audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

Dalam kesimpulannya, sebagaimana dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor Denpasar, dari pinjaman dana

UEP-PPK senilai Rp 300 juta, dipotong administrasi Rp 600 ribu, maka I Made Rijasa selaku Ketua Badan Pengawas LPD juga tahu dana Rp 299.400.000, harusnya benar-benar disalurkan kepada mereka, yang namanya (21 orang) dise-

butkan dalam permohonan pendanaan LPD. Namun, kata jaksa, terdakwa selaku badan pengawas tidak memberikan petunjuk apa-apa kepada Ni Luh Natariyantini selaku Kepala LPD Selat, terkait penyaluran dana UEP yang benar. (asa)



Warga Sebut Penyelidikan Pungli Jalan Di Tempat

Minta Polda Ambil Alih Kasus

DENPASAR, Radar Bali-Pernyataan Kapolres Gianyar AKBP Dewa Adnyana dan Perbekel Melinggih terpilih I Nyoman Surata terkait preman pasar disayangkan pedagang yang menjadi korban pungli Kasna, 40. Sejumlah pedagang mengaku kesal karena I Kasna tidak ditahan polisi. Padahal, saat OTT berlangsung pada Sabtu lalu (1/2) diasedang memungut uang dari pedagang pasar senggol Payangan. Kasna yang tinggal di Banjar Griya, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan itu kepergok mengumpulkan uang pungli hingga Rp 7 juta.

Pedagang pun mempertanyakan aliran dana yang hingga kini belum diungkap polisi. Terkait pernyataan perbekel terpilih I Nyoman Surata, masyarakat menilai bahwa ia mengeluarkan

statmen untuk membela anak buahnya, Kasna. Pedagang meminta agar I Nyoman Surata dipanggil dan diperiksa polisi. Itu terkait uang hasil pungli yang dilakukan Kasna, diperuntukan untuk apa saja.

Kamis sore kemarin (13/2) sejumlah masyarakat Payangan kembali menunjukkan bukti foto terbaru terkait keberadaan Kasna. "Ini, pak fotonya yang kita jepret secara diam-diam. Dia (Kasna) nongol dengan parlente di pasar. Dia menggunakan baju desa lagi. Ia ke sana terkesan soksoan seperti manusia hebat dan kebal hukum. Nggak tahu dia pungut atau tidak, kalau di lapak kami, dia tidak pungut. Tapi bisa jadi ia diduga melakukan pungutan di lapak lain yang korbannya takut memberikan informasi," papar sumber koran ini sembari menunjukkan bukti foto dan bukti rekaman sejumlah pedagang mengenai pungutan liar itu di Denpasar.



KEMBALI BERAKSI: Preman pasar senggol Payangan I Kasna kembali meresahkan pedagang.

Sejumlah sumber yang memohon agar namanya tidak diberitakan demi keamanan ini pun menyayangkan pernyataan Kapolres Gianyar AKBP Dewa Adnyana. Sebab, Kapolres mengaku masih melakukan pendalaman. Sedangkan, masyarakat berang-

gapan bahwa buktinya sudah cukup untuk menahan I Kasna. Pasalnya, bukti uang pungutan hasil OTT mencapai Rp 7 juta dan bukti keterangan sejumlah saksi yang memberatkan Kasna sudah ada, setelah itu barulah melakukan pengembangan terkait aliran

dana. Harapan masyarakat, I Kasna ditahan akibat aksi pungli yang sudah dilakukannya sejak 2008. Akibat ditanggihkan, I Kasna diduga dipanggil oleh pihak desa dan dilakukan pertemuan tertutup beberapa waktu lalu. "Secara terbuka, kami meminta Perbekel terpilih Surata bebankan secara terang benderang di media, untuk apa aja hasil pungutan I Kasna. Dan, diapaikan saja dana desa selama ini. Harus transparanlah secara terperinci biayanya. Informasi yang beredar dana Bumdes kosong saat ini. Semoga pihak terkait bisa melakukan audit, baik pihak Tipikor dan BPK Kabupaten," ucap satu dari sejumlah pedagang.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pungli yang dilakukan Kasna, 40, mendapat tanggapan dari Kapolres Gianyar AKBP Dewa Adnyana, Selasa (11/2) lalu.

Adnyana menyatakan Kasna bukan dilepas. Namun, ditang-

guhkan. Dia mengatakan pengertian penangguhan itu bukan berarti yang bersangkutan dilepas. Melainkan masih dilakukan pendalaman. "Keseampingkan dulu bicara bahasa OTT (Operasi Tangkap Tangan, Red). Seolah-olah orang justifikasi melakukan itu," ujar Dewa Adnyana.

Lanjut Adnyana, polisi bertindak sesuai prosedur yang berlaku. "Kami profesional saja. Ada pendalaman yang lain, perlu kami lakukan," beber dia.

Ditanya soal aksi Kasna yang kembali memungut uang pedagang pasar senggol tanpa karcis, Adnyana mengaku masih didalami. "Itu kan bekerja bukan untuk diri sendiri. Ada proses. Ada pungutan," terangnya. Apakah terorganisir? Kapolres balik bertanya kepada wartawan. "Sekarang saya tanya, di Tirta Empul terorganisir gak?" ucapnya.

Seperti diketahui, kasus Tirta Empul ada kebijakan kapolda

dan gubernur. Termasuk OTT di tingkat desa lainnya saat itu ditanggihkan. "Saya sampaikan, jangan justifikasi. Lihat dulu permasalahannya. Hal yang sifatnya penyelidikan tak harus kami sampaikan. Kalau sudah jelas baru. Kalau disampaikan begini, kayak narkoba, disampaikan jar-ingannya, ya melaib (kabur, Red) orangnya," sambungnya.

Adnyana meminta dewasa dalam mengartikan kata penangguhan. "Kata lepas, bukannya orang tidak ditangani, padahal kasusnya berlanjut," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasna, 40, diamankan polisi pada Sabtu lalu (1/2). Dia ditangkap saat sedang memungut uang dari pedagang pasar senggol Payangan. Kasna yang tinggal di Banjar Griya, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan itu bisa mengumpulkan uang yang diduga hasil pungutan liar (pungli) hingga Rp 7 juta. (dre/dra/dot)



Dipraperadilan Kejari Denpasar

Buntut Keluarnya SKP2 Kasus Yayasan Al Ma'ruf

DENPASAR, Radar Bali - Keputusan Kejari Denpasar mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Denpasar Rp 200 juta untuk Yayasan Al-Ma'ruf, Denpasar berbuntut panjang. Pasalnya, Masyarakat Anti Korupsi (Maki) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan praperadilan atas

SKP2 tersebut.

Keputusan Maki dan LP3HI membawa ke meja hijau karena menilai kasus ini tidak patut dihentikan. Sebab, dalam kasus ini penyidik Polresta Denpasar telah menetapkan tiga tersangka. Bahkan, jaksa Kejari Denpasar yang mendampingi penyidikan menyatakan perkara ini sudah P-21 atau lengkap. Barang bukti dan tersangka juga sudah dilimpahkan ke Kejari Denpasar pada 6 September 2017.

Namun, entah ada angin apa, mendadak jaksa melakukan penelitian ulang berkas yang sudah dinyatakan lengkap. Ujungnya, pada Januari 2018

Selain itu, dalam Pasal 4 UU Tipikor secara tegas menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.”

JOHN KORASA

Wakil Pemohon Praperadilan

kasus ini dihentikan dengan terbitnya SKP2. Sidang praperadilan ini sudah bergulir Selasa (11/2) lalu. Sidang diket-

uai hakim I Made Pasek. Maki dan LP3HI sebagai pemohon meminta hakim menyatakan SKP2 yang diterbitkan Kejari Denpasar tidak sah, dan memerintahkan kejaksaan melimpahkan berkas dan tersangka ke Pengadilan Tipikor Denpasar, untuk disidangkan (dibuktikan).

Terkait alasan jaksa menerbitkan SKP2 karena tidak cukup bukti, karena tersangka sudah ada mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 200 juta, pihak pemohon menyebut pengembalian kerugian keuangan negara baru dilakukan setelah ada penetapan tersangka.

“Selain itu, dalam Pasal 4 UU Tipikor secara tegas menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana,” ujar John Korasa selaku wakil pemohon praperadilan. Menurut John, syarat formal dan materil yang disyaratkan kejaksaan sudah dipenuhi oleh penyidik Polresta.

Menanggapi praperadilan ini, Kasi Intel Kejari Denpasar Agung Ary Kesuma tak menyangkal. Dijelaskan, pihak yang mengajukan praperadilan adalah Boyamin Bin Saiman, dkk dari Maki; dan Arif Sahudi, dkk dari LP3HI. (san/yor)



Polisi Sebut Pelaku OTT Pungli Ditanggihkan

Perbekel Melinggih: Kasna Bukan Preman Senggol Payangan

GIANYAR, Radar Bali - Kasus dugaan pungli yang dilakukan Kasna, 40, yang sempat dileluhkan warga mendapat tanggapan dari Kapolres Gianyar AKBP Dewa Adnyana, Selasa (11/2).

Adnyana menyatakan Kasna bukan dilepas. Namun, ditanggihkan. Dia mengatakan pengertian penanggihan itu bukan berarti yang bersangkutan dilepas. Melainkan masih dilakukan pendalaman. "Kesampingkan dulu bicara bahasa OTT (Operasi Tangkap Tangan, Red). Seolah-olah orang justifikasi melakukan itu," ujar Dewa Adnyana.

Menurut Adnyana, Kasna diamankan lantaran ada surat dari perbekel dan bendesa. "Dari prosesnya ada kekeliruan, perlu kami dalam. Kalau ada kepentingan sendiri atau kelompok tertentu, ini yang sedang kami dalam," ucap dia.

Untuk proses hukum, lanjutnya, polisi diberikan kesempatan 1x24 jam untuk membuktikan. "Bukan berarti belum ditahan karena tidak bersalah. Kan pengadilan yang membuktikan," sambungnya.

Lanjut Adnyana, polisi bertindak sesuai prosedur yang berlaku. "Kami profesional saja. Ada pendalaman yang lain, perlu kami lakukan," beber dia.

Ditanya soal aksi Kasna yang kembali memungut uang pedagang pasar senggol tanpa karcis, Adnyana

mengaku masih dialami. "Itu kan bekerja bukan untuk diri sendiri. Ada proses. Ada pungutan," terangnya. Apakah terorganisir? Kapolres balik bertanya kepada wartawan. "Sekarang saya tanya, di Tirta Empul terorganisir gak?," ucapnya.

Seperti diketahui, kasus Tirta Empul ada kebijakan kapolda dan gubernur. Termasuk OTT di tingkat desa lainnya saat itu ditanggihkan. "Saya sampaikan, jangan justifikasi. Lihat dulu permasalahannya. Hal yang sifatnya penyelidikan tak harus kami sampaikan. Kalau sudah jelas baru. Kalau disampaikan begini, kayak narkoba, disampaikan jaringannya, ya *melaib* (kabur, Red) orangnya," sambungnya.

Adnyana meminta dewasa dalam mengartikan kata penanggihan. "Kata lepas, bukannya orang tidak ditangani, padahal kasusnya berlanjut," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasna, 40, diamankan polisi pada Sabtu lalu (1/2). Dia ditangkap saat sedang memungut uang dari pedagang pasar senggol Payangan. Kasna yang tinggal di Banjar Griya, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan itu bisa mengumpulkan uang yang diduga hasil pungutan liar (pungli) hingga Rp 7 juta.

Di bagian lain, perbekel Melinggih terpilih, I Nyoman Surata yang dulu sempat menjadi perbekel menyatakan jika Kasna bukan preman. "Dia ada penugasan khusus dari Bagian Badan Usaha Milik Desa. Selaku petugas pungut. Cuma nomornya saya lupa. Di dokumen ada," ujar Surata. Mengenai pungutan,

kata Surata, sudah dimuat dalam peraturan desa. Dia menjabarkan, setelah terbit UU No. 6 tahun 2014 ada penertiban mengenai sistem pengelolaan desa. "Terkait pendapatan asli desa. Artinya otonomi desa. Mengacu UU itu, ada kewenangan desa mengatur dan mengurus berdasarkan hak asal usul skala desa," jelasnya.

Maka sesuai permendagri dibentuklah Bumdes. "Ya inilah sebagai bagian dari usaha desa. Senggol ini masuk Bumdes mulai 2018. Sebelumnya itu murni pendapatan asli desa," bebernya.

Nama Kasna, kata Surata, itu muncul berdasarkan hasil rapat bersama DPD dan Kelian. Untuk pengelolaan diserahkan ke LPM di Bagian Keamanan. Kebetulan LPM itu atas nama Wayan Mudita. Selanjutnya Mudita diberikan kewenangan untuk merekrut pembantu dalam tugas di lapangan. "Termasuk salah satunya Kasna dimuat dalam SK itu. Intinya, kalau dari desa sudah serahkan ke LPM. Sesuai klausul yang dimuat," terangnya.

Surata menambahkan, per pedagang senggol dikenakan pungutan Rp 10 ribu per hari. Pungutan itu sudah berdasarkan hasil rapat bersama para pedagang. "Sesuai Perdes yang disetorkan ke desa, ada 65 persen dari pungutan. Potong biaya dan sebagainya," jelasnya.

Disinggung soal kasus bergulir, Surata menyerahkan sepenuhnya ke polisi. "Kalau *tiyang* sendiri tidak berani terlalu jauh. Kami serahkan ke kepolisian, karena ranah kepolisian. Berikan kepada penyidik," pungkasnya. (dra/dot)



Uang Pungutan Tak Dimasukkan Kas Desa

DENPASAR, *Radar Bali* - Sidang kasus korupsi uang pungutan pedagang kaki lima (PKL) dan toko Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, dengan terdakwa perbekel AA Ngurah Arwatha, 47, berlanjut di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (11/2). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gusti Ayu Rai Artini menghadirkan tiga saksi yang bertugas sebagai tukang pungut.

Mereka adalah I Made Suteja, Gusti Ngurah Ketut Bawa, dan I Made Yudi Putra. Tiga orang saksi yang juga sebagai petugas perlindungan masyarakat (linmas) itu kompak menyatakan tidak tahu uang hasil pungutan mengalir ke mana saja.

Dari sidang kemarin juga terungkap bahwa uang hasil pungutan tidak dimasukkan ke kas atau rekening desa. Sesuai aturan, uang pungutan semestinya masuk ke kas desa sebelum dimasukkan ke APBDes. "Kami setelah memungut dari pedagang, uang kami serahkan ke bendahara desa," ujar saksi Suteja di muka majelis hakim yang diketuai Angeleiky Handajani Day. Pernyataan Suteja diamini saksi Bawa dan Yudi. Sebagai tukang pungut, linmas dibagi menjadi tiga grup. Selanjutnya setiap grup mempunyai tugas memungut di wilayah yang sudah ditentukan.

Para saksi ini mengaku mengetahui uang pungutan sebelum disetor ke bendahara dipotong untuk uang transportasi atau uang bensin. Ketika JPU Artini menanyakan uang setelah diserahkan ke bendahara dipakai apa, ketiganya kompak menggelengkan kepala. "Kami tidak tahu kegunaan uang untuk apa," sahut saksi. "Termasuk uang dimasukkan ke kas desa atau tidak, saksi tidak tahu?" kejar JPU Artini. "Tidak," jawab ketiganya serempak.

Petugas linmas memberikan pungutan dengan cara memberikan karcis senilai Rp 3 ribu kepada para pedagang jika pembeli ramai. Jika pembeli sepi diberi karcis senilai Rp 2 ribu. "Bagaimana saksi tahu pedagang itu ramai atau sepi?" tanya JPU. "Pedagangnya yang bilang. Kalau hari ini sepi atau ramai. Kami percaya saja," tukasnya.

Karcis bertuliskan punia BUMDes itu dipungut setiap hari. Hasil pungutan kemudian disetorkan ke bendahara desa. Selain melakukan pungutan pada pedagang pasar, juga melakukan pungutan pada pengusaha toko dengan karcis kisaran Rp 15.000 - 250.000 tiap bulan per toko, tergantung jenis usaha. Petugas melakukan pungutan terhadap 27 - 30 pedagang dengan setoran Rp 125.000/hari atau sekitar Rp 3.000.000 per bulan.

Pada 2014 - 2016, terdakwa masih memasukkan pungutan ke dalam kas desa. Namun, sejak 2017 ketika Desa Pemecutan Kaja mendirikan BUMDes yang didirikan berdasar peraturan desa Nomor 3/2016 tanggal 1 Juni 2016. Pendapatan asli desa berdasar pungutan pedagang pasar dimasukkan ke dalam BUMDes.

Nah, dari sinilah perbuatan culas itu terjadi. Pendapatan yang bersumber dari pedagang yang sudah disetorkan ke bendahara desa, dalam periode Januari 2017 - Februari 2018 sebesar Rp 190.102.000 telah dijadikan "bancakan" kepala desa, aparat desa, dan anggota BPD desa sebesar Rp 117.509.500. Uang itu dijadikan tunjangan penghasilan kepala desa beserta jajarannya. (san/rid)



Dipangkas Anggaran Taman Baca

Padahal Pengadaan Lahan Tahun lalu Gagal karena Harga Taksiran Kemurahan

MANGUPURA, Radar Bali – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) Badung tahun 2019 merancang pembangunan perpustakaan outdoor atau taman baca di Kawasan Puspem Badung. Pembangunan taman baca tersebut belum bisa terwujud karena terkendala pembebasan lahan. Namun di tahun 2020 ini, kembali diajukan penganggaran dalam pembangunan taman baca tersebut.

Kepala Diskerpus Badung Ni Wayan Kristiani mengakui pembangunan taman baca be-

lum bisa dilakukan tahun 2019. Hal itu disebabkan karena pembebasan lahan tahun lalu batal dilakukan, karena pemilik lahan tidak setuju dengan nilai *appraisal*-nya (taksiran). "Namun kami akan mencoba lagi tahun ini. Semoga bisa terwujud," kata Kristiani, saat dikonfirmasi (10/2).

Tahun ini, Diskerpus kembali memasang anggaran untuk pembangunan taman baca tersebut. Terkait pengadaan tanah untuk perpustakaan out-

door (taman baca) tahun ini dianggarkan kembali dengan dana Rp5.845.000.000. Pihaknya berharap, rencana pengembangan taman baca ini dapat diwujudkan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Badung. "Kami ingin menghadirkan nuansa outdoor untuk para pemustaka. Semoga taman baca ini terwujud dan pemilik lahan setuju dengan nilai *appraisal*-nya," beber istri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa itu.



Kami ingin menghadirkan nuansa outdoor untuk para pemustaka. Semoga taman baca ini terwujud dan pemilik lahan setuju dengan nilai appraisal-nya."

NI WAYAN KRISTIANI

Kepala Diskerpus Badung

Secara terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Kaerasipan dan Perpustakaan, Diskerpus Badung I Wayan Sukerta menjelaskan, saat ini proses berlanjut dengan menjalin komunikasi dengan tim *appraisal*. Jika pada tahun 2019 tim *appraisal* telah bekerja dan menghasilkan nilai kisaran Rp145 juta per are. Namun pemilik lahan belum setuju, karena nilai itu dianggap rendah. Sedangkan Lahan yang dibutuhkan untuk membuat taman bacaan itu,

berkisar 15- 20 are. Sebelumnya pada tahun 2019, anggaran yang dipasang Rp 8 miliar lebih. Mengenai hal itu, Sukerta melihat harga tanah di pasar saat ini mengalami kelesuan, sehingga dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp5,8 miliar. "Nilai sesuai NJOP oleh Bapenda itu berkisar Rp 350 juta per are. Tapi melihat kondisi lahan, kemungkinan bisa di bawah harga itu. Jadi anggaran Rp 5,8 miliar itu cukup untuk pembebasan lahan," terangnya.

Imbuh Kristiani, terkait jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Badung tahun 2019 telah mencapai 15.115 orang. Sedangkan jumlah buku yang ada 55.141 judul buku. Namun di tahun 2019 ada penambahan layanan perpustakaan disabilitas dan layanan perpustakaan Bung Karno. "Juga ada penanaman pustaka gita atau perpustakaan ke laptop siswa SD sebanyak 100 siswa dan sisanya dilanjutkan tahun ini," pungkasnya. (dwi/yor)



Kena OTT Pungli Preman Pasar Tak Ditahan

Warga Minta Kapolda Usut Tuntas

DENPASAR, Radar Bali – Kinerja Polres Gianyar dipertanyakan oleh masyarakat. Itu terkait dengan penanganan kasus dugaan pungutan liar alias pungli yang dilakukan I Kasna, 40. Padahal, Kasna terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dia diduga melakukan pungli di Pasar Payangan pada Sabtu (1/2) lalu sekitar pukul 19.00. Nah, karena tak dijebloskan ke sel Polres Gianyar, Kasna kembali meneror warga pedagang. Dia dipergoki kembali beraksi melakukan pungli pada malam hari. Bahkan aksi Kasna terekam kamera warga. Karena resah, sejumlah warga Payangan mengeluhkan ulah preman pasar. Warga mempertanyakan kinerja Polres Gianyar yang terkesan cuek menangani preman pasar yang melakukan aksi pungli sejak tahun 2008 lalu. Yang membuat warga geram, preman pasar itu baru saja terkena OTT pekan lalu. Bahkan, I Kasna sempat diamankan polisi. "Anehnya kasus pungli kali ini kok pelakunya bisa dipulangkan. Aneh sekali, apakah Polres Gianyar takut sama preman, atau seperti apa. Kami juga nggak tahu. Kami berharap media memberitakan terkait preman pasar terjaring OTT pungli, bisa menyampaikan keluhan kami biar diketahui oleh Kapolda Bali bapak Petrus R Golose," kata salah satu warga Payangan yang memiliki lapak jualan di pasar saat ditemui di Denpasar, Senin (10/2) kemarin.

"Mas, kami memiliki bukti foto, tolong rahasiakan identitas kami demi keamanan. Kami mengambil foto I Kasna secara diam-diam ketika dia mengambil jatah preman di beberapa lapak pasar pada Jumat (7/2) sekitar pukul 20.00,"



PUNGLI: Preman pasar saat beraksi. Dia terekam kamera warga di pasar Payangan Jumat (7/1) malam lalu.

beber sumber ini sembari menunjukkan bukti foto saat Kasna melakukan pungutan liar.

Sambung sumber lain, I Kasna diketahui memiliki dua orang bos. Uang hasil pungutan terhadap puluhan lapak sehari mencapai Rp 700 sampai Rp 1, 2 juta itu nantinya disetorkan ke bos preman berinisial M. Dari bos preman, lanjut sumber ini, uang itu disetor lagi ke oknum bendesa berinisial S. "Nah, pungutan tanpa karcis ini bervariasi, ada lapak yang diminta setor Rp 10 ribu dan lainnya Rp 20 ribu. Ini pun tak jelas. Katanya untuk desa, tapi sejauh ini desa sendiri tidak transparan terkait dana pungutan," tambahnya.

Sumber yang keseharian sebagai pedagang ini meminta Kapolda Bali bisa tegas mengusut tuntas kasus tersebut. Sehingga terungkap aliran dana dari pungli itu digunakan untuk apa saja. "Ya, kami menaruh harapan bahwa melalui media masa atau alat pemantau publik atau juga alat penyambung lidah rakyat ini bisa diketahui bapak Kapolda Bali yang memiliki komitmen berantas preman dan narkoba. Biar bapak kapolda bisa turun tangan. Termasuk dari pihak tipikor termasuk BPK untuk menyelidiki dana desa yang sampai sejauh ini

Nah, pungutan tanpa karcis ini bervariasi, ada lapak yang diminta setor Rp 10 ribu dan lainnya Rp 20 ribu. Ini pun tak jelas. Katanya untuk desa, tapi sejauh ini desa sendiri tidak transparan terkait dana pungutan,"

Sumber, Warga Payangan Korban Pungli

masyarakat Payangan tidak tahu kegunaannya, mohon diselidiki," pintanya.

Sambung seorang lainnya bahwa baru pertama kali mereka mendengar atau mengetahui polisi melepas oknum preman dan berkeliaran bebas lalu meneror masyarakat dengan ulah yang sama. "Mas, setahu kami, pungli parkir hanya balasan ribu saja diproses hingga ke akar-akarnya. Apalagi ini, barang buktinya mencapai Rp 7 juta, preman lagi yang memang masyarakat Payangan semua tahu bahwa pelaku itu terkenal sebagai preman," ujar sumber.

Seperti diberitakan sebelumnya, I Kasna, 40, warga Banjar Griya, Desa Melinggih Payangan, Gianyar terjaring OTT di pasar pada Sabtu (1/2) sekitar pukul 07.00. Dari tangan preman ini petugas amankan uang hasil pungli diduga mencapai Rp 7 juta dan daftar nama pedagang. Aksi pungli ini sudah dilakukannya sejak 2008 lalu.

Sebelumnya ketika dikonfirmasi ke Kapolsek Payangan AKP Gde Sudyatmaja mengaku kasus itu ditangani langsung Polres Gianyar. Sedangkan Kapolres Gianyar AKBP Dewa Adnyana Irit berbicara. (dre/dot)



Target Naik, Kantong Parkir Malah Turun

■ **Retribusi Parkir**
Ditarget Rp 2,4 M
■ **Dishub hanya**
Kelola 12 Titik Parkir

SINGARAJA, Radar Bali - Pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir pada tahun 2020 ini, ditargetkan mencapai Rp 2,4 miliar. Target tersebut naik tipis, jika dibandingkan target tahun 2019 lalu yang sebesar Rp 2,3 miliar. Peningkatan target itu diberikan, saat keberadaan kantong parkir di Buleleng mengalami penurunan.

Dari 14 titik parkir khusus yang semula dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng, kini berkurang menjadi 12 titik saja. Sebanyak dua titik di antaranya kini telah dilepas dengan berbagai alasan.

Titik parkir khusus di RSUD Buleleng misalnya. Kini kantong parkir dikelola oleh RSUD Buleleng, karena statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga seluruh pelayanan yang berada di areal rumah sakit, termasuk layanan parkir, harus dikelola BLUD.

Titik parkir lainnya adalah Pasar Banyuasri. Tadinya titik parkir ini juga dikelola Dishub Buleleng. Namun karena ada relokasi pasar dan proses pembangunan, maka Dishub Buleleng tidak melakukan pemungutan parkir di sana.

"Kami belum hitung potensi *loss*-nya seberapa besar. Jelas akan berdampak, karena di sana parkir khusus. Potensinya besar. Kami akan upayakan langkah intensifikasi di kantong-kantong parkir lainnya," kata Kepala Dishub Buleleng Gede Gunawan AP, Minggu (9/2).

Lebih lanjut Gunawan mengatakan, Dishub Buleleng telah melakukan penyegaran pada 264 orang juru parkir, yang bekerjasama dengan pemerintah. Para juru parkir itu diminta melakukan langkah-langkah intensifikasi, sehingga pendapatan daerah bisa diraih dengan maksimal.

"Potensi-potensi yang ada, pasti kami optimalkan. Baik itu di parkir tepi jalan umum, maupun di titik parkir khusus. Nanti kita lihat seperti apa realisasi kedepannya seperti apa," imbuhnya. Sekadar diketahui, realisasi pendapatan dari sektor retribusi parkir di Buleleng mencapai Rp 2,329 miliar dari target Rp 2,3 miliar. Dari retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi yang diperoleh mencapai Rp 1,32 miliar, sementara untuk retribusi parkir khusus mencapai Rp 1,006 miliar. (eps/gup)



Februari, Kartu KIS-PBI Kembali Aktif

- Hasil Pembahasan Kerjasama Pemilik dan BPJS
- Darurat, Sementara Jadi Peserta Mandiri

SINGARAJA, Radar Bali - Warga pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) daerah rupanya harus bersabar. Mereka tak bisa menggunakan kartunya dalam waktu dekat ini. Sebab kartu-kartu itu baru akan aktif pada bulan Februari mendatang. Itu pun bila perjanjian kerjasama sudah tuntas ditandatangani.

Hingga kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Singaraja, masih melakukan pembahasan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah. Konsekuensinya, kartu-kartu yang sudah terlanjur dinonaktifkan, baru bisa diaktifkan bulan depan.

Kepala BPJS Singaraja Elly Widiani mengatakan, perjanjian kerjasama sebenarnya bisa saja diambil sesuai dengan skema

yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Entah itu skema kepesertaan yang menyesuaikan dengan anggaran, atau skema waktu yang menyesuaikan dengan anggaran.

"Kemarin kerjasama yang sudah ditandatangani itu kan kepesertaan yang menyesuaikan dengan anggaran. Kami akui itu memang cukup ramai eksesnya. Kalau nantinya mau diubah jadi waktu yang menyesuaikan anggaran, bisa saja," kata Elly melalui sambungan telepon, Selasa (7/1).

Menurut Elly, kini jumlah peserta jaminan sosial di Buleleng ada di angka 73 persen. Dampaknya, layanan prioritas seperti yang didapat saat Universal Health Coverage (UHC) tak didapat lagi. Warga pemegang KIS-PBI yang baru didaft-

arkan, tak bisa lagi langsung aktif kartunya.

"Kalau saat UHC, peserta itu bisa langsung aktif kartunya. Kalau sekarang tidak bisa. Baru bisa aktif di bulan berikutnya. Jadi setelah revisi perjanjian itu, ya baru bisa aktif terhitung pada bulan Februari nanti," kata Elly.

Bagaimana bila ada warga yang membutuhkan kartu itu dalam keadaan darurat? Elly mengatakan warga sebaiknya mendaftar sebagai peserta mandiri untuk sementara waktu. Bila nantinya perjanjian telah diperbarui, otomatis kartu itu akan dialihkan menjadi penerima bantuan iuran. Dengan catatan warga itu didaftarkan oleh pemerintah.

"Sebaiknya mendaftar di mandiri dulu. Nanti setelah addendum perjanjian dengan pemerintah daerah, dan namanya didaftarkan oleh pemerintah, otomatis beralih jadi penerima bantuan iuran," katanya lagi. (eps/gup)



M. BASIR/RADAR JEMBRANA

SUDAH P-21: Kasipidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra.

Berkas Lengkap, Jaksa Tunggu Tahap Dua

NEGARA, *Radar Jembrana*- Setelah terdakwa korupsi santunan kematian fiktif I Komang Budiarta, divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Denpasar, giliran tersangka Ni Luh Sridani dan Tumari akan disidang.

Berkas dua tersangka tersebut sudah lengkap atau P-21. Sehingga berkas dan tersangka akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana.

Kasipidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra mengatakan, pihaknya sudah memeriksa berkas perkara dua tersangka yang diserahkan penyidik Satreskrim Polres Jembrana. Dari hasil pemeriksaan berkas perkara, dinilai sudah lengkap. Semua unsur tindak pidana sudah memenuhi syarat untuk proses berikutnya. "Berkas dua tersangka sudah P-21, tinggal tunggu tahap duanya dari penyidik," tegasnya, kemarin (26/2). Berkas perkara dua tersangka, yakni; Ni Luh Sridani dan Tumari, terkait dengan tindak pidana korupsi santunan kematian fiktif. Dua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, Undang-Undang (UU) 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain dua tersangka tersebut, sebelumnya I Komang Budiarta, Indah Suryaningsih, I Gede Astawa, dan I Dewa Ketut Artawan, lebih dulu divonis bersalah dan ditahan di Rutan Kelas II B Negara. Total kerugian negara dari korupsi dari terpidana dan tersangka tersebut berdasarkan perhitungan kerugian negara BPKP Perwakilan Bali sebesar Rp 452,5 juta. Terpidana Indah sudah mengembalikan uang kerugian negara dan denda sebesar Rp 371 juta. (bas/djo)

Edisi : Kanis 27 Februari 2020

Hal : 8



Terancam Bangkrut, Dewan Desak Penyelamatan PD Pasar

SINGARAJA, Radar Bali - DPRD Buleleng mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah penyelamatan terhadap Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng. Salah satunya, mempertimbangkan kembali pengelolaan aset bangunan yang dilakukan oleh PD Pasar.

Pengelolaan aset bangunan dianggap sebagai biang kerok penyebab neraca keuangan PD Pasar selalu negatif. Sebab, perusahaan harus menanggung beban biaya penyusutan yang cukup besar setiap tahunnya. Apabila terus dibiarkan, maka perusahaan pun terancam gulung tikar.

Sebenarnya perusahaan dulunya tergolong sehat dan rutin menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun sejak mengelola aset, neraca keuangan secara hitung-hitungan akuntansi terus defisit. Sebab biaya penyusutan bangunan gedung harus dihitung setiap tahunnya.

Ketua Pansus Pasar DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, kondisi neraca di PD Pasar harus dicermati. Mengingat penyertaan modal di PD Pasar Buleleng cukup tinggi. Pemerintah disebut telah melakukan penyertaan modal

senilai Rp 350 miliar, dalam bentuk aset bangunan pasar. Aset bangunan itu yang kini dikelola PD Pasar.

"Kalau penyusutan aset itu secara hitungan akuntansi adalah 20 tahun, artinya *kan* dalam setahun harus menanggung penyusutan aset Rp 17 miliar. Itu (perusahaan) cari uang untuk menutupi penyusutan aset saja susah," kata Wandira saat ditemui di DPRD Buleleng, Selasa (25/2).

Salah satu jalan yang dapat ditempuh, menurut Wandira, ialah mengubah skema pengelolaan aset. Aset-aset yang kini dikelola PD Pasar,

kembali dikelola pemerintah. Selanjutnya PD Pasar bisa saja melakukan perjanjian sewa dengan pemerintah, sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang milik daerah.

"Kalau dengan mekanisme seperti ini, PD Pasar *kan* tidak perlu lagi menanggung biaya penyusutan gedung. Tinggal dicarikan dasar hukum dan skemanya saja. Perlu konsultasi juga dengan tim dari kejaksaan," imbuh politisi Golkar itu. (eps/gup)

SALAH KELOLA: DPRD Buleleng saat membahas soal kondisi PD Pasar bersama eksekutif.



Bupati Giri Prasta Kunjungi SMAN 2 Abiansemal

Pembangunan Lab dan Perpustakaan Harus Digarap Tahun Ini

ABIANSEMAL - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Senin (24/2) berkunjung ke SMAN 2 Abiansemal yang berlokasi di Br. Aseman, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal. Kunjungan ini guna melihat secara langsung bangunan sekolah yang baru selesai dibangun dan kini sudah menerima siswa baru kelas 10. Bupati juga bertatap muka langsung dengan seluruh siswa, para guru, pegawai, komite sekolah, orang tua siswa guna memberikan motivasi dan semangat untuk kemajuan SMAN 2 Abiansemal.

Turut mendampingi Bupati yakni, anggota DPRD Provinsi Bali I Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD Badung I Made Sumertha, I Nyoman Dirgayusa dan Ni Luh Putu Sekarini, Kadisdikpora Provinsi Bali Drs. Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Kadisdikpora Badung I Ketut Widia Astika, Camat Abiansemal IB Putu Mas Arimbawa beserta Tripika Kecamatan.

Dalam tatap muka tersebut, Bupati Giri

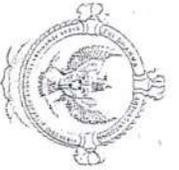
Prasta menekankan, pembangunan di bidang pendidikan sudah menjadi salah satu prioritas program pembangunan di Kabupaten Badung. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pendataan jumlah TK/PAUD dan SD di Badung termasuk jumlah siswa dan sarana dan prasarannya. Sehingga akan dapat diketahui berapa dibutuhkan sekolahan SMP dan SMA. Pembangunan SMAN 2 Abiansemal merupakan langkah konkret yang telah diwujudkan di tahun 2019 dengan anggaran APBD Badung sebesar 57,8 M lebih. Bangunan SMAN 2 sangat megah berlantai tiga dilengkapi dengan basemant. Sementara sarana prasara pendukung seperti Laboratorium, Perpustakaan dan penataan halaman sekolah akan segera dilaksanakan di tahun 2020 ini. "Saya pastikan Lab, Perpustakaan dan penataan sekolah digarap tahun ini dengan anggaran 14 miliar," tegas Bupati. Sementara terkait usulan

sekolah agar diwujudkan jalan tembus Sedang-Sibangkaja, karena saat ini akses masuk sekolah melewati perumahan, hal tersebut sangat diapresiasi dan Bupati sangat mendukung pembangunan jalan tersebut. "Terkait jalan tembus di Sibangkaja, kami minta agar dikoordinasikan dengan masyarakat yang harus dibeli kami juga siap membeli, namun dengan satu cacatan pembebasan lahan dilakukan oleh tim appraisal," tambah Bupati.

Kepada siswa, Bupati memberikan motivasi agar betul-betul membuat sebuah peninggalan/legacy di sekolah ini. Bupati menginginkan sebagai angkatan pertama di SMAN 2 Abiansemal, para siswa agar belajar dan menunjukkan kemampuan terbaik sehingga nantinya dapat berprestasi dan membawa nama baik sekolah, badung maupun bali di tingkat nasional. "Kami bangun sekolah ini karena rasa cinta dan

kasih sayang kami kepada anak-anak di Badung, khususnya di Abiansemal. Untuk itu sebagai generasi penerus, saya mau kalian jauh lebih pintar, karena nanti kalianlah yang akan meneruskan pembangunan di Kabupaten Badung dan Bali yang kita cintai," jelas Bupati.

Kepala Sekolah SMAN 2 Abiansemal I Made Kupasada menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Badung beserta anggota DPRD Provinsi Bali dan DPRD Badung serta dinas terkait di SMAN 2 Abiansemal. Pihaknya juga berterima kasih atas terbanggunya sekolah SMA di Desa Sedang ini. Sekolah ini dilengkapi dengan ruang kelas 27 kelas dan ruang utama serta dilengkapi dua basemant. Saat ini baru terisi 13 kelas dengan jumlah siswa 443 siswa. Rencananya di 2020 akan menerima siswa kembali sebanyak 11 kelas. (adv/dwi/dit)



Duh, Layanan PDAM Badung Parah

Kembali Dikeluhkan Warga karena Air Macet

MANGUPURA, Radar Bali - Pelayanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama Kabupaten Badung kerap menuai keluhan. Kali ini pelayanan perusahaan plat merah Badung itu dikeluhkan oleh warga Dalung, Kuta Utara. Karena beberapa bulan terakhir ini, air PDAM kerap mati.

Seperti disampaikan Arif Nugraha melalui akun media sosial Facebook, Minggu (23/2). Dalam statusnya, Arif menyatakan PDAM Badung parah dan dia kecewa akan pelayanan PDAM Badung.

"Parah PDAM Badung, khususnya wilayah Dalung, sangat kecewa air beberapa bulan ini selalu mati. Saya telepon ke PDAM alasannya selalu sama sedang ada perbaikan. Bantuan air pun tidak ada. Ke mana kah saya mesti mengeluh? Ada yang sama seperti saya nasibnya," tulis Arif dalam statusnya Facebook-nya.

Direktur Teknik (Dirtek) PDAM Tirta Mangutama, Kabupaten Badung, Wayan Suyasa ketika dikonfirmasi terpisah mengakui di beberapa wilayah di Badung, khususnya Dalung terjadi masalah suplay air. Hal ini disebabkan karena adanya kebocoran pada Bendungan Karet Tukad Penet.

"Kalau di Badung yang mengalami gangguan nantinya di daerah Dalung, Buduk,

Kalau di Badung yang mengalami gangguan nantinya di daerah Dalung, Buduk, Munggu, Tibubeneng, Canggu, Kerobokan, Legian, Seminyak, dan sekitarnya."

Wayan Suyasa
Direktur Teknik PDAM Badung

Munggu, Tibubeneng, Canggu, Kerobokan, Legian, Seminyak dan sekitarnya," aku Suyasa.

Pihaknya pun mengatakan untuk permasalahan tersebut sudah terjadi dari Jumat (21/2). Bahkan sudah dilakukan perbaikan. Hanya saja perbaikan berlangsung lama, dan diperkirakan akan normal kembali pada

Parah PDAM Badung, khususnya wilayah Dalung, sangat kecewa air beberapa bulan ini selalu mati. Saya telepon ke PDAM alasannya selalu sama sedang ada perbaikan. Bantuan air pun tidak ada. Ke mana kah saya mesti mengeluh."

Arif Santoso
Pelanggan PDAM Badung

Jumat (28/2) mendatang. "Ini perbaikannya dilakukan oleh pihak Provinsi. Tidak hanya di Badung yang bermasalah Denpasar juga bermasalah. Jadi kami minta permaklumannya kepada

pelanggan kami," jelasnya. Menyikapi keluhan pelanggan, Suyasa mengatakan akan menyiapkan air tangki untuk dikirimkan kepada pelanggan yang airnya mati. Pihaknya berharap pelanggan PDAM mengerti terkait permasalahan tersebut. Untuk daerah Kerobokan Kelod, Legian, Seminyak dan sekitarnya PDAM akan menyalurkan dari sistem tiga estuary. Sementara keluhan di Dalung, pihaknya mengaku akan mensuplay dari IPA Blusung. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap air bersih bisa terpenuhi. "Kami nanti suplay dari Blusung perindustriannya dilakukan dengan mobil tangki yang dilakukan pada pagi dan sore hari," pungkasnya. (dwi/yor)



Warga Mengeluh Air PDAM di Dalung Mati Sejak Sebulan

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Pelayanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama Badung kembali mendapat keluhan. Warga asal Dalung, Kuta Utara Badung mengeluh lantaran air PDAM mati sejak sebulan ini.

Kekecewaan itu pun diungkapkan oleh akun facebook atas nama Arif Nugraha. Dalam status yang ia unggah, Minggu (23/2), pemilik akun menyampaikan kekecewannya. Ia mengaku bingung harus mengadu kepada siapa.

"Parah PDAM Badung khususnya wilayah Dalung, sangat kecewa air beberapa bulan ini selalu mati. Saya telepon ke PDAM alasannya selalu sama sedang ada perbaikan. Bantuan air pun tidak ada. Kemana saya mesti mengeluh? Ada yang sama seperti saya nasibnya?," tulis pemilik akun tersebut.

Direktur Teknik (Dirtek) PDAM Tirta Mangutama, Kabupaten Badung, Wayan Suyasa mengakui sejumlah wilayah di Badung khususnya Dalung memang terjadi masa-

lah air. Penyebabnya karena adanya kebocoran Bendungan Karet Tukad Penet.

"Kalau di Badung yang mengalami gangguan nantinya di daerah Dalung, Buduk, Munggu, Tibubeneng, Cangu, Kerobokan, Legian Seminyak dan Sekitarnya," ungkap Suyasa.

Permasalahan ini sudah terjadi dari Jumat (21/2). Kata dia sudah dilakukan perbaikan. Hanya saja perbaikan berlangsung lama dan diperkirakan akan normal kembali pada Jumat (28/2).

"Ini perbaikannya dilakukan oleh pihak Provinsi. Tidak hanya di Badung yang bermasalah Denpasar juga bermasalah. Jadi kami minta permaklumannya kepada pelanggan kami," jelasnya.

Dari surat pemberitahuan Provinsi Bali, Bendung Karet Tukad Penet mengalami kebocoran yang cukup besar. Sehingga mengakibatkan Bendung Karet hanya mampu bertahan satu jam setelah dipompa.

Hal itu pun membuat air tidak bisa dibendung dan air

tidak masuk ke mulut intake sehingga produksi IPA Panet berhenti dan distribusi ke PDAM Badung dan PDAM Denpasar dihentikan.

Disinggung mengenai pelayanan yang diberikan PDAM menyikapi masalah tersebut, Suyasa mengaku akan menyiapkan air tangki untuk dikirimkan kepada pelanggan yang airnya mati. Pihaknya kembali berharap pelanggan PDAM mengerti terkait permasalahan tersebut.

"Kami akan berikan air tangki pada pelanggan kami. Untuk daerah Kerobokan Kelod, Legian, Seminyak dan sekitarnya kami suport dari sistem tiga estuary," jelasnya.

Lalu bagaimana mengenai keluhan di Dalung? pihaknya mengaku akan mensuplai dari Blusung sehingga kebutuhan masyarakat terhadap air bersih bisa terpenuhi. "Kami nanti suplai dari Blusung perindustriannya dilakukan dengan mobil tangki yang dilakukan pada pagi dan sore hari," pungkasnya. (gus)



Senderan Jebol, Jembatan Subagan - Asak Ditutup

● Hanya Bisa Dilewati Pejalan Kaki, Pemotor Harus Mengambil Jalan Memutar

AMLAPURA, TRIBUN BALI

Jembatan darurat yang menghubungkan Subagan menuju Desa Asak, Kecamatan Karangasem tak bisa dilalui. Senderan di bagian Timur jebol sepanjang dua meter, sehingga pengendara khawatir melintas di jembatan yang terbuat dari kayu kelapa itu.

Made Lemu, warga Subagan menjelaskan, jembatan darurat tidak lagi digunakan lantaran tanah di bagian Timur tergerus air sungai, hingga mengakibatkan jebol. Kondisi ini terjadi sejak 2 hari lalu, dan sudah dianggap membahayakan. Pengendara yang melintas untuk sementara memutar melalui jalan alternatif.

"Kendaraan roda 2 sekarang nggak bisa melintas, khawatir jembatan daruratnya amblas. Sementara jembatan darurat hanya bisa dilalui pejalan kaki. Seperti petani, atau warga yang mencari pakan ternak," kata Made Lemu di sekitar lokasi

jembatan, Minggu (23/2).

Made Lemu menjelaskan, warga Subagan yang hendak ke sawah biasanya berjalan kaki. Sepeda motornya diparkir di bagian Timur jembatan untuk mempercepat aktivitas. "Kalau menggunakan sepeda motor muter. Harus lewat Bungaya, atau lewat Perasi, Timrah, dan Asak," jelas Made Lemu.

Warga berharap, Pemkab Karangasem segera memperbaiki jembatan darurat tersebut. Mengganti dengan jembatan permanen, mengingat jembatan sudah hampir setahun putus lantaran diterjang aliran sungai yang deras.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karangasem, Nyoman Sutirtayasa mengakui, senderan jembatan darurat jebol pada Jumat (21/2). Senderan yang jebol merupakan tumpuan jembatan. Petugas sudah memasang police line, serta spanduk larangan untuk melintas agar tidak jatuh

korban.

"Sementara kita tutup dulu. Khawatirnya saat kendaraan melintas membuat getaran dan tekanan, sehingga senderan jebol lagi. Dan membuat tumpuan jembatan jatuh," kata Nyoman Sutirtayasa.

Jembatan Subagan menuju Asak ini akan diperbaiki tahun 2020. Anggaran sekitar Rp 1,6 miliar dari APBD Induk 2020. Sekarang masih proses tender. Setelah ada pemenang tender, jembatan langsung digarap. Selama pengerjaan, jembatan akan ditutup. Pengendara diminta melewati jalan lain untuk sementara waktu.

Dinas PUPR Karangasem akan membangun jembatan di beberapa lokasi. Di antaranya Jembatan Tukad Pangiriman di Antiga, Kecamatan Manggis. Jembatan Temukus di Besakih, Kecamatan Rendang. Jembatan Butus, Kecamatan Bebandem, dan jembatan sekitar daerah Batudawa. **(ful)**

Edisi : Senin, 24 Februari 2020

Hal : 5



Bupati Giri Prasta Serahkan Dana Motivasi Ogoh-Ogoh Tahun 2020

● Sebut Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bali

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Suiasa mengumpulkan Ketua Sekaa Teruna dan Yowana se-Kabupaten Badung yang berjumlah 563 Seka, Senin (17/2). Mereka dikumpulkan di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung dalam rangka penyerahan dana motivasi Ogoh-ogoh tahun 2020 yang besarnya Rp 40 juta per Sekaa Teruna.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Giri Prasta memberikan pengarahannya kepada Ketua Sekaa Teruna untuk mengelola dana yang disalurkan oleh Pemkab Badung dengan cermat tepat dan transparan guna meningkatkan kreativitas Sekaa Teruna dalam melestarikan seni tradisi dan budaya Bali.

"Kami selaku Pemerintah Kabupaten Badung selalu berusaha menjaga dan melestarikan budaya Bali, salah satunya dengan menyerahkan dana bantuan ogoh-ogoh dalam menyambut hari raya Nyepi tahun Caka 1942. Dengan bantuan dana ini saya

berharap, Sekaa Teruna mampu meningkatkan kreativitas di bidang seni dan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Mengingat Sekaa Teruna sebagai generasi penerus dalam melestarikan desa adat. Saya mengajak adik-adik Sekaa Teruna se-Kabupaten Badung untuk ikut partisipasi aktif dalam melaksanakan segala program yang dicanangkan Pemkab Badung, utamanya dalam bidang adat seni agama dan budaya, agar bisa lestari selamanya," ujar Giri Prasta.

Usaha dalam melestarikan budaya Bali sangat perlu dilaksanakan mengingat pariwisata kita yang ada di Bali dan Badung khususnya didasari oleh budaya Bali yang unik dan adi luhung yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi nafas dan jiwa dari pariwisata adalah budaya itu sendiri. Itulah yang mendasari Pemkab Badung sangat konsen dalam hal pelestarian budaya selama ini, bahkan masuk dalam program prioritas PPNSB.



"Mengingat Adik-adik Sekaa Teruna sebagai anaknya Banjar, oleh karena itu saya minta agar Sekaa Teruna mengambil bagian dan berperan aktif dalam meneruskan warisan adat dan budaya di masing-masing desa adat demi ajegnya agama Hindu dan NKRI. Karena kedua hal tersebut menjadi inti dari budaya Bali," imbuhnya.

Bupati Giri Prasta juga menekankan Sekaa Teruna agar menjalankan catur Brata penyepian dan menghindari

perbuatan mabuk-mabukan maupun tindakan lainnya yang berpotensi membuat gadu-gaduan di tengah masyarakat. Sehingga perayaan hari raya Nyepi di Kabupaten Badung bisa berjalan dengan tertib dan hikmat.

Sekaa Teruna sebagai generasi penerus pembangunan Badung diminta cerdas dan aktif dalam mengelola informasi di tengah masyarakat dengan ikut terlibat dalam kelompok informasi masyarakat. (adv/gus)



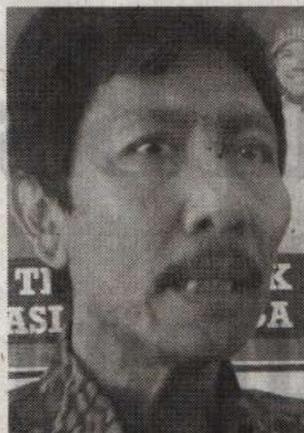
Pemkab Buleleng Kucurkan Rp 7M Bonus Atlet Porprov

● Peraih Satu Emas Dapat Rp 50 Juta

SINGARAJA, TRIBUN BALI - Bonus untuk atlet Buleleng yang berhasil meraih medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali 2019 di Tabanan cair. Bonus diberikan oleh Pemkab Buleleng melalui APBD dengan anggaran hingga sebesar Rp 7,052 miliar.

Ketua Umum KONI Buleleng, Nyoman Arta Widnyana, Senin (17/2) mengatakan, bonus tersebut sudah cair pada Jumat (14/2) saat perayaan valentine. Dimana, untuk atlet perorangan peraih satu medali emas menerima bonus Rp 50 juta. Sementara ganda atau doble yang berhasil meraih satu medali emas dapat Rp 55 juta, beregu 3 sampai enam orang untuk satu medali emas Rp 60 juta, dan beregu lebih dari enam orang untuk satu medali emas Rp 65 juta.

Tak hanya emas, atlet yang berhasil meraih medali perak juga diberikan bonus. Atlet perorangan yang mendapatkan medali perak diberi bonus Rp 22 juta. Kemudian



TRIBUN BALI/RATU AYU

NYOMAN ARTA WIDNYANA

ganda atau doble yang berhasil meraih satu medali perak dapat Rp 24 juta, beregu 3 sampai enam orang untuk satu medali perak Rp 26 juta, dan beregu lebih dari enam orang untuk satu medali perak Rp 28 juta.

Demikian pula dengan atlet yang meraih medali perunggu. Pemkab memberikan bonus Rp 11 juta untuk perorangan, Rp 13 juta untuk ganda atau doble, Rp 15

juta untuk beregu 3 sampai 6 orang, dan Rp 17 juta untuk beregu lebih dari enam orang. Total anggaran yang dikucurkan untuk bonus para atlet sebesar Rp 5,243 miliar.

Tak hanya atlet, para pelatih atau manager tim juga kecipratan bonus. Pemkab menggelontorkan anggaran hingga Rp 1,809.000.000. "Saat Porprov kemarin, Buleleng berhasil meraih 55 medali emas, 52 medali perak dan 82 medali perunggu," kata Nyoman Arta.

Arta menjelaskan, bonus ini diberikan sebagai ucapan terima kasih pemerintah kepada putra-putri Buleleng yang telah berhasil mengharumkan nama Bumi Panji Sakti di ajang yang cukup bergengsi. "Kami bersyukur Buleleng mampu meraih peringkat ketiga. Ini sungguh luar biasa, perjuangan yang cukup panjang. Kedepan kami harap seluruh cabang olahraga bisa bangkit lagi untuk mengharumkan nama Buleleng," tutupnya. (rtu)

Edisi : Selasa, 18 Februari 2020

Hal : 4



Dana Bencana Dipangkas Rp 300 Juta

AMLAPURA, TRIBUN BALI

- Anggaran tanggap bencana pos emergency service respons, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem dipangkas hingga 38 persen. Pada 2019, anggaran pos emergency service mencapai Rp 800 juta lebih. Tahun 2020 ini, tinggal Rp 500 juta. Turun Rp 300 juta.

Kasi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Karangasem, Ni Wayan Asmi Sukmawati menjelaskan, penurunan

dana kebencanaan dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun, sehingga beberapa kegiatan dikurangi. "Beberapa OPD lain juga banyak dikurangi," jelas Asmi, Minggu (16/2).

"Anggaran tanggap bencana pos emergency service respons untuk tangani saat terjadi bencana. Misalnya untuk penanganan longsor, pohon tumbang, dan banjir. Untuk sosialisasi dan mitigasi bencana, anggarannya beda lagi," tambah Asmi.

Bagi BPBD, penurunan anggaran pos emergency service respons sangat disayangkan. Mengingat, Karangasem berada di urutan pertama daerah risiko bencana di Bali. Sedangkan di nasional, berada di urutan 93 daerah rawan bencana.

Topografi wilayah di Karangasem bervariasi. Bumi Lahar memiliki daerah lautan, bebukitan, dan gunung. Karangasem juga daerah yang dilalui patahan (sesar). Patahan menyisir pesisir pan-

tai di Karangasem. Kondisi ini berimbas pada gempa seandainya patahan sesar ini bergerak cepat.

"Dalam setahun bencana di Karangasem bisa capai 200 - 300 kasus. Meliputi longsor, pohon tumbang, banjir, hingga ari laut pasang dan masuk ke permukiman warga," jelas Asmi.

Anggaran yang ada akan digunakan seirit mungkin, dan akan dimaksimalkan untuk penanganan kebencanaannya. (ful)



RADAR BALI TRIBUN BALI BALI POST NUSA BALI

^v Anggaran Turun Rp 200 Juta

DINAS Kesehatan Tabanan menyatakan lebih gencar melakukan pencegahan penyakit menular dengan kegiatan penyuluhan, menggerakkan juru pemantau jentik (Jumantik), serta kegiatan di sekolah-sekolah melalui Jumantik junior.

Ketika ada kasus, diharapkan segera melapor agar cepat dilakukan fogging. Untuk tahun 2020 ini, anggaran fogging serta operasionalnya mencapai Rp 800 juta. Anggaran ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1 miliar.

Kadis Kesehatan Tabanan, dr Nyoman Suratmika menyatakan, kegiatan fogging akan dilakukan jika ditemukan kasus. Sistemnya adalah ketika ada laporan akan segera ditindaklanjuti dengan pengecekan oleh petugas ke lapangan atau tempat tinggal warga yang terserang DBD. Kemudian, petugas akan melakukan pemantauan di radius 100 meter persegi dari pasien untuk melihat penyebabnya.

Setelah lengkap, barulah petugas melakukan fogging. Kegiatan penyemprotan asap tersebut akan dilakukan pada pagi atau sore hari karena harus menghindari angin kencang. Sehingga, kegiatan fogging akan lebih maksimal.

"Jadi kami tidak asal fogging saja, melainkan ada pengecekan terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita bergerak dua kali. Yakni satu kali di awal dan kedua di pekan depannya. Anggaran fogging selama setahun adalah Rp 800 juta, itu untuk obat dan upah petugasnya karena mereka bukan PNS," ucapnya. (mpa)

Edisi : Senin, 17 Februari 2020

Hal : 5



Warga Waswas

Saat Melintas

■ Jalan Kemuning - Nangka Nyaris Putus ■ Saat Hujan, Siswa Pilih Libur Takut Jadi Korban

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Warga yang melintas di Banjar Dinas Kemuning dan Banjar Nangka, Desa Bhuana Giri, Bebandem, Karangasem harus ekstra hati-hati. Sebab, jalan penghubung kedua banjar terancam putus lantaran tergerus aliran air sungai. Kondisi jalanan juga berlubang. Sederan bagian bawah tergerus cukup dalam.

Wayan Putra yang sering melintas di daerah itu mengungkapkan, jalan utama warga dari Kemuning ke Nangka itu sudah tergerus sejak satu tahun lalu. Kondisi jalan semakin parah setelah diterjang banjir bandang seminggu yang lalu. Volume air di Sungai Daksu meningkat. Arus sungai seminggu lalu dari hulu sangat deras.

"Ini akses warga Nangka saat ke Kemuning. Jalan ini akses utama warga saat bersekolah dan bersembahyang. Dilalui warga dan kendaraan roda dua baik saat sembahyang ke Pura Penataran Agung Nangka, maupun mengantar anak sekolah," papar Wayan Putra, Rabu (12/2).

Saat hujan turun, jalanan sama sekali tak bisa dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Debit air sungai meningkat dan mengalir deras. Warga takut dan khawatir melintas. Siswa pun terpaksa meliburkan diri dari sekolah lantaran takut melintas. Jalanan ini hanya bisa dilalui saat musim kemarau dan kering.

Sekretaris Pecalang Desa Adat Nangka, I Made Junita menambahkan, bagi warga

Kemuning, jalan yang melalui Sungai Daksu itu adalah akses cepat menuju Nangka. Jaraknya hanya 1 Km dan ditempuh sekitar 10 menit. Begitu sebaliknya, siswa asal Nangka yang sekolah di SDN 3 Bhuana Giri lebih dekat.

Jika lewat jalan alternatif, jarak yang ditempuh diperkirakan sekitar 10 kilometer. Waktu yang diperlukan lebih dari 30 menit.

"Warga rutin gotong royong memperbaiki jalan setelah banjir bandang. Tujuannya biar jalan bisa dilalui kendaraan," tambah Junita.

Karena itu, warga berharap Pemkab Karangasem segera membangun jalan itu, sehingga aktivitas masyarakat berjalan lancar, tak terhambat dan waswas. Karena kondisi saat ini, berdampak pada perekonomian warga. Aktivitas warga tersendat saat musim hujan, pendidikan berjalan tak seperti yang diinginkan.

Perbekel Bhuana Giri, Nengah Diarsa mengatakan, banjir bandang yang terjadi minggu lalu, mengakibatkan jalanan rusak parah. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Karangasem untuk meratakan bebatuan di sekitar aliran Sungai Daksu.

"Makanya kemarin dari Dinas PUPR menurunkan alat berat untuk meratakan bebatuan di sekitar sungai. Sampai sekarang Dinas PUPR menempatkan alat berat dekat sungai untuk meratakan bebatuan saat banjir bandang menerjang," kata Diarsa. (ful)

Masih dalam Masa Pemeliharaan

KABID Bina Marga, Dinas PUPR Karangasem, I Wayan Suraja Jaya mengatakan, jalan yang menghubungkan Kemuning dengan Nangka sudah diperbaiki pada tahun 2019. Anggaran

nya Rp 1,3 milliar lebih, dari APBD Karangasem.

Panjang jalan yang diperbaiki sekitar 1 kilometer. Saat ini jalan rusak karena diterjang banjir bandang. Namun ma-

sih dalam masa pemeliharaan, selama 180 hari kalender.

"Sudah kami koordinasikan dengan rekanan untuk diperbaiki, karena masih masa pemeliharaan. Katanya se-

cepatnya akan diperbaiki. Untuk waktu belum dipastikan," kata Wayan Surata Jaya yang mantan Kasi Peningkatan Jalan di Dinas PUPR Karangasem. (ful)

Edisi : Kamis 13 Februari 2020.

Hal : 5



Upacara Melaspas Madya Dihadiri Wabup Suiasa

● **Pemkab Badung Rampungkan Restorasi Pura Luhur Giri Kusuma Blahkiuh**

PEMERINTAH Kabupaten Badung merampungkan pembangunan/restorasi Pura Kahyangan Jagat Luhur Giri Kusuma di Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal. Rampungnya restorasi pura yang masuk dalam salah satu cagar budaya tersebut, dilaksanakan upacara pemelaspas sebagai upaya penyucian bangunan, Minggu (9/2).

Upacara melaspas madya yang dipuput Ida Pedanda Gria Carangsari ini dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. Turut hadir anggota DPRD Badung asal Blahkiuh I Gst Ngurah Sakhara, Camat Abiansemal IB Putu Mas Arimbawa yang juga Pj Perbekel Blahkiuh, Ketua PHDI Badung Gede Rudia Adiputra, Polres Badung, Bendesa Adat Blahkiuh IB Bajra serta tokoh masyarakat setempat.

Pura Luhur Giri Kusuma yang berstatus Pura Kah-

yang Jagat ini mendapat bantuan dana Pemkab Badung untuk restorasi di tahun anggaran 2019, dengan nilai Rp 5 miliar.

"Seluruh bangunan pelinggih termasuk kori agung, bale kulkul dan tembok penyengker telah selesai diperbaiki, serta penataan kolam yang mengitari pura," ujar Wabup Suiasa.

Wabup Suiasa merasa senang dapat melihat bangunan Pura Luhur Giri Kusuma yang telah berhasil direstorasi dan dibangun kembali seperti semula. Dukungan pemerintah ini sebagai bentuk komitmen dalam upaya melestarikan seni, adat, agama dan budaya yang telah menjadi salah satu prioritas program pembangunan di Kabupaten Badung.

"Diharapkan, masyarakat Blahkiuh, khususnya, selalu merawat pura ini dengan baik, selalu ingat/eling dan



nggrastiti bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang berstana di Pura Luhur Giri Kusuma, terlebih pura ini telah masuk cagar budaya," katanya.

Bendesa Blahkiuh, IB Bajra atas nama krama Desa Adat Blahkiuh menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah membantu pembangunan restorasi Pura Luhur Giri Kusuma. Dengan selesai resto-

rasi, dilanjutkan dengan upacara Melaspas Madya. Dan pada piodalan mendatang direncanakan melaksanakan karya dengan tingkatan yang lebih besar.

Dijelaskan, keberadaan Pura Luhur Giri Kusuma, berdasarkan Purana Wana Sari. Diceritakan, sekitar abad ke-13 ada sekelompok krama tinggal di selatan Alas Sari (Sangheh) dengan pekerjaannya berburu. (adv/gus)



PDAM Gianyar Akan Jual Minuman dalam Kemasan

- Proses Perizinan Tinggal Menunggu Dirjen Definitif

GIANYAR, TRIBUN BALI

- PDAM Gianyar, masih terkendala izin dari Pemerintah Pusat terkait pengolahan air mineral dalam kemasan. Proses pencarian izin ini dinilai akan membutuhkan waktu lama.

Sebab pejabat yang menangani perizinan di Dirjen Suber Daya Air Kementerian PUPR, masih berstatus pelaksana harian (plh). Sementara, izin hanya berhak dikeluarkan oleh pejabat definitif.

Sebelumnya, pada November 2019, DPRD Gianyar dan Pemkab Gianyar menyetujui permintaan penyertaan modal PDAM Gianyar. Penyertaan modal tersebut sebesar Rp 44 miliar.

Dana yang bersumber dari APBD Gianyar ini, dialokasikan untuk berbagai item. Seperti Rp 15 miliar untuk menggratiskan penggunaan air bagi masyarakat miskin. Sebesar Rp 19 miliar untuk investasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Lokasi pabrik yang akan dikelola PDAM Gianyar ini, berada di Desa Bukian, Kecamatan Payangan. Sementara dana lainnya, digunakan untuk perbaikan pelayanan air ke masyarakat.

Direktur Utama PDAM Gianyar, Made Sastra Kencana mengatakan, rekomendasi teknis AMDK ini sudah keluar. Saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu izin dari Dirjen Sumber Daya Air.

"Kami masih nunggu izin dari pusat. Proses pemberian izin masih terkendala, karena pejabat yang bersangkutan tidak berstatus definitif. Tapi kami sudah dapat lampu hijau karena rekomendasi teknis sudah keluar. Setelah ada pejabat definitif, semuanya aman," ujarnya, Minggu (9/2).

Sastra menargetkan, tahun 2020 ini AMDK sudah bisa dilakukan uji coba kualitas air minum yang akan dijual secara kemasan. Sementara untuk pendistribusian, pihaknya menargetkan dilakukan tahun 2021 mendatang.

Menurut Sastra, proses



Kami masih nunggu izin dari pusat. Proses pemberian izin masih terkendala, karena pejabat yang bersangkutan tidak berstatus definitif

Made Sastra Kencana

Direktur Utama PDAM Gianyar

yang membutuhkan waktu lama adalah proses pencucian mesin. Dimana pihaknya membutuhkan waktu sampai tiga bulan, agar mesin besar-besaran steril, dan seluk-seluk mesin bisa diketahui.

"Kami perkirakan pertengahan 2021 nanti, proses pendistribusian AMDK ini baru bisa berjalan, karena kami membutuhkan proses panjang dalam mencuci mesin," ujarnya.

Terkait pembangunan pabrik AMDK ini, Sastra mengatakan, hal tersebut digarap oleh tiga instansi. Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Gianyar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Gianyar, dan pihaknya sendiri.

Peran PUPR dalam hal ini adalah menyediakan gedung produksi. Intek, pembangunan reservoir hingga pemasangan jaringan pipa. "Disperindag bertugas menyiapkan mesin yang sudah berstandar ISO, SNI dan BPOM. Sementara kami sendiri, menyiapkan aturan, SDM hingga rekomendasi teknis di pusat," tandasnya. (weg)

Edisi : Selasa, 11 pebruari 2020

Hal : 6



Rp 1,6 Miliar untuk Menyulap RTH di Bekas Lahan BPU

● Dilengkapi Gazebo dan Fasilitas Wifi Gratis

SINGARAJA, TRIBUN BALI - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng tahun ini mulai melakukan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di eks lahan Bank Perniagaan Umum (BPU), yang terletak di pojok persimpangan antara Jalan Gajah Mada dengan Jalan Letkol Wisnu, Singaraja.

Sekretaris Dinas Perkimta Buleleng, I Gede Melanderat, Minggu (9/2) mengatakan, RTH ini nantinya dirancang dengan konsep tematik. Ar-

tinya, selain ada taman, di lahan seluas kurang lebih 10 are itu juga dapat dijadikan sebagai lokasi baca. Anggaran yang disediakan untuk membangun RTH ini sebesar Rp 1,6 miliar.

Di lahan tersebut, imbu Melanderat, nantinya akan dibangun berbagai fasilitas layaknya tempat nongkrong, seperti gazebo, tempat duduk dan meja untuk membaca, serta fasilitas-fasilitas gratis seperti Wifi. "Akan disediakan juga buku dan raknya di gazebo, bekerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustaka-

an," terangnya.

Seperti diketahui, bekas lahan BPU itu telah dihibahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemkab Buleleng pada tahun lalu, atas permohonan Badan Keuangan Daerah (BKD) khususnya bagian aset. Mengingat lokasi lahan sangat strategis, Pemkab pun menyulap bekas bangunan itu menjadi taman hijau, yang di dalamnya disediakan taman baca.

"Di lokasi ini harus minim bangunan fisik. Akan dibuat seperti Taman Yowana Asri," tutupnya. (rtu)



Pemkot Denpasar

Raih WTP 7 Kali Berturut-turut

Selama tujuh kali berturut-turut, Pemkot Denpasar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan Pemkot Denpasar dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali. Hal ini pun diapresiasi Kementerian Keuangan RI dengan memberikan penghargaan pada Kamis (31/10/2019) lalu yang diserahkan Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto kepada Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra di Kantor Walikota Denpasar. Penghargaan dalam bentuk piagam dan trofi diterima atas keberhasilan Pemkot Denpasar dalam menyusun dan menyajikan pengelolaan keuangan dengan opini WTP. Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penghargaan kepada Pemkot Denpasar yang telah mampu mempertahankan opini WTP selama tujuh kali berturut-turut.

Hal ini juga menjadi prestasi Pemkot Denpasar dengan kerja keras dan disiplin karena setiap tahun kriteria maupun penilaian dari BPK semakin meningkat dan semakin detail. Langkah ini juga membutuhkan sinergi dan koordinasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan yang bisa menyajikan laporan keuangan yang sangat berkualitas dari Pemkot Denpasar. Atas capaian ini, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra

mengatakan opini WTP ini bukanlah hal ringan, tetapi ini menjadi tantangan dan motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Lebih lanjut ia mengatakan, penghargaan ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pemahaman dalam penyerapan anggaran maupun tatakelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik. Pihaknya pun akan terus melakukan upaya perbaikan ke depannya. Untuk itu, Rai Mantra atas nama teman-teman



bupati se-Bali bersepakat untuk terus memperbaiki tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah. "Mengemban opini WTP bukan hal ringan, tetapi ini menjadi tantangan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pemeriksaan yang sangat profesional dan humanis," katanya. (adv/sup)



Pembangunan Pasar Banyuasri Sudah 19

■ Masuk Tahap Pemasangan Tiang di 960 Titik

■ Proyek dengan Anggaran Rp 180 Miliar

Persen

SINGARAJA, TRIBUN BALI - Progres pembangunan Pasar Banyuasri sudah mencapai 19 persen. Pihak rekanan, PT Tunas Jaya Sanur mengerjakan proyek tersebut lebih cepat dari target yang ditetapkan, 16 persen.

Plt Dinas PUPR Buleleng, I Putu Adipta Ekaputra, Selasa (25/2) mengatakan, saat ini proyek Pasar Banyuasri sudah memasuki tahap pemasangan tiang pancang di 960 titik. Dimana, panjang masing-masing tiang pancang itu sekitar sembilan meter.

"Tiang pancangnya didatangkan langsung dari pabrik. Tidak dicor di tempat, sehingga pengerjaannya lebih cepat. Cranenanya juga ada dua, jadi semua cepat. Setiap minggu juga dievaluasi, sehingga irama kerjanya bisa dijaga," ucapnya.

Sejauh ini, imbuh Adipta, pihak rekanan belum menemukan kendala dalam mengerjakan proyek senilai Rp 180 miliar tersebut. Bila saja kedepan hujan yang mengguyur di sekitar lokasi proyek terhitung cukup lama, sehingga berpengaruh pada deviasi, baru lah pihak rekanan memberlakukan dua shift jam kerja.

"Di Buleleng kan hujannya belum sampai berhari-hari, masih hitungan jam lah. Jadi mereka masih bisa bekerja. Kalau deviasi kecil, baru mereka akan memasang dua shift



TRIBUN BALI/RATU AYU ASTRI DESIANI

PASAR BANYUASRI - Suasana pembangunan Pasar Banyuasri, Selasa (25/2) yang hingga saat ini progresnya sudah mencapai 19 persen.

siang dan malam," terangnya.

Proyek Pasar Banyuasri ditargetkan rampung akhir Desember 2020. Adipta berharap, pasar yang bisa menampung hingga 1.448 pedagang tersebut nantinya dapat diresmikan langsung oleh presiden. Sebab dengan kedatangan presiden, Pemkab Buleleng dapat memanfaatkan momen tersebut untuk meminta anggaran merevitalisasi Pasar Anyar Singaraja.

"Momennya pas. Kami bisa minta bantuan ke presiden untuk merevitalisasi Pasar Anyar. Pasar Anyar

kan sekarang sudah agak kumuh. Nanti bisa dipadukan dengan bioskop, sehingga Buleleng jadi lebih ramai," tutupnya.

Seperti diketahui, Pasar Banyuasri dibangun tiga lantai. Lantai I disiapkan 200 los basah dan 252 los kering. Lantai II disiapkan 244 los dan 184 unit kios. Sedangkan di lantai III disiapkan 8 unit kios kuliner dan areal parkir untuk 136 mobil. Pasar ini nantinya juga bakal dilengkapi dengan lift barang dan lift untuk pengunjung. (rtu)

Edisi : Revisi, 26 Februari 2020

Hal : 5



Bupati Badung Kunjungi SMAN 2 Abiansemal

● Pembangunan Lab, Perpustakaan dan Penataan Sekolah Dilanjutkan

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta, Senin (24/2) berkunjung ke SMAN 2 Abiansemal yang berlokasi di Banjar Aseman, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal. Kehadiran bupati guna melihat secara langsung bangunan sekolah yang baru selesai dibangun dan kini sudah menerima siswa baru kelas 10. Pada kesempatan itu, bupati juga bertatap muka langsung dengan seluruh siswa, para guru, pegawai, komite sekolah, orang tua siswa guna memberikan motivasi dan semangat untuk kemajuan SMAN 2 Abiansemal.

Turut mendampingi Bupati yakni, Anggota DPRD Provinsi Bali I Bagus Alit Sucipta, Anggota DPRD Badung I Made Sumertha, I Nyoman Dirgayusa dan Ni Luh Putu Sekarini, Kadisdikpora Provinsi Bali Drs. Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Kadisdikpora Badung I Ketut Widia Astika, Camat Abiansemal IB Putu Mas Arimbawa beserta Tripika Kecamatan.

Dalam tatap muka tersebut, Bupati Giri Prasta menekankan, pembangunan di bidang pendidikan sudah



BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta, saat mengunjungi SMAN 2 Abiansemal bertatap muka dengan seluruh siswa, para guru, pegawai, komite sekolah dan orang tua siswa, di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal: Senin (24/2)

menjadi salah satu prioritas program pembangunan di Kabupaten Badung. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pendataan jumlah TK/PAUD dan SD di Badung termasuk jumlah siswa dan sarana dan prasarannya. Sehingga akan dapat diketahui berapa dibutuhkan sekolah SMP dan SMA.

Bupati asal Pelaga, Keca-

matan Petang itu mengatakan, Pembangunan SMAN 2 Abiansemal merupakan langkah konkret yang telah diwujudkan di tahun 2019 dengan anggaran APBD Badung sebesar 57,8 M lebih. Bangunan SMAN 2 sangat megah berlantai tiga dilengkapi dengan basemant. Sementara sarana prasarana pendukung seperti Laboratorium, Perpustakaan

dan penataan halaman sekolah akan segera dilaksanakan di tahun 2020 ini. "Saya pastikan Lab, Perpustakaan dan penataan sekolah digarap tahun ini dengan anggaran 14 Miliar," tegas Bupati.

Sementara terkait usulan sekolah agar diwujudkan jalan tembus Sedang-Sibangkaja, lantaran saat ini akses masuk sekolah melewati perumahan. Giri prasta pun sangat mengapresiasi dan dia sangat mendukung pembangunan jalan tersebut. "Terkait jalan tembus di Sibangkaja, kami minta agar dikordinasikan dengan masyarakat. Kalaupun nanti ada tanah masyarakat yang harus dibeli kami juga siap membeli, namun dengan satu catatan pembebasan lahan dilakukan oleh tim appraisal," tambah Bupati.

Kepada siswa, bupati menginginkan sebagai angkatan pertama di SMAN 2 Abiansemal, para siswa agar belajar dan menunjukkan kemampuan terbaik sehingga nantinya dapat berprestasi dan membawa nama baik sekolah, Badung maupun Bali di tingkat nasional. (adv/gus)